



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA



TAHUN 2014





KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA



TAHUN 2014

BUKU PUTIH
PERTAHANAN
INDONESIA



BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA 2014

ISBN 978-979-8878-04-6

Hak Cipta © 2008

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Cetakan Kedua, Oktober 2014

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun,
tanpa ijin tertulis dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Jl Medan Merdeka Barat No 13-14 Jakarta

Telp: (021) 3828055

Fax: (021) 3810954

Website: www.kemhan.go.id

Email: webstrahan@kemhan.go.id



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2014**

**TENTANG
BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Buku Putih Pertahanan Indonesia merupakan pernyataan kebijakan pertahanan negara secara menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap warga negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara dan membangun saling percaya antar negara;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan lingkungan serta konteks strategis sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA.

Pasal 1

Buku Putih Pertahanan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Buku Putih Pertahanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Buku Putih Pertahanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disebarluaskan ke masyarakat umum, baik domestik maupun internasional.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor: PER/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR



Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI

S

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA



**BUKU PUTIH
PERTAHANAN INDONESIA**





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014 yang merupakan representasi dari arah kebijakan pertahanan negara saat ini telah dapat diselesaikan. Hal ini sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang pada hakikatnya merupakan visi dari presiden terpilih/pemimpin yang akan datang. Di samping itu, penyusunan buku ini sebagai kontinuitas pembangunan pertahanan negara yang merupakan acuan/pedoman bagi pemerintah baru yang secara rinci dijelaskan dalam lampiran Buku Putih Pertahanan Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan di kawasan. Kondisi geografis suatu negara akan menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global. Di masa yang akan datang, keberadaan Indonesia akan dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Maka tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan, dan pertahanan yang mumpuni sangat diperlukan.

Oleh karena itu, substansi Buku Putih edisi kali ini adalah pemuktahiran kebijakan pertahanan dalam konteks perubahan yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan fungsi pertahanan negara. Konteks perubahan mencakup lingkungan strategis, baik global, regional, dan nasional. Esensi Buku Putih Pertahanan Indonesia adalah Kebijakan Pertahanan Indonesia dalam mengelola pertahanan negara serta pandangan bangsa Indonesia di bidang pertahanan dalam memosisikan diri dalam konteks regional dan global.

Seiring dengan perkembangan global yang menghadirkan hakikat ancaman yang kompleks antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter, pendekatan pertahanan negara ke depan memerlukan pendekatan secara nirmiliter yang terpadu dengan pendekatan secara militer. Dengan demikian, pembangunan postur pertahanan militer dan nirmiliter harus dilaksanakan secara bersama-sama sehingga menghasilkan suatu kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang memiliki efek penangkal dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan bangsa dari setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Tahun 2014, dengan terbitnya Buku Putih ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan permasalahan bangsa serta memenuhi kebutuhan segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam memahami secara jelas kebijakan pertahanan negara. Buku Putih Pertahanan Indonesia ini juga menjadi instrumen penting dalam menjalin dan membangun rasa saling percaya antarnegara serta kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Saya selaku pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan petunjuk-Nya, sehingga Buku Putih ini dapat diterbitkan sesuai rencana. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta berkontribusi dalam penyusunan Buku Putih Pertahanan Indonesia ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh bangsa Indonesia.

Jakarta, 13 Oktober 2014
Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro

daftar isi

ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
1. PENDAHULUAN	3
2. LINGKUNGAN DAN KONTEKS STRATEGIS	7
2.1 Umum	7
2.2 Dinamika Lingkungan Keamanan Strategis di Kawasan Asia Pasifik	7
2.3 Modernisasi Kekuatan Militer	9
2.4 Isu Perbatasan Antarneegara	10
2.5 Konflik Intra dan Antarneegara	11
2.6 Kecenderungan Konflik Kontemporer	13
2.7 Isu Senjata Pemusnah Massal	15
2.8 Terorisme	16
2.9 Spionase	18
2.10 Kejahatan Lintas Negara	19
2.11 Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	22
2.12 Perubahan Iklim	24
2.13 Bencana Alam	24
2.14 Keamanan Pangan, Air, dan Energi	25
2.15 Epidemi	27
2.16 Perkembangan Lingkungan dan Konteks Strategis Nasional	29
3. KONSEPSI PERTAHANAN NEGARA	37
3.1 Umum	37
3.2 Tujuan Nasional	37
3.3 Kepentingan Nasional	39

3.4	Hakikat Pertahanan Negara	40
3.5	Sistem Pertahanan Negara	41
3.6	Fungsi Pertahanan Negara	44
3.7	Penggunaan Kekuatan Pertahanan	46
4.	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN NEGARA	49
4.1	Umum	49
4.2	Kebijakan Pertahanan Negara	49
4.3	Strategi Pertahanan Negara	53
4.3.1	Tujuan Pertahanan Negara dan Sasaran Strategis	53
4.3.2	Sumber Daya Pertahanan	54
4.3.3	Cara Mencapai Sasaran Strategis	56
4.3.3.1	Mempersiapkan Pertahanan yang Bersifat Semesta	57
4.3.3.2	Mempersiapkan Pertahanan Defensif Aktif	59
4.3.3.3	Menyusun Pertahanan Berlapis	60
4.3.3.4	Memberdayakan Industri Pertahanan	71
4.3.3.5	Meningkatkan Kerja Sama Internasional	72
5.	PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN	74
5.1	Umum	75
5.2	Menuju Kemandirian Sarana Pertahanan	76
5.3	Mewujudkan Industri Pertahanan Dalam Negeri	78
5.4	Kerja Sama dalam Pengembangan Industri Pertahanan	79
6.	KERJA SAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PERTAHANAN	80
6.1	Umum	81
6.2	Esensi Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan	81
6.3	Lingkup Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan	82
6.3.1	Kerja Sama Bilateral	84
6.3.1.1	Negara Anggota ASEAN	84
6.3.1.2	Amerika Serikat	85
6.3.1.3	Republik Rakyat Tiongkok	86
6.3.1.4	Australia	87
6.3.1.5	Rusia	89
6.3.1.6	Jepang	90
6.3.1.7	Korea Selatan	90
6.3.1.8	India	91
6.3.1.9	Timor Leste	92
6.3.1.10	Papua New Guinea	92
6.3.1.11	Brasilia	93
6.3.1.12	Negara-negara Uni Eropa	93
6.3.1.13	Negara-negara Afrika	96

6.3.2	Kerja Sama Regional	96
6.3.2.1	<i>ASEAN Defence Ministers' Meeting</i>	97
6.3.2.2	<i>ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus</i>	98
6.3.2.3	<i>ASEAN Regional Forum</i>	99
6.3.2.4	Forum Dialog Regional	100
6.3.2.5	Forum-Forum Keamanan Lainnya	100
6.3.3	Kerja sama Multilateral	101
6.3.3.1	Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa	102
6.3.3.2	Bantuan Kemanusiaan dan Bencana	105
6.3.3.3	Forum Internasional Lainnya	106
7.	POSTUR PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019	108
7.1	Umum	109
7.2	Postur Pertahanan Militer	111
7.2.1	Komponen Utama	111
7.2.1.1	Kekuatan	111
7.2.1.2	Kemampuan	112
7.2.1.3	Gelar	116
7.2.2	Komponen Cadangan	127
7.2.3	Komponen Pendukung	128
7.3	Postur Pertahanan Nirmiliter	129
7.3.1	Unsur Utama	129
7.3.2	Unsur-Unsur Lainnya	134
8.	PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA	136
8.1	Umum	137
8.2	Arah Pembangunan Pertahanan Negara	137
8.3	Rancang Bangun Pertahanan Negara	139
8.4	Pembangunan Pertahanan Militer	140
8.4.1	Komponen Utama	140
8.4.2	Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung	145
8.5	Pembangunan Pertahanan Nirmiliter	146
8.5.1	Unsur Utama	146
8.5.2	Unsur Lainnya	146
8.6	Pembinaan Pertahanan Negara	147
8.6.1	Kapabilitas Pertahanan Negara	148
8.6.2	Pengorganisasian Kekuatan Pertahanan Negara	148
8.6.3	Strategi Perancangan Kapabilitas Pertahanan Negara	149
9.	ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA	151
9.1	Umum	151

9.2	Alokasi Anggaran	151
9.3	Proyeksi ke Depan	153
10.	PENUTUP	155







BUKU PUTIH
PERTAHANAN INDONESIA



Buku Putih Pertahanan merupakan kebijakan pertahanan secara menyeluruh dan disebarluaskan ke masyarakat umum, baik domestik maupun internasional untuk menciptakan saling percaya dan meniadakan potensi konflik.

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis saat ini dapat mempengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara. Dinamika yang perlu dicermati dalam kurun lima tahun ke depan antara lain pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada perkembangan kekuatan militer khususnya di kawasan Asia Pasifik. Selain hal tersebut munculnya ancaman non-tradisional seperti terorisme, penggunaan senjata pemusnah massal, spionase, masih akan mewarnai dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kondisi dalam negeri juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan konteks strategis yang dipicu oleh situasi dan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Perkembangan ini dapat menimbulkan adanya ancaman dan tantangan yang berpengaruh terhadap stabilitas dan keamanan serta penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia.
- 1.2 Berdasarkan perkembangan dalam konteks strategis, prioritas penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan negara bagi bangsa Indonesia dibangun atas dasar sistem pertahanan semesta, tidak agresif, dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Permasalahan yang berkaitan dengan pertahanan negara, penyelesaiannya dilakukan dengan mengedepankan diplomasi dan diperkuat oleh kekuatan militer yang modern.

Bab 1

Pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

Menyikapi perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang penuh dinamika tersebut, Indonesia secara aktif membangun kemitraan global, mengedepankan semangat kebersamaan antarnegara, dan melakukan kebijakan dengan mewujudkan keseimbangan yang dinamis (*dynamic equilibrium*), yaitu kondisi kawasan yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan. Hal tersebut dilakukan atas dasar keyakinan bahwa kemajuan sebuah negara bukannya ancaman bagi negara lain, melainkan merupakan peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan dalam membangun kekuatan pertahanan.

- 1.3 Indonesia sebagai negara yang berdaulat memandang penting untuk membangun kekuatan pertahanan. Bentuk pertahanan yang disusun dengan menyinergikan aspek Pertahanan Militer dan aspek Pertahanan Nirmiliter. Menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama yang diperkuat oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Pertahanan menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai Unsur Utama dibantu Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Pembangunan kekuatan militer tidak ditujukan sebagai bentuk perlombaan senjata (*arm race*), tetapi dibangun sebagai upaya pencapaian standar profesionalisme bagi angkatan bersenjata. Sebagai negara yang ingin membangun kekuatan pertahanan memerlukan anggaran yang memadai.

Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

Secara bertahap Indonesia akan meningkatkan anggaran pertahanan untuk membangun kapabilitas pertahanan negara yang memiliki *deterrence standard* dan melampaui tingkat *Minimum Essential Force* (MEF) yang disesuaikan dengan kebijakan penganggaran pertahanan. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Postur Pertahanan Negara yang merupakan esensi Buku Putih Pertahanan Indonesia.

- 1.4 Buku Putih Pertahanan Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (4), bahwa Pemerintah menyusun Buku Putih Pertahanan. Buku putih berisi pernyataan kebijakan pertahanan negara oleh pemerintah secara menyeluruh dan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara serta disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik domestik maupun internasional untuk menciptakan rasa saling percaya dan meniadakan potensi konflik.

Buku putih pertahanan pada lingkup domestik, digunakan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan negara yang merupakan bentuk transparansi, akuntabilitas publik, dan peningkatan pemahaman serta kesadaran tentang pertahanan negara. Pada lingkup internasional, digunakan untuk membangun sikap saling percaya (*Confidence Building Measures/CBMs*) dengan negara-negara lain.

"Buku putih pertahanan" adalah pernyataan kebijakan pertahanan secara menyeluruh yang diterbitkan oleh Menteri dan disebarluaskan ke masyarakat umum, baik domestik maupun internasional untuk menciptakan saling percaya dan meniadakan potensi konflik. (Penjelasan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)



Dalam isu Laut Tiongkok Selatan, Indonesia bukan merupakan claimant state. Indonesia melakukan kebijakan mewujudkan keseimbangan yang dinamis (dynamic equilibrium).

LINGKUNGAN DAN KONTEKS STRATEGIS

Bab 2

2.1 Umum

Esensi dari analisis terhadap perkembangan lingkungan dan konteks strategis kita dapat menentukan perkiraan ancaman, tantangan, dan risiko terhadap pertahanan negara. Perkiraan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pemilihan Strategi Pertahanan Negara. Selanjutnya Strategi Pertahanan Negara dijadikan dasar untuk membangun Postur Pertahanan Negara agar dapat mewujudkan kepentingan nasional.

Perkiraan ancaman, tantangan, dan risiko penyelenggaraan pertahanan negara dapat ditentukan melalui analisis perkembangan lingkungan dan konteks strategis.

2.2 Dinamika Keamanan Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Pasifik

Kawasan Asia Pasifik merupakan pusat gravitasi baru pertumbuhan ekonomi dunia. Beberapa negara ekonominya sempat tumbuh di atas dua digit dan beberapa negara ekonominya tumbuh lebih baik dibanding di luar kawasan. Kondisi tersebut merupakan hal yang sangat mendominasi kawasan Asia Pasifik karena merupakan tempat bagi 50% populasi dunia. Bangsa-bangsa di Asia Pasifik menghasilkan 29,7% PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dunia dan diprediksi akan terus meningkat pada masa mendatang. Di bidang industri penerbangan, Asia Pasifik menyumbangkan 43% dari total pekerjaan, dan 21% PDB dunia dibangkitkan dari industri penerbangan yang sedang berkembang.

Dengan potensi Asia Pasifik sebagai sebuah *economic power-house* (pusat kekuatan ekonomi dunia), maka dapat memicu munculnya tantangan keamanan, baik tradisional maupun non-tradisional.

Sebagai pusat pertumbuhan baru, Asia Pasifik juga merupakan wilayah pusat kompetisi strategis global. Dalam enam dekade kekuatan global telah menjadikan wilayah Asia Pasifik sebagai sebuah *economic power-house*. Banyak negara muncul sebagai pusat kekuatan ekonomi dunia. Dengan potensi ekonomi demikian, Asia Pasifik merupakan kawasan yang dapat memicu munculnya tantangan keamanan baik ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional. Pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada perkembangan kekuatan militer, karena 44% pengimpor senjata terbesar berada di Asia Pasifik. Demikian juga dari 20 besar populasi dunia, 9 negara berada di Asia, dan angkatan bersenjata termodern dan terbesar juga berada di Asia Pasifik.

Pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang tinggi menyebabkan Tiongkok memiliki peluang untuk melakukan upaya modernisasi kekuatan dan peningkatan kapasitas militernya. Perkembangan tersebut telah menimbulkan spekulasi dan tanggapan beragam di kalangan negara-negara dalam kawasan. Sebagai implikasi dari perkembangan kekuatan militer Tiongkok yang dianggap memperlihatkan pembangunan postur militer yang aktif dan masif. Beberapa negara di kawasan telah melakukan langkah-langkah untuk memodernisasi kekuatan militernya. Alasan yang utama untuk melakukan modernisasi antara lain adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik bersenjata karena salah perhitungan (*miscalculation*).

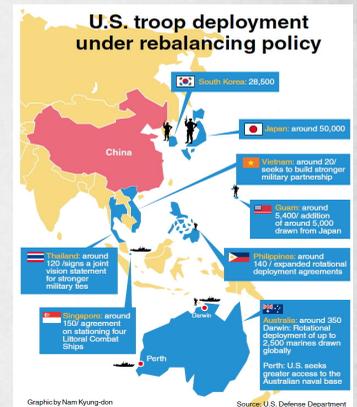
Keberadaan Amerika dan Tiongkok dalam isu Laut Tiongkok Selatan, diharapkan tidak terpengaruh pada kondisi keamanan, tetapi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan menjaga stabilitas, serta perdamaian di kawasan.

Di sisi lain Amerika Serikat (AS) telah menerapkan suatu kebijakan strategis yang dinamakan “*US Rebalancing Strategy*”. *Rebalance* sebenarnya mempunyai elemen diplomasi, ekonomi, dan militer, tetapi elemen militer paling banyak menarik perhatian. Perkembangan kekuatan militer Tiongkok dan strategi *Rebalancing* AS menentukan perubahan lingkungan startegis pada beberapa tahun ke depan.

Keberadaan kedua negara tersebut diharapkan tidak berpengaruh pada kondisi keamanan, tetapi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, maupun menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Dalam konteks tersebut kedua negara diharapkan dapat mengambil tanggung jawab stabilitas dan perdamaian kawasan secara bijaksana.

2.3 Modernisasi Kekuatan Militer

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah melakukan upaya modernisasi kekuatan pertahanan, terutama yang dipicu dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal itu bertujuan tidak hanya untuk menyetarakan dan mencapai standarisasi dengan sistem aliansi, tetapi juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kontinjensi akibat miscalculation dan misperception sebagai akibat ketidakpastian situasi strategis. Kesalahan penilaian/persepsi terhadap sebuah peristiwa juga dapat menciptakan suatu situasi yang kompleks dan berbahaya, terutama dikaitkan dengan adanya potensi konflik yang sedang berlangsung di kawasan, seperti di Laut Tiongkok Timur (*East China Sea*) dan Laut Tiongkok Selatan (*South China Sea*).



Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah melakukan upaya modernisasi kekuatan pertahanan, terutama yang dipicu dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.



Modernisasi kekuatan militer dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pertahanan.

Modernisasi kekuatan militer juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pertahanan. Beberapa negara di kawasan telah memodernisasi sistem persenjataan konvensional strategis maupun sistem penginderaan modern terintegrasi seperti *command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR)*, dan sistem pertahanan siber untuk mengamankan ruang siber. Saat ini serangan siber menjadi sebuah strategi yang lebih efektif dilakukan dan sangat murah sehingga dapat menimbulkan dampak yang strategis terhadap suatu negara. Dalam modernisasi pertahanan yang dapat menimbulkan miscalculation dan misperception adalah apabila akuisisi sistem pertahanan yang bersifat strategis dengan penempatan yang provokatif.

2.4 Isu Perbatasan Antarnegara

Kawasan Asia Pasifik masih memiliki sejumlah sengketa perbatasan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh semua pihak. Fakta empiris menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perang adalah persoalan batas wilayah. Konflik dan krisis yang sedang berlangsung dalam konteks ini dapat meningkatkan terjadinya ancaman tradisional, yang apabila manajemen sengketa tidak dilakukan secara tepat.

Permasalahan perbatasan berpotensi menyebabkan ketegangan dan konflik. Sebagai sebuah negara kepulauan yang sangat terbuka dari berbagai arah, Indonesia memiliki sejumlah agenda mengenai perbatasan yang masih terus berlangsung hingga kini.



Permasalahan perbatasan berpotensi menyebabkan ketegangan dan konflik.

Selain masalah perbatasan yang belum terselesaikan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia juga memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar, dua belas pulau-pulau kecil terluar diantaranya memerlukan prioritas dalam pengelolaannya agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjaga. Pelanggaran dalam bentuk memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia secara ilegal masih berpotensi terjadi, terutama di kawasan perbatasan yang belum mendapatkan kesepakatan semua pihak dan di sekitar pulau-pulau kecil terluar yang belum dikelola dengan baik. Pelanggaran dalam bentuk memasuki wilayah udara dan wilayah laut tanpa izin akan menimbulkan ketegangan hubungan, bahkan konflik karena melanggar kedaulatan negara.

2.5 Konflik Intra dan Antarnegara

Konflik intra dan antarnegara masih terjadi di beberapa kawasan dunia. Di kawasan Afrika masih terjadi konflik internal, bahkan sampai perang saudara yang menyebabkan terjadinya pengungsian penduduk. Konflik terjadi karena dipicu masalah pertarungan politik dan kekuasaan, ketidakpuasan dan ketidakadilan, persaingan akses ke sumber daya, penindasan, korupsi, dan masalah ketiadaan demokrasi.

Konflik intranegara cenderung bereskalasi dan bertransformasi. Konflik yang terjadi di beberapa kawasan di Afrika Utara, Afrika Tengah, Israel-Palestina, Irak, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Eropa masih terjadi, bahkan cenderung meningkat dan cenderung dapat berubah menjadi perang sipil yang tidak mudah untuk dicarikan solusi damai.



Indonesia memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar di mana 12 pulau diantaranya memerlukan prioritas dalam pengelolaannya agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjaga.

Konflik intranegara cenderung bereskalasi dan bertransformasi. Konflik terjadi karena dipicu masalah pertarungan politik dan kekuasaan, ketidakpuasan dan ketidakadilan, persaingan akses ke sumber daya, penindasan, korupsi, dan masalah ketiadaan demokrasi.

Demikian juga konflik antarnegara, masih berpotensi terjadi di Asia Timur yang penyelesaiannya masih membutuhkan pendekatan-pendekatan baru dan diharapkan tidak menggunakan pendekatan kekerasan yang mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan.

Institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan konflik. PBB memiliki konsep *responsibility to protect* (R2P) dan *protection of the civilian* (POC) dalam menyelesaikan konflik.

R2P menjelaskan, apabila negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya, kewajibannya akan bergeser kepada komunitas internasional, dalam hal ini Dewan Keamanan (DK) PBB. Sebagai jalan terakhir (*last resort*), DK PBB akan memberi mandat intervensi militer ke negara tersebut walaupun tanpa izin negara yang bersangkutan (*without consent*) dalam rangka melindungi penduduk sipil.

POC adalah seluruh kegiatan yang ditujukan pada pemenuhan penghormatan atas hak-hak individu yang sesuai dengan semangat dan isi lembaga-lembaga hukum seperti *Universal Declaration on Human Right* 1948, Hukum Humaniter Internasional, dan hukum terkait para pengungsi. Organisasi kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan tidak berpihak (*impartial manner*), dalam arti tidak dilandasi atas dasar ras, bangsa, asal suku, bahasa, ataupun jenis kelamin.

Konflik yang terjadi di beberapa kawasan di Afrika Utara, Afrika Tengah, Israel-Palestina, Irak, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Eropa masih terjadi, bahkan cenderung meningkat dan dapat berubah menjadi perang sipil yang tidak mudah untuk dicarikan solusi damai.

Indonesia memiliki tanggung jawab moral sebagai penjabaran tugas konstitusi negara untuk ikut menciptakan perdamaian dunia. Konflik yang cenderung meningkat di beberapa kawasan, terutama di Afrika dan Timur Tengah, akan berpengaruh pada kebutuhan pengerahan pasukan pemelihara perdamaian, khususnya pasukan perdamaian di bawah mandat PBB melalui *Peacekeeping Operations* (PKO) atau misi perdamaian di bawah bendera organisasi internasional lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

2.6 Kecenderungan Konflik Kontemporer

Pasca-perang dingin, pola konflik bersenjata mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan teknologi pertahanan, upaya untuk menghindari jatuhnya korban, biaya perang yang tinggi, semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional terkait dengan perang telah mempengaruhi kecenderungan bentuk konflik kontemporer di dunia.

Pola untuk menguasai ruang tidak lagi dilakukan secara frontal, tetapi dilakukan dengan cara-cara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat *proxy war*. Tren untuk menguasai suatu negara dengan menggunakan “senjata” asimetris yang dibangun secara sistematis. Penciptaan kondisi lewat propaganda dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ruang siber seperti jejaring sosial.



Indonesia memiliki tanggung jawab moral sebagai penjabaran tugas konstitusi negara untuk ikut menciptakan perdamaian dunia.

Permasalahan serius peta politik dunia di samping konflik eksternal antarnegara, justru makin meningkatnya konflik internal suatu negara, yaitu konflik nasional yang memicu gerakan separatis karena kepentingan politik dan wilayah. Dinamika konflik sosial didasarkan pada persoalan sosial dan budaya, primordialisme, seperti latar belakang etnis, ras, dan agama.

Pola *divide et impera* atau memecah-belah dari dalam negeri merupakan cara yang efektif untuk menghancurkan suatu negara dari dalam. Sebagaimana yang telah terjadi pada fenomena *Arab Spring*, kekacauan politik dan keamanan di Mesir, perang saudara di Irak, Afghanistan, Libia, dan di Suriah membuktikan adanya perubahan pola konflik.

Konflik dikembangkan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, diisukan adanya pelanggaran HAM, tuntutan demokratisasi dan reformasi politik, penggantian pemimpin yang tirani, isu ancaman senjata pemusnah massal. *Kedua*, muncul bentuk-bentuk ketidakpuasan masyarakat di berbagai aspek kehidupan melalui aksi demonstrasi besar-besaran. *Ketiga*, munculnya aksi demonstrasi yang bersifat anarkis yang berubah menjadi kerusuhan sosial dan konflik antarkelompok masyarakat. *Keempat*, peningkatan konflik komunal menjadi perang saudara atau perang sipil. *Kelima*, permintaan mandat atau resolusi PBB untuk pemberian embargo atau sanksi ekonomi dan perdagangan, bahkan politik. *Keenam*, munculnya mandat DK PBB yang melegalkan penggunaan kekuatan militer untuk melakukan intervensi dengan alasan *peace enforcement* dan *peacemaking*.

google



Fenomena *Arab Spring*, kekacauan politik dan keamanan di Mesir, perang saudara di Irak, Afghanistan, Libia, dan di Suriah membuktikan adanya perubahan pola konflik.

2.7 Isu Senjata Pemusnah Massal

Dunia masih menghadapi ancaman penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak (*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives/CBRN-E*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam bidang CBRN-E yang bersamaan dengan kemajuan alat transportasi dan komunikasi informasi telah meningkatkan penguasaan, penggunaan, dan penyebaran bahan dan ilmu pengetahuan tentang CBRN-E untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Namun, penggunaan dan penyebaran bahan-bahan berbahaya tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan umat manusia, terutama bila secara ilegal dapat dikuasai oleh kelompok-kelompok teroris. Kerawanan penyebaran dan penggunaan bahan-bahan berbahaya diperjelas dengan fakta bahwa masih terdapat beberapa negara yang memproduksi bahan-bahan berbahaya tersebut, tetapi tujuan pembuatannya tidak transparan.

Indonesia berpotensi menghadapi ancaman penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang yang dinilai strategis bagi jalur komunikasi pelayaran dan penerbangan. Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia berpotensi menghadapi ancaman penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak apabila penanganannya tidak sesuai prosedur dan tidak dapat diawasi atau disalahgunakan.



Penggunaan dan penyebaran bahan-bahan berbahaya CBRN-E berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan umat manusia, terutama bila secara ilegal dapat dikuasai oleh kelompok-kelompok teroris.

Selain itu, keterbukaan wilayah perairan dan pelabuhan menyebabkan Indonesia rawan menjadi wilayah perdagangan, pelintasan, dan penyebaran bahan-bahan berbahaya secara ilegal (*Illicit Trafficking of CBRN-E Material*).

2.8 Terorisme

Tindak Pidana Terorisme yaitu Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)



Ancaman aksi teroris masih merupakan isu sentral keamanan global. Kematian tokoh teroris Osama bin Laden, tidak mengurangi kemungkinan serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda.

Organisasi teroris masih memanfaatkan era keterbukaan untuk mendapatkan informasi dan saling bekerja sama secara internal antara satu organisasi teroris dan yang lainnya. Peluang tersebut masih dipergunakan oleh organisasi-organisasi teroris untuk mengamankan akses secara geografis dan mendapatkan persenjataan serta dukungan finansial maupun tempat-tempat berlindung sebagaimana yang terjadi di Afrika Utara, Afrika Tengah, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Pada kondisi tersebut, organisasi teroris global, termasuk kelompok-kelompok radikal keagamaan, melaksanakan aksi-aksi teror di negara-negara miskin yang situasinya politik tidak stabil dan pemerintahannya lemah.

Ancaman aksi teroris masih merupakan isu sentral keamanan global. Kematian tokoh teroris Osama bin Laden, tidak mengurangi kemungkinan serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda. Walaupun kemampuan komando dan pengendalian organisasinya menurun, Al-Qaeda mempunyai kelompok-kelompok yang berafiliasi seperti di Afrika Utara, Afrika Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tengah sehingga memiliki kemampuan untuk melanjutkan aksi-aksi terorisme.

Teroris perorangan menunjukkan kecenderungan peningkatan secara masif. Dalam hubungan kelompok, kini muncul aksi radikalisme kekerasan dalam wujud *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS). Selain hal tersebut terdapat individu-individu radikal yang menjadi teroris-teroris perorangan walaupun tidak mempunyai afiliasi dengan Al-Qaeda atau terinspirasi oleh ideologi Al-Qaeda. Mereka sering disebut *home-grown terrorist* yang kadang-kadang sangat sulit untuk mengetahui motifnya apakah diinspirasi oleh adanya konflik di suatu wilayah, kebencian terhadap kebijakan negara barat, atau hal lain yang mendorong mereka melakukan tindakan terorisme.

Ancaman aksi terorisme di Indonesia masih tetap ada walaupun cenderung menurun. Tindakan kontraterorisme yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia berhasil membongkar jaringan terorisme di beberapa tempat di Indonesia. Beberapa pelaku telah ditangkap, dihukum, dan dipenjarakan, bahkan beberapa dari mereka telah tewas. Namun, terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa ancaman aksi terorisme masih belum sepenuhnya dapat ditiadakan.

Upaya deradikalisasi, kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap radikal masih terus berlangsung tanpa dapat dibatasi. Media komunikasi terutama internet masih dianggap sangat efektif sebagai wahana untuk menyampaikan pesan-pesan radikal dan proliferasi ideologi terorisme. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses regenerasi di kalangan kelompok radikal di Indonesia karena selalu muncul wajah-wajah dan kelompok-kelompok baru yang diduga terlibat merencanakan aksi terorisme.

Teroris perorangan menunjukkan kecenderungan peningkatan secara masif. Dalam hubungan kelompok, kini muncul aksi radikalisme kekerasan dalam wujud *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS).



Ancaman aksi terorisme di Indonesia masih tetap ada walaupun cenderung menurun. Tindakan **kontra-terorisme** yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia berhasil membongkar jaringan terorisme di beberapa tempat di Indonesia.

Kelompok-kelompok radikal menunjukkan eksistensinya dalam aksi-aksi untuk menentang kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan praktik-praktik keagamaan. Perubahan aksi terorisme juga ditandai dengan aksi penyerangan bersenjata terhadap personel dan markas aparat keamanan, bahkan terdapat indikasi yang kuat adanya ancaman aksi terorisme terhadap pejabat negara dan objek vital strategis nasional.

2.9 Spionase

Kegiatan intelijen dengan berbagai cara dan metode cenderung dilakukan oleh setiap negara. Pada era saat ini hingga lima tahun ke depan, situasi lingkungan strategis berkembang secara dinamis, penuh ketidakpastian, situasinya sangat kompleks dan mudah berubah, sangat sulit bagi suatu negara mengetahui hakikat ancaman dan tantangan terhadap kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, untuk menjawab hakikat ancaman dan tantangan terhadap kepentingan nasionalnya, negara-negara tersebut akan berusaha mendapatkan informasi strategis.

Upaya mendapatkan informasi akan dilakukan dengan kegiatan intelijen baik intelijen dengan menggunakan agen klandestin atau mata-mata (*Human Intelligence*) maupun penggunaan teknologi seperti intelijen citra (*Imagery Intelligence*), intelijen sinyal (*Signals Intelligence*), intelijen pengukuran (*Measurement and Signature Intelligence*), intelijen elektronik (*Electronic Intelligence*), intelijen teknik (*Technical Intelligence*) dan intelijen sumber terbuka (*Open Source Intelligence*). Indonesia menyadari dan mewaspadai adanya upaya kegiatan intelijen termasuk penyadapan yang dilakukan pihak asing.

Kegiatan intelijen dengan berbagai cara dan metode cenderung dilakukan oleh setiap negara. Indonesia menyadari dan mewaspadai adanya upaya kegiatan intelijen termasuk penyadapan yang dilakukan pihak asing.

2.10 Kejahatan Lintas Negara

Kawasan Asia Tenggara masih rawan terhadap kejahatan lintas negara. Sesuai dengan *World Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* tahun 2002, di kawasan Asia Tenggara terdapat beberapa jenis kejahatan lintas negara seperti: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, *sea-piracy*, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi internasional, dan kejahatan siber.

Di beberapa negara, telah terjadi kejahatan lintas negara, yaitu kejahatan narkoba, yang mempunyai hubungan erat dengan sumber pendanaan kelompok teroris dan separatis. Perkembangan terorisme yang tumbuh dari dalam wilayah sendiri (*home-grown terrorism*) dan kelompok-kelompok beraliran keras, maupun kelompok-kelompok kriminal terorganisasi, sangat dipengaruhi oleh perkembangan kejahatan antarnegara.

Kejahatan lintas negara masih merupakan tantangan bagi Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya penegakan hukum serta perlindungan warga negara dari mata rantai kejahatan lintas negara. Indonesia masih ditantang untuk menghadapi kejahatan peredaran gelap narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia atau *human trafficking*, *illegal immigrant*, terorisme, korupsi, serta kejahatan terorganisasi yang dikendalikan aktor bukan negara (*non-state actors*).

Fenomena kejahatan, khususnya kejahatan lintas negara yang terorganisasi, akan berdampak besar pada penurunan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.



Indonesia masih ditantang untuk menghadapi kejahatan peredaran gelap narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia atau *human trafficking*, *illegal immigrant*, terorisme, korupsi, serta kejahatan terorganisasi yang dikendalikan aktor bukan negara (*non-state actors*).

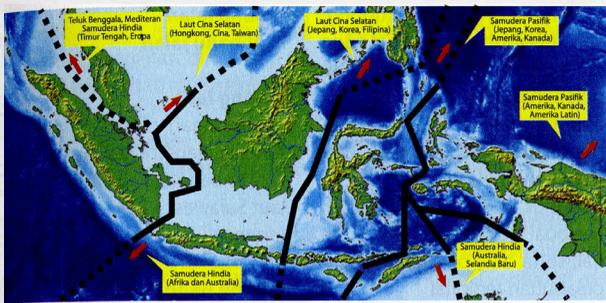
Kejahatan ini juga merongrong keamanan negara yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara dan mengancam stabilitas pembangunan.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan juga mempengaruhi perkembangan jenis kejahatan lintas negara. Perkembangan teknologi kerap mempengaruhi kecenderungan peningkatan kejahatan, pencurian dan penyelundupan objek-objek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, kejahatan terhadap lingkungan, maupun kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi. Secara umum kejahatan ini merupakan kejahatan bukan kekerasan namun mengakibatkan kerugian finansial.

Wilayah lautan Indonesia yang luas memiliki kerawanan adanya gangguan keamanan. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982, Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan empat *choke points* yang strategis bagi kepentingan global.

Ketiga ALKI tersebut, ALKI I yang melintasi Laut Tiongkok Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Indonesia. ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudra Indonesia. ALKI III terbagi atas beberapa jalur dan sumbu, yaitu: *pertama*, ALKI IIIA melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Ombai, Laut Sawu ke Samudra Indonesia; *kedua*, ALKI IIIB melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Leti, dan Laut Timor; *ketiga*, ALKI IIIC melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda ke Laut Arafuru;

Wilayah lautan Indonesia yang luas memiliki kerawanan adanya gangguan keamanan. Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan empat *choke points* yang strategis bagi kepentingan global.



keempat, ALKI IIID melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sewu sebelah timur Pulau Sawu ke Samudra Indonesia; serta *kelima*, ALKI III E melintasi Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. Sedangkan empat *choke points* meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Kawasan-kawasan maritim tersebut memiliki nilai strategis bagi kepentingan negara-negara di dunia, terutama sebagai jalur perdagangan dan transportasi.

Secara geostrategi, Indonesia berkewajiban untuk mengamankan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan kawasan lalu lintas perdagangan terpadat di dunia yang menghubungkan Asia Barat dengan Asia Timur. Setiap hari sedikitnya 140 kapal atau 50.000 kapal per tahun membawa 30% barang perdagangan dunia serta sebelas juta barel minyak dari Timur Tengah ke Jepang dan Tiongkok. Isu keamanan di Selat Malaka masih diwarnai adanya gangguan perompakan dan pembajakan laut. Walaupun telah terjadi penurunan namun potensi terjadinya perompakan dan pembajakan di laut masih tetap ada.

Indonesia telah membangun kerja sama dengan negara lain dalam meningkatkan pengawasan maritim di sekitar Selat Malaka dan Laut Sulawesi, seperti membangun radar-radar penginderaan maritim terintegrasi (*Integrated Maritime Surveillance System/IMSS*) di sepanjang Selat Malaka dan Laut Sulawesi, melakukan patroli bersama (*Eyes in the Sky/EiS*, Malsindothai, dll.), serta latihan militer bersama.



Selat Malaka merupakan kawasan lalu lintas perdagangan terpadat di dunia yang menghubungkan Asia Barat dengan Asia Timur.



Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan. (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002)

Pengurangan risiko jatuhnya korban di pihak sendiri dikembangkan melalui penerapan teknologi robot pada berbagai sistem persenjataan yang dapat mengurangi pengerahan pasukan secara besar-besaran.

2.11 Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan iptek mempengaruhi bentuk dan pola perang di masa yang akan datang. Walaupun pola dan bentuk perang asimetris masih terjadi di beberapa wilayah, namun inovasi teknologi persenjataan perang konvensional terus berkembang dengan pesat.

Perang di masa yang akan datang semakin mempertimbangkan untuk mengurangi dampak kerusakan dan korban terutama di kalangan sipil, yaitu dengan menerapkan teknologi yang memiliki akurasi tinggi. Pengurangan risiko jatuhnya korban di pihak sendiri juga dikembangkan melalui penerapan teknologi robot pada berbagai sistem persenjataan yang dapat mengurangi pengerahan pasukan secara besar-besaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menciptakan peperangan berbasis jaringan yang mengandalkan keunggulan informasi, sekaligus mampu melaksanakan berbagai perang di ranah digital ataupun siber.

Dampak negatif yang ditimbulkan telah membawa situasi keamanan dunia yang mengkhawatirkan, antara lain penggunaan ruang siber yang berimplikasi pada kejahatan siber dan bersifat tak mengenal batas; rekayasa genetika bioteknologi yang berimplikasi negatif; kemampuan teknologi nano yang mampu membuat produk sangat kecil sehingga sulit dideteksi, misalnya alat penyadap dalam sebuah komputer; rekayasa teknologi penerbangan dan nuklir dalam pembuatan senjata nuklir maupun wahana peluncur roket, peluru kendali maupun wahana terbang tanpa awak yang mampu melakukan pengintaian dan penghancuran, serta teknologi ruang angkasa yang dimanfaatkan untuk mengeksplorasi ruang atmosfer.

Revolusi di bidang teknologi informasi telah mengubah lingkungan keamanan strategis secara signifikan. Lingkungan keamanan saat ini telah berubah secara cepat seiring dengan penggunaan jaringan komunikasi dan informasi, terutama internet, termasuk di sektor pertahanan. Kemajuan teknologi dan informasi telah menyebabkan berbagai sektor kehidupan menjadi terhubung dalam suatu ruang siber yang tercipta oleh jaringan, kabel, dan alamat *Internet Protocol* (IP) melalui komputer dan sarana lain. Perorangan dan komunitas terhubung, tersosialisasi dan terorganisasi secara mendunia melalui ruang siber. Di samping memberikan suatu dampak positif dari sisi informasi dan komunikasi, kecenderungan tersebut telah menciptakan suatu peluang bagi terjadinya serangan siber. Dari aspek pertahanan, ruang siber telah menghasilkan domain kelima yang dapat dijadikan sebagai medan peperangan, selain medan perang darat, laut, udara, dan ruang angkasa.

Sektor pertahanan negara memiliki kerawanan terhadap serangan siber. Penggunaan sistem, peralatan, dan *platform* berbasis internet cenderung semakin meluas di sektor pertahanan. Namun, teknologi sistem pengamanan jaringan dan informasi sering tertinggal. Kerawanan tersebut akan dieksploitasi oleh aktor tidak dikenal (*anonymous*) dan organisasi intelijen asing untuk mencari informasi dari jaringan rahasia maupun tidak rahasia yang dapat mengganggu atau merusak jaringan informasi dan komunikasi. Serangan terhadap sistem informasi dan komunikasi juga dapat berbentuk serangan virus dan transmisi data dalam jumlah yang sangat besar secara simultan.



Kemajuan teknologi dan informasi telah menyebabkan berbagai sektor kehidupan menjadi terhubung dalam suatu ruang siber yang tercipta oleh jaringan, kabel, dan alamat *Internet Protocol* (IP) melalui komputer dan sarana lain.

2.12 Perubahan Iklim

Perubahan iklim global berpengaruh pada lingkungan kehidupan umat manusia. Perubahan ini telah memperlihatkan kecenderungan naiknya temperatur permukaan bumi, perubahan suhu air laut, perubahan ekosistem, naiknya permukaan air laut, perubahan musim yang tidak menentu, meningkatnya curah hujan, memperpanjang kekeringan, serta meningkatnya badai dan topan. Kecenderungan tersebut berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kebutuhan dasar umat manusia, terutama pangan, air, kesehatan, dan energi.

Perubahan iklim secara tidak langsung akan berpengaruh pada masalah keamanan. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar umat manusia akan menyebabkan terganggunya ketahanan, kemampuan beradaptasi dan kemampuan mengelola *stress* yang pada akhirnya akan menyebabkan kerawanan bila ditinjau dari aspek keamanan. Perubahan akan menyebabkan instabilitas politik, kekacauan perekonomian, krisis air, krisis pangan, munculnya berbagai penyakit pandemik, migrasi penduduk dan konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal.

Perubahan iklim secara tidak langsung akan berpengaruh pada masalah keamanan. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar umat manusia akan menyebabkan terganggunya ketahanan, kemampuan beradaptasi dan kemampuan mengelola stres.



Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap gempa tektonik maupun vulkanik.

2.13 Bencana Alam

Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana alam. Sebagai negara yang terletak pada tiga lempeng (*plate*) yang selalu bergerak dan pada posisi *Pacific Ring of Fire* yang memiliki gunung berapi yang aktif, sehingga rentan terhadap gempa tektonik maupun vulkanik.

Di Indonesia terdapat beberapa kategori bencana. Kategori tersebut dapat dibagi dua, yaitu bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam terdiri dari tsunami, gempa bumi, banjir, puting beliung, kekeringan, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan kebakaran hutan. Bencana sosial terdiri dari kerusuhan sosial, konflik sosial, pencemaran lingkungan hidup, dan kegagalan infrastruktur sosial. Kejadian gempa dan berbagai bencana alam lainnya yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan bahwa bencana alam dan bencana sosial merupakan tantangan dan risiko yang akan terus dihadapi dan perlu diantisipasi oleh bangsa Indonesia.

2.14 Keamanan Pangan, Air, dan Energi

Ketersediaan pangan dunia yang semakin berkurang, berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Kelangkaan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dunia, peningkatan kualitas hidup manusia, dan ketersediaan lahan yang semakin sempit, serta berkembangnya industri yang mengurangi lahan produktif. Diperkirakan penduduk dunia pada tahun 2050 mencapai 10 miliar sehingga memerlukan tambahan pangan sebesar 70% dibandingkan sekarang. Ke depan diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, dan perubahan iklim.



Diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, dan perubahan iklim.

Indonesia masih mengalami ketergantungan terhadap beberapa jenis pangan dari luar negeri. Berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat pertumbuhan dan kebutuhan penduduk yang pesat serta berkurangnya sumber daya manusia pengelola pertanian, merupakan faktor penting penyebab berkurangnya ketahanan pangan di Indonesia. Ketergantungan pangan Indonesia dari negara lain diprediksi masih dapat berkembang dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia.

Kebutuhan energi nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kebutuhan energi sejak tahun 2008 telah melampaui 1.000 BOE (*Barrel Oil Equivalent*), diprediksi kebutuhan energi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai kurang lebih 5.000 juta BOE. Pertumbuhan penduduk, laju perkembangan industri, serta semakin tingginya arus lalu lintas barang dan jasa, menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan energi. Dengan semakin berkurangnya sumber-sumber energi dan belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi, diperkirakan minyak dan gas bumi menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan. Diperkirakan pada tahun 2030 minyak sebagai sumber energi akan mengalami penurunan 36% dari total kebutuhan energi dunia. Cadangan energi Indonesia terutama energi fosil (minyak bumi, batu bara) juga semakin hari semakin menyusut. Kemajuan bidang ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan ketersediaan energi fosil semakin berkurang karena konsumsi energi per kapita akan semakin tinggi.



Diperkirakan pada tahun 2030 minyak sebagai sumber energi akan mengalami penurunan 36% dari total kebutuhan energi dunia. Cadangan energi Indonesia terutama energi fosil (minyak bumi, batu bara) juga semakin hari semakin menyusut.

Krisis air bersih menjadi fenomena yang disebabkan penangan lingkungan dan aset alam yang tidak terkendali. Salah urus lingkungan dan aset alam tersebut terjadi secara akumulatif dan terus-menerus karena Indonesia mengandalkan pemanfaatan SDA guna menopang perekonomian. Pengelolaan SDA yang tidak terkontrol menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan menipisnya ketersediaan sumber daya termasuk krisis air bersih, serta bencana ekologis. Krisis air bersih di Indonesia juga disebabkan oleh persediaan air yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Krisis pangan, air, dan energi berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik di suatu daerah ataupun negara maupun antarnegara. Isu ketiga sumber daya strategis tersebut bisa menjadi sumber konflik baru, terutama jika dunia gagal mengolah sumber-sumber yang ada sehingga mendorong terjadinya benturan kepentingan dan menyulut peperangan. Jumlah penduduk dunia yang kini mencapai 6,6 miliar jiwa dan terus bertambah, akan memberikan pengaruh pada tingkat kebutuhan pangan, energi, dan air.

Pengelolaan SDA yang tidak terkontrol menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan menipisnya ketersediaan sumber daya termasuk krisis air bersih, serta bencana ekologis.

2.15 Epidemi

Dunia masih menghadapi epidemi beberapa penyakit infeksi yang berbahaya pada manusia. Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) masih memberikan peringatan kepada dunia bahwa penyakit infeksi berbahaya bagi umat manusia masih belum sepenuhnya dapat diatasi, bahkan cenderung semakin meluas penyebarannya.

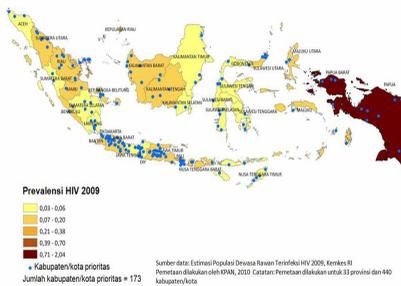


Setiap tahun hampir ditemukan satu hingga tiga variasi penyakit infeksi pada manusia atau penyakit lama yang muncul kembali. Ada kecenderungan bahwa penyakit infeksi pernapasan pada manusia bertambah dengan munculnya kasus-kasus baru pada populasi yang terindikasi di kawasan tertentu.

WHO telah mengumumkan sejumlah penyakit yang masih mengancam umat manusia, yaitu demam berdarah (*Dengue Fever*), *Tuberculosis* (TBC), *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS), penyakit sapi gila (*Mad Cow*) atau *Variant Creutzfeldt-Jakob Disease* (VCJD), *Avian Influenza* (H5N1) atau flu burung (*Bird Flu*), *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), flu babi (*Swine Flu/H1N1 flu virus*), *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), *Ebola*, dan *Avian Influenza* (H7N9) atau flu burung varian baru (*Bird Flu*). Secara geografis, kawasan Asia dan Afrika Sub-Sahara diidentifikasi oleh WHO sebagai wilayah yang rawan (*hot spot*) terhadap munculnya penyakit infeksi pernapasan yang berbahaya bagi manusia.

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan terbuka, menjadi akses lalu-lintas manusia maupun barang yang relatif tidak dapat dikontrol dan diawasi secara efektif. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kemungkinan ancaman penyebaran penyakit, baik karena faktor alami maupun karena adanya upaya yang direncanakan secara sistematis (perang biologi). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ancaman epidemi antara lain pertumbuhan penduduk yang cepat dengan diikuti mobilitas penduduk yang tinggi karena kemajuan teknologi transportasi, perubahan penggunaan lahan,

Google

Situasi Epidemi dan Penanggulangan HIV dan AIDS

Secara geografis, kawasan Asia dan Afrika Sub-Sahara diidentifikasi oleh WHO sebagai wilayah yang rawan (*hot spot*) terhadap munculnya penyakit infeksi pernapasan yang berbahaya bagi manusia.

kontak yang lebih besar antara manusia dan hewan, perjalanan dan perdagangan internasional yang pesat, infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang masih belum memadai, kesadaran akan kesehatan yang rendah, serta pengaruh tingkat kemiskinan.

2.16 Perkembangan Lingkungan dan Konteks Strategis Nasional

Ideologi.

Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali/dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur dari Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, serta dasar etika politik bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi acuan dan orientasi bangsa mengalami kemerosotan dalam implementasinya.

Aksi kekerasan masih terjadi di masyarakat, hilangnya nilai-nilai multikulturalitas, kebhinnekaan dan nilai keadilan. Kecenderungan menguatnya ego kedaerahan memperlihatkan indikasi kemerosotan nasionalisme. Kemerosotan nasionalisme memunculkan aktivitas kelompok-kelompok radikal, baik secara terbuka maupun tertutup di dalam lingkungan masyarakat. Berbagai peristiwa kekerasan, kerusuhan, dan konflik berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan menandakan bahwa sebagian masyarakat mulai mengalami kemerosotan nasionalisme.

Google



Kemerosotan nasionalisme memunculkan aktivitas kelompok-kelompok radikal, baik secara terbuka maupun tertutup di dalam lingkungan masyarakat. Berbagai peristiwa kekerasan, kerusuhan, dan konflik berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan.

Politik.

Kondisi politik nasional masih menghadapi sejumlah tantangan apabila ditinjau dari infrastruktur politik, suprastruktur politik, dan budaya politik. Pada tataran infrastruktur politik nasional, masih diwarnai dengan isu persoalan proses hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah korupsi yang menyandera partai politik. Persoalan hukum yang dihadapi oleh partai politik, sering dijadikan sebagai *bargaining* politik oleh lawan politik. Persoalan korupsi menyebabkan sebagian partai politik dinilai belum mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan politik bagi rakyat dan sebagai lembaga yang kredibel dalam menyiapkan kader pimpinan bagi masyarakat. Partai politik dinilai masih mengedepankan transaksional politik. Pada tataran suprastruktur politik, masih terdapat kendala untuk mengembangkan komunikasi, kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap konstitusi dan produk-produk turunannya, sehingga wacana untuk mengevaluasi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sering mengemuka.

Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini lebih bersifat pragmatis. Hal ini dapat dilihat dengan adanya indikasi penurunan moral dan etika berpolitik yang terjadi pada kalangan elit politik, sehingga struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Kondisi politik diwarnai oleh permasalahan sistem demokrasi yang belum berjalan dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Permasalahan yang banyak terjadi diantaranya ketidakpuasan publik terhadap hasil penghitungan suara pada pemilihan umum.



Permasalahan politik yang banyak terjadi diantaranya ketidakpuasan publik terhadap hasil penghitungan suara pada pemilihan umum.

Hasil hitung cepat (*quick count*) dalam penghitungan suara merupakan terobosan ilmiah yang telah teruji meski tidak selalu tepat dan dapat digunakan untuk mengawal *real count*. Namun lembaga-lembaga survey yang melakukan penghitungan yang seharusnya netral, ada yang berpihak sehingga hasil hitung cepat berseberangan dan akhirnya membingungkan masyarakat.

Masalah lain, terkait hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat karena adanya kecenderungan tindakan Kepala Daerah yang lebih mengutamakan kepentingan daerah dibanding kepentingan nasional. Masalah pemekaran wilayah juga masih mengemuka yang berpotensi timbulnya sengketa atas perbatasan wilayah dan akses ekonomi dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Persoalan pemekaran wilayah dan konflik kepentingan berpotensi terjadi dalam berbagai aksi kekerasan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional yang akan berpengaruh terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.

Ekonomi.

Perkembangan perekonomian dunia masih sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan perekonomian global membuat Indonesia harus mewaspadaai arah dan tren ekonomi global, serta diperlukan suatu kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur guna merespon peluang dan tantangan. Potensi instabilitas Laut Tiongkok Selatan, akan berimplikasi pada persoalan klaim sumber daya alam, pelayaran, ekonomi, hingga keamanan antarnegara di kawasan.



Persoalan kepentingan berpotensi terjadi dalam berbagai aksi kekerasan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional yang akan berpengaruh terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.



Potensi instabilitas Laut Tiongkok Selatan, akan berimplikasi pada persoalan klaim sumber daya alam, pelayaran, ekonomi, hingga keamanan antarnegara di kawasan.



Indonesia memiliki kepentingan nasional terkait dengan status perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berpotensi instabilitas. Kawasan Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia, yaitu Jepang dan Tiongkok, telah menciptakan kekhawatiran baru.

Indonesia memiliki kepentingan nasional terkait dengan status perairan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ada di kawasan perairan itu.

Dalam menghadapi potensi instabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia, yaitu Jepang dan Tiongkok, telah menciptakan kekhawatiran baru. Konflik terbuka antara kedua negara tersebut sangat dikhawatirkan akan terjadi karena dapat mengganggu kinerja ekonomi kawasan dan juga akan berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

Setelah mengalami pertumbuhan pesat beberapa tahun terakhir, sejumlah indikator menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang memasuki fase perlambatan yang perlu diantisipasi. Penurunan nilai tukar rupiah menjadi salah satu penyebab turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah yang cenderung tidak stabil menyebabkan biaya impor menjadi mahal. Dengan impor yang terkendala, kegairahan investasi dan konsumsi akan terganggu. Di sisi lain, dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih berpengaruh di berbagai wilayah.



Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak lebih baik dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya akan menurunkan nilai impor dan mempengaruhi iklim usaha terutama di sektor manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja.

Perekonomian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah telah menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak lebih baik dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya sesuai dengan kinerja perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut akan menurunkan nilai impor dan mempengaruhi iklim usaha terutama di sektor manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja.

Apabila tekanan ekonomi global tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan gejolak sosial yang dapat berkembang menjadi konflik sosial dan politik.

Sosial Budaya.

Kondisi sosial budaya bangsa Indonesia menghadapi tantangan terhadap pergeseran nilai. Globalisasi serta *euphoria* reformasi yang sarat dengan semangat perubahan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Perubahan yang mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan secara signifikan berpengaruh terhadap tatanan budaya.

Persaingan hidup antarmanusia yang berbeda atau sama kepentingannya, pada gilirannya mendorong kemajuan pengembangan Iptek. Produk-produk Iptek yang masuk dari luar membawa nilai-nilai tertentu yang secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, semakin terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Di tengah semakin kaburnya wujud dan bentuk ancaman yang berkembang dewasa ini, kerapuhan jiwa dan semangat kebangsaan merupakan potensi ancaman terbesar bagi keberlangsungan dan keutuhan bangsa. Degradasi pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika menghambat semangat dan kesadaran bela negara seluruh warga negara.

Google



Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, semakin terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Degradasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia telah mempengaruhi sifat nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air yang seharusnya berkobar dalam hati sanubari setiap warga negara Indonesia sebagai modal dasar dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.

Keamanan Dalam Negeri.

Gerakan separatis masih menjadi isu keamanan dalam negeri yang mengancam keutuhan wilayah NKRI dan merongrong kewibawaan pemerintah serta keselamatan masyarakat. Gerakan separatisme di Indonesia dilakukan dalam bentuk gerakan separatisme politik serta gerakan separatisme bersenjata yang walaupun masih dalam skala kecil, namun sering menyebabkan terjadinya gangguan keamanan. Hingga kini masih terdapat potensi gerakan separatisme di beberapa wilayah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Beberapa daerah di Indonesia yang pernah dilanda aksi separatisme masih memiliki residu yang berpotensi memunculkan kembali ide separatisme. Oleh karena itu, separatisme menjadi tantangan terhadap keutuhan wilayah NKRI. Gerakan separatisme akan menimbulkan gangguan keamanan di dalam negeri, tidak saja mengancam keamanan dan keselamatan negara tetapi juga terhadap keselamatan umum masyarakat.

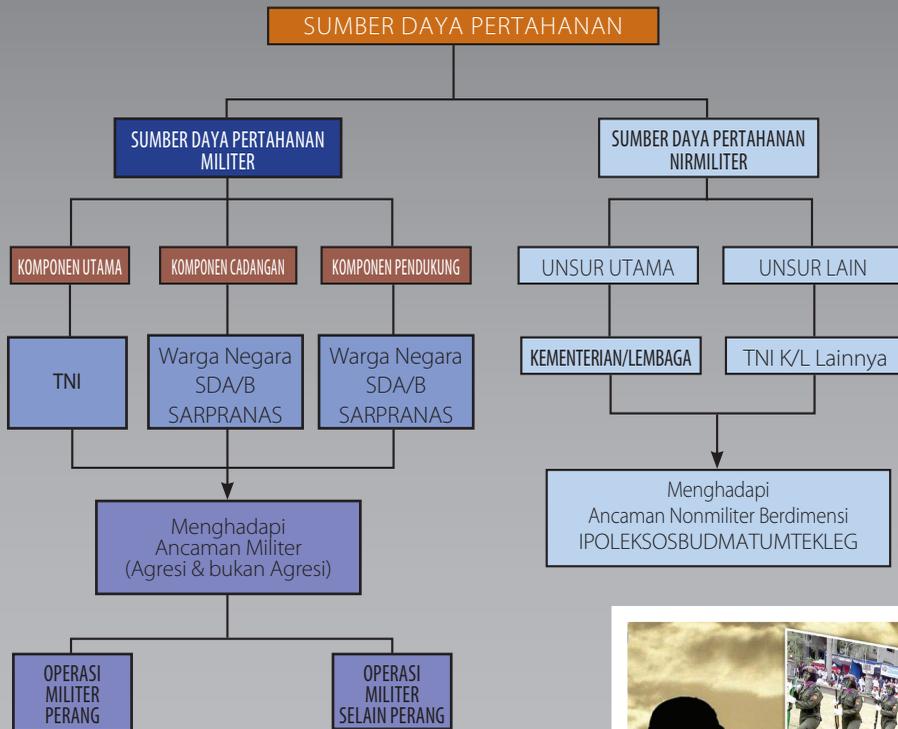
Gerakan separatisme di Indonesia dilakukan dalam bentuk gerakan separatisme politik serta gerakan separatisme bersenjata yang walaupun masih dalam skala kecil, namun sering menyebabkan terjadinya gangguan keamanan.

Penanganan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik horizontal. Konflik horizontal yang dipicu oleh berbagai ciri multikulturalitas masyarakat, keragaman suku bangsa, agama, etnis, golongan, dan kondisi sosial masih akan mewarnai konflik-konflik yang terjadi. Di Indonesia masih terdapat sejumlah daerah tertinggal dan sebagian besar diantaranya dikategorikan daerah rawan konflik. Konflik horizontal juga sering dipicu oleh berbagai hal, seperti sengketa lahan, pengusuran, tuntutan kenaikan upah kerja, dan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah.

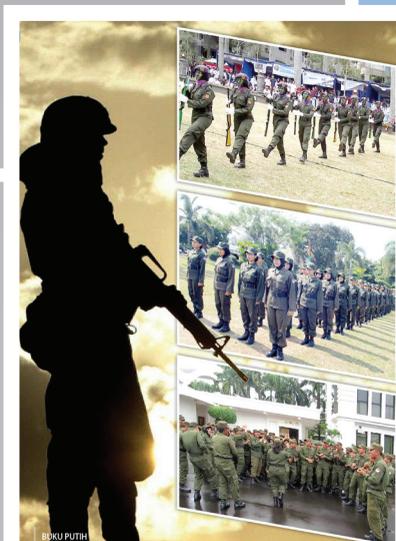


Konflik horizontal yang dipicu oleh berbagai ciri multikulturalitas masyarakat, keragaman suku bangsa, agama, etnis, golongan, dan kondisi sosial masih akan mewarnai konflik-konflik yang terjadi.

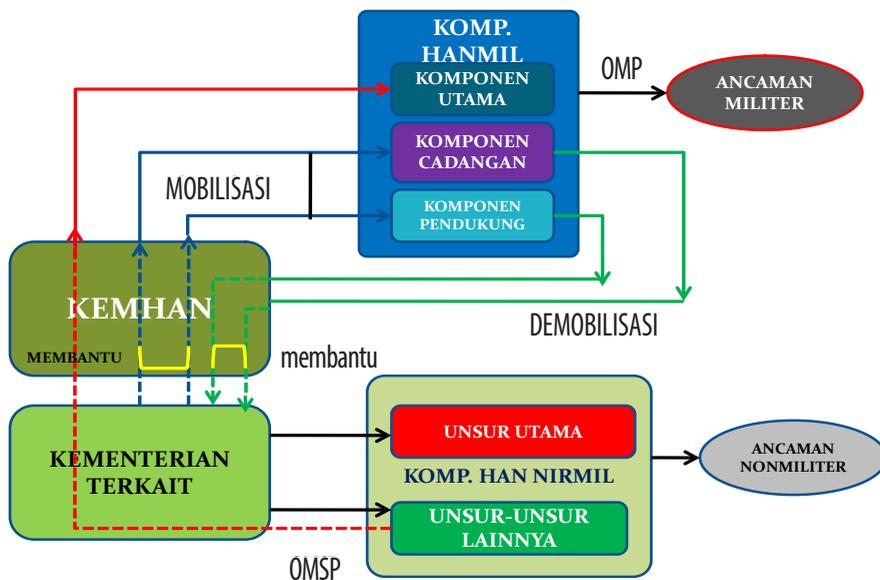




Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.



SKEMA PENGINTEGRASI KOMP.HAN MIL & HAN NIRMIL



KONSEPSI PERTAHANAN NEGARA

Bab 3

3.1 Umum

Pertahanan Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan terhadap tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Konsep pertahanan negara menjadi penuntun kepada setiap warga negara untuk dapat memahaminya sebagai wujud dari; pencapaian tujuan nasional; kepentingan nasional; hakikat pertahanan negara; sistem pertahanan negara; fungsi pertahanan negara; dan penggunaan komponen pertahanan negara.

3.2 Tujuan Nasional

Tujuan nasional, sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional memiliki tiga makna sebagai berikut:

Kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah memberi perlindungan fisik bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas, dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun.

Kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa, dengan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komponen bangsa yang akan mengembangkan dirinya sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan dengan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Dengan demikian, setiap daerah/komponen bangsa mampu mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya pada tataran pembangunan nasional.

Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai penciptaan lingkungan, dengan menetapkan bahwa lingkungan yang dimaksud bukan hanya meliputi lingkungan eksternal di luar wilayah Indonesia, melainkan juga meliputi lingkungan internal. Gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konflik antarnegara, tetapi juga dapat berasal dari konflik internal. Oleh sebab itu, kata kemerdekaan dalam hal ini berarti kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing dan kemerdekaan dari eksploitasi bangsa oleh pemerintah sendiri.

Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Pembukaan UUD 1945. Alenia IV)

Keadilan sosial juga harus diwujudkan pada semua elemen bangsa. Di samping itu, pengelolaan lingkungan pada dasarnya sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi setiap komponen bangsa.

3.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok. *Pertama*, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. *Ketiga*, sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen dan berlaku sepanjang masa. Makna kepentingan nasional yang bersifat permanen tersebut adalah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan setiap jengkal tanah air dikuasai atau diceraiberaikan oleh pihak manapun.

Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional.

Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional.

Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang sifatnya dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, diantaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antarmasyarakat.

3.4 Hakikat Pertahanan Negara

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai pilihan bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun suatu saat nanti Indonesia akan mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, tetapi model kesemestaan tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.



Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. (UU No 3. Pasal 2 Penjelasan)

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Sedangkan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

3.5 Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya nasional, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Sistem pertahanan semesta memadukan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta dibangun sejak masa damai sampai masa perang, sebagaimana kondisi nyata bahwa membangun pertahanan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan perang dapat terjadi setiap saat.

Perang rakyat semesta diselenggarakan berdasarkan tatanan unsur kekuatan, perwujudan usaha, dan sarana perjuangan.

Tatanan segenap unsur kekuatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah di bawah kesatuan komando dengan memadukan strategi pertahanan, sehingga merupakan satu totalitas perjuangan. Perwujudan usaha secara total meliputi perlawanan bersenjata yang berintikan lapis Pertahanan Militer dan didukung oleh perlawanan tidak bersenjata yang berintikan unsur Pertahanan Nirmiliter. Hal ini dilakukan untuk menghadapi setiap kekuatan asing yang menyerang dan menduduki sebagian atau seluruh wilayah Indonesia. Sarana perjuangan bangsa bertumpu pada kekuatan rakyat yang dipersenjatai secara psikis dengan ideologi Pancasila serta secara fisik dengan kemampuan bela negara yang tinggi.

Dipersenjatai secara psikis diwujudkan dalam usaha menanamkan kecintaan kepada tanah air dan NKRI, menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta melengkapi diri dengan lptek sebagai pengejawantahan dari sistem senjata sosial.

Dipersenjatai secara fisik diwujudkan ke dalam pemberian bekal keterampilan fisik, baik melalui wadah prajurit TNI maupun sebagai rakyat terlatih yang dipersiapkan untuk menjadi Komponen Cadangan, yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan menggunakan peralatan dan persenjataan militer serta menguasai taktik dan strategi bertempur sebagai pengejawantahan sistem senjata teknologi.



Sarana perjuangan bangsa bertumpu pada kekuatan rakyat yang dipersenjatai secara psikis dengan ideologi Pancasila serta secara fisik dengan kemampuan bela negara yang tinggi.

Selanjutnya sistem pertahanan dibangun dan dikembangkan untuk dapat menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah NKRI. Sistem pertahanan diperankan oleh TNI yang tangguh dan profesional, didukung oleh seluruh rakyat dalam sistem pertahanan semesta. Kemampuan yang berdaya tangkal tinggi akan menjamin stabilitas keamanan yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional.

Pada masa damai, penerapan Sistem Pertahanan Semesta dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam program pemerintah yang berlaku secara nasional. Pada masa perang, Sistem Pertahanan Negara memadukan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter dalam susunan Komponen Utama Pertahanan, yaitu TNI, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi. Mobilisasi ditentukan oleh kebijakan dan keputusan politik negara melalui pernyataan Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengerahkan dan menggunakan secara menyeluruh sumber daya nasional sebagai kekuatan pertahanan.

Komponen Cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Komponen Cadangan dibentuk dari sumber daya nasional yang dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama.

Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan dibentuk dari sumber daya nasional yang dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama.



Komponen Pendukung dikelompokkan dalam lima segmen Komponen Pendukung, yakni garda bangsa, tenaga ahli sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya, warga negara lainnya, industri nasional, sarana dan prasarana, serta sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan.

3.6 Fungsi Pertahanan Negara

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Fungsi penangkalan merupakan perwujudan usaha pertahanan dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Karakter penangkalan tidak bersifat pasif, tetapi aktif melakukan upaya pertahanan melalui usaha membangun dan membina kemampuan serta daya tangkal negara, baik secara militer maupun nirmiliter.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Kekuatan Utama pertahanan didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi.

Dalam menghadapi ancaman militer yang berasal dari luar, penyelenggaraan fungsi penindakan disesuaikan dengan bentuk ancaman untuk menentukan jenis tindakan yang diambil serta kekuatan pertahanan yang digunakan. Ancaman militer berupa agresi dihadapi dengan pendekatan perang, dan bagi Indonesia penyelenggaraan perang dilaksanakan secara total dalam wujud perang semesta. Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan K/L pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama, didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Penindakan terhadap ancaman nonmiliter dilakukan dengan pendekatan fungsional oleh K/L di luar bidang pertahanan berdasarkan jenis dan sifat ancaman. Fungsi penindakan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah penyelamatan dengan mengerahkan segala kemampuan bangsa. Bentuk-bentuk penindakan terhadap ancaman yang bersumber dari dalam negeri disesuaikan dengan jenis ancaman dan tingkat risiko yang ditimbulkan, serta dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam negara demokrasi.

Fungsi pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara militer dan nonmiliter untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan atau serangan separatis, konflik vertikal atau konflik horizontal, huru-hara, serangan teroris, bencana alam atau akibat ancaman nonmiliter. TNI bersama dengan instansi pemerintah lainnya serta masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud pertahanan semesta yang utuh.

Fungsi pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara militer dan nonmiliter untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan.

3.7 Penggunaan Kekuatan Pertahanan

Dalam hubungan antarnegara akan selalu terjadi kondisi pasang surut yang berkembang dalam suatu spektrum di antara kondisi damai dan perang. Konflik merupakan kondisi terganggunya hubungan antarnegara yang berkembang dalam spektrum paling rendah hingga perang terbuka.

Ketika pelaksanaan Operasi Militer Perang (OMP) tidak berhasil, maka untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI dilakukan perang berlarut yang pada hakikatnya adalah kelanjutan upaya pertahanan negara. Perang berlarut merupakan pengejawantahan dari prinsip bangsa Indonesia yang pantang menyerah dan rela berkorban dalam menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara, serta wujud komitmen dalam membela harkat dan martabat bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Perang berlarut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh bangsa Indonesia, baik militer maupun nirmiliter yang diletakkan di atas kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pertahanan negara.

Pemahaman terhadap spektrum konflik menjadi dasar dalam pencegahan, pengelolaan, pelibatan kekuatan pertahanan termasuk keikutsertaan dalam tugas-tugas perdamaian dan bantuan kemanusiaan serta bantuan kemampuan pertahanan negara pada kementerian atau otoritas sipil lainnya. Pelibatan fungsi Pertahanan Militer dan fungsi Pertahanan Nirmiliter diselenggarakan sejak kondisi keamanan nasional dalam keadaan damai hingga keadaan perang. Dalam kondisi damai pelibatan fungsi Pertahanan Militer ditekankan pada efektifitas penangkalan, yakni untuk mencegah setiap ancaman baik dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri dengan membangun kekuatan yang memiliki *deterrence effect*.



Dalam kondisi damai pelibatan fungsi Pertahanan Militer ditekankan pada efektifitas penangkalan, yakni untuk mencegah setiap ancaman baik dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri dengan membangun kekuatan yang memiliki *deterrence effect*.

Dalam rentangan kondisi keamanan nasional dengan spektrum konflik intensitas rendah fungsi Pertahanan Militer yakni TNI dilibatkan untuk menyelenggarakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penanganan dalam bentuk OMSP berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam mengatasi ancaman yang bersifat sosial seperti penanggulangan bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue/SAR*), keterlibatan TNI untuk mencapai kecepatan bertindak dilakukan sambil menunggu kebijakan dan keputusan politik negara.

Dalam persoalan daerah yang mengarah terhadap kerusuhan yang lebih besar, pimpinan daerah dapat meminta langsung kepada TNI sebagai Komponen Utama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam spektrum konflik ketika kondisi keamanan negara berada pada level yang kritis, pemerintah memberlakukan keadaan darurat, mulai dari darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang. Pelibatan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung untuk memperbesar kekuatan Komponen Utama dalam menghadapi kondisi perang dapat dilakukan dengan mobilisasi.

Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang di samping menjalankan fungsi pertahanan negara berdasarkan keputusan politik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TNI dapat mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah tempat diberlakukannya keadaan darurat militer atau daerah yang dinyatakan sebagai keadaan perang.

Pelibatan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung untuk memperbesar kekuatan Komponen Utama dalam menghadapi kondisi perang dapat dilakukan dengan mobilisasi.



Pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif, tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam, Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

Bab 4

4.1 Umum

Kebijakan dan strategi pertahanan negara dirumuskan melalui beberapa pertimbangan yang mendasar. Penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan negara dirumuskan sesuai dengan paham dan pandangan bangsa Indonesia secara proporsional, seimbang, dan terkoordinasi. Strategi pertahanan negara merumuskan tujuan, sasaran strategis, sumber daya pertahanan, serta cara yang digunakan untuk terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi.

4.2 Kebijakan Pertahanan Negara

Kebijakan pertahanan negara diimplementasikan melalui segala kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara untuk mengoptimalkan kemampuan guna menanggulangi berbagai ancaman. **Kebijakan pertahanan negara mencakup pembangunan, pengerahan, maupun pemberdayaan pertahanan negara yang didukung kebijakan penganggaran dan pengawasan.** Pelaksanaannya secara terpadu dan terarah bagi segenap komponen pertahanan negara, baik Pertahanan Militer maupun Pertahanan Nirmiliter.

Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

Fungsi dan peranan militer memiliki dua dimensi yakni fungsi dan peranan untuk melakukan OMP dan OMSP. Sedangkan Pertahanan Nirmiliter memiliki dua fungsi, *Pertama* fungsi pertahanan sebagai usaha untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman nonmiliter. *Kedua*, fungsi sesuai tugas pokok dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pertahanan Militer dibangun berdasarkan perkembangan iptek. Pesatnya teknologi informasi yang berdampak pada kemungkinan adanya ancaman dunia maya, Pertahanan Militer dikembangkan untuk memiliki pertahanan siber (*cyber defence*). Sedangkan pesawat tanpa awak dan satelit dibangun untuk dapat digunakan dalam menjaga dan melindungi perbatasan. Pertahanan Militer dibangun dan dikembangkan berdasarkan Postur Pertahanan Militer yang bertumpu pada TNI sebagai Komponen Utama (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi. Komponen-komponen tersebut dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer.

Angkatan Darat diarahkan untuk mampu mengatasi dan memanfaatkan kondisi medan maupun topografis yang beragam, melakukan pergerakan cepat antarwilayah dan antarpulau dalam menanggulangi setiap ancaman. Angkatan Laut diarahkan untuk membangun kemampuan dalam mengamankan luasnya wilayah Laut Nusantara di permukaan dan kedalaman serta memberikan dukungan dan kompatibilitas terhadap pergerakan matra darat dan udara.



Angkatan Darat diarahkan untuk mampu mengatasi dan memanfaatkan kondisi medan maupun topografis yang beragam, melakukan pergerakan cepat antarwilayah dan antarpulau dalam menanggulangi setiap ancaman.



Angkatan laut di bangun untuk menyampaikan luasnya wilayah laut nusantara di permukaan dan kedalaman.

Angkatan Udara diarahkan untuk dapat mengawasi terutama ruang udara nasional dan sebagian ruang udara regional, mampu melakukan penjagaan ruang udara nasional, mampu memanfaatkan ruang angkasa, dan memberikan dukungan operasi bersama antarmatra.

Pembentukan Komponen Cadangan dari sumber daya nasional diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Pelaksanaannya disusun secara terencana, bertahap, dan proporsional yang dikembangkan dan disiagakan di tiap daerah sesuai kebutuhan setiap matra. Komponen Cadangan akan mempunyai kekuatan ganda yang dapat memperbesar dan memperkuat Komponen Utama dalam penyelenggaraan Pertahanan Militer dan sekaligus dapat memperkuat Pertahanan Nirmiliter sebagai Unsur Lain. Pada masa datang kualitas Komponen Cadangan akan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan kualitas dari Komponen Utama, namun dari aspek kuantitas akan lebih besar dari Komponen Utama dan lebih sedikit jumlah personelnya dari Komponen Pendukung dalam satu kerangka piramida kekuatan pada Sistem Pertahanan Semesta.

Pembentukan Komponen Pendukung dengan memanfaatkan kondisi sumber daya alam dan buatan, sinkronisasi pembangunan sarana, prasarana nasional terhadap kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara, komponen bela negara masyarakat, dukungan mutualisme industri strategis pertahanan negara baik secara langsung maupun kemampuan konversi industri, serta keberlanjutan pembiayaan pertahanan negara melalui pengelolaan keuangan negara.

Google



Angkatan Udara dibangun untuk dapat mengawasi terutama ruang udara nasional dan sebagian ruang udara regional, mampu melakukan penjagaan ruang udara nasional, mampu memanfaatkan ruang angkasa, dan memberikan dukungan operasi bersama antarmatra.

Pertahanan Nirmiliter merupakan komponen pertahanan negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menangkal ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan, ancaman yang berdimensi legislasi. Fungsi Pertahanan Nirmiliter ini dilaksanakan oleh K/L di luar bidang pertahanan maupun masyarakat sipil dengan kapabilitas profesi, pengetahuan, dan keahlian mereka sebagai bentuk perwujudan Sistem Pertahanan Semesta yang esensinya adalah keikutsertaan segenap warga negara dalam pertahanan negara.

Pertahanan Nirmiliter merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Lapis Pertahanan Nirmiliter tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan, yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi.

Inti Pertahanan Nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh Lapis Pertahanan Militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Pertahanan Nirmiliter merupakan komponen pertahanan negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menangkal ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman yang berdimensi legislasi.

4.3 Strategi Pertahanan Negara

Guna menyelenggarakan pertahanan negara secara optimal, maka diperlukan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi pertahanan negara dirumuskan dalam tiga substansi dasar strategi pertahanan, yang meliputi “apa yang dipertahankan” (*ends*), “dengan apa mempertahankan” (*means*), serta “bagaimana mempertahankan” (*ways*).

Ends adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan segenap bangsa yang dijabarkan menjadi empat sasaran strategis. *Means* adalah sumber daya nasional yang digunakan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni mengerahkan Pertahanan Militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Pertahanan Nirmiliter. Sedangkan *ways* adalah bagaimana menggunakan sumber daya nasional untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dipertahankan, yakni dengan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang.

4.3.1 Tujuan Pertahanan Negara dan Sasaran Strategis

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.

Google



Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat sasaran strategis yang saling terkait. *Pertama*, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer. *Kedua*, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter. *Ketiga*, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional. *Keempat*, terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri.

4.3.2 Sumber Daya Pertahanan

Strategi Pertahanan Negara diimplementasikan dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional. Untuk mendukung implementasi Strategi Pertahanan Negara, seluruh sumber daya nasional dikerahkan setelah melalui suatu proses transformasi untuk mengubah potensi sumber daya nasional yang menjadi elemen-elemen kekuatan nasional (*elements of national power*). Elemen-elemen kekuatan nasional terdiri dari beberapa unsur. *Pertama*, kekuatan militer (*military power*) yang terdiri dari elemen kekuatan darat (*land power*), elemen kekuatan laut (*sea power*), dan elemen kekuatan udara (*air power*), yang diperkuat dengan kekuatan cadangan dan pendukung. *Kedua*, kekuatan nirmiliter (*non-military power*) meliputi kekuatan ideologi, politik dalam negeri dan diplomasi, ekonomi dan keuangan, sosial budaya, teknologi, psikologi, informasi, geografi, demografi, dan sumberdaya alam.



Implementasi Strategi Pertahanan Negara, seluruh sumber daya nasional dikerahkan setelah melalui suatu proses transformasi untuk mengubah potensi sumber daya nasional yang menjadi elemen-elemen kekuatan nasional (*elements of national power*)

Kekuatan darat (*land power*) merupakan totalitas dan sinergitas kemampuan dan kekuatan nasional riil di darat. Kekuatan darat meliputi kekuatan angkatan darat, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, mobilisasi, teknologi, industri nasional, wilayah darat, sumber daya alam, dan masyarakat yang dapat dikerahkan untuk mempengaruhi pertempuran di darat. Kekuatan darat diproyeksikan untuk mengontrol penggunaan wilayah darat demi kepentingan OMP dan OMSP. Kekuatan darat tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan laut dan kekuatan udara.

Kekuatan laut (*sea power*) merupakan totalitas dan sinergitas kemampuan dan kekuatan nasional riil di laut. Kekuatan laut meliputi kekuatan angkatan laut, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, mobilisasi, teknologi, industri nasional, wilayah laut, sumber daya alam, dan masyarakat maritim yang dapat dikerahkan untuk mempengaruhi pertempuran di laut. Kekuatan laut diproyeksikan untuk mengontrol penggunaan wilayah laut (*sea control*) demi kepentingan OMP dan OMSP. Kekuatan laut juga dikerahkan untuk mengontrol perdagangan dan perniagaan di laut, serta untuk kepentingan penangkalan (*deterrence*), penolakan di laut (*sea denial*), diplomasi pertahanan (*defence diplomacy*), dan memberikan pengaruh politik dalam masa damai. Kekuatan laut dapat dikerahkan untuk membantu mempengaruhi pertempuran di darat dan di udara. Kekuatan laut tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan darat dan kekuatan udara.



Kekuatan darat meliputi kekuatan angkatan darat, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, mobilisasi, teknologi, industri nasional, wilayah darat, sumber daya alam, dan masyarakat yang dapat dikerahkan untuk mempengaruhi pertempuran di darat.



Kekuatan laut meliputi kekuatan angkatan laut, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, mobilisasi, teknologi, industri nasional, wilayah laut, sumber daya alam, dan masyarakat maritim yang dapat dikerahkan untuk mempengaruhi pertempuran di laut.



Kekuatan udara meliputi kekuatan angkatan udara, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, mobilisasi, teknologi, industri nasional, wilayah udara nasional, dan masyarakat dirgantara yang dapat dikerahkan untuk mempengaruhi pertempuran udara.

Kekuatan udara (*air power*) merupakan totalitas dan sinergitas kemampuan dan kekuatan nasional riil di udara. Kekuatan udara meliputi kekuatan angkatan udara, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, mobilisasi, teknologi, industri nasional, wilayah udara nasional, dan masyarakat dirgantara yang dapat dikerahkan untuk mempengaruhi pertempuran di udara. Kekuatan udara diproyeksikan untuk menguasai wilayah udara dalam rangka kepentingan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Kekuatan udara dikerahkan untuk membantu mempengaruhi pertempuran di darat dan di laut melalui keunggulan di udara (*air supremacy*). Kekuatan udara tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan darat dan kekuatan laut. Kekuatan udara digunakan juga untuk mendukung strategi penolakan (*deterrence*) dan diplomasi pertahanan (*defence diplomacy*).

Elemen-elemen kekuatan nasional dikerahkan secara bersinergi dan dikelompokkan untuk mendukung upaya pertahanan negara. Potensi sumber daya nasional yang ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan digunakan untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

4.3.3 Cara Mencapai Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif, menyusun pertahanan berlapis, memberdayakan Industri Pertahanan, dan meningkatkan kerja sama internasional.

4.3.3.1 Mempersiapkan Pertahanan yang Bersifat Semesta

Pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Upaya pertahanan negara tersebut didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, keyakinan pada kekuatan sendiri, kegotong-royongan, pantang menyerah, kemampuan untuk bekerja sama (*interoperability*), keterpaduan, totalitas, dan kebersamaan. Sifat kesemestaan dimanifestasikan dalam kesatuan cara berpikir dan cara bertindak warga negara untuk terlibat dalam usaha-usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara ditujukan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pertahanan bersifat semesta dilaksanakan dengan melibatkan Pertahanan Militer dan nirmiliter secara sinergi, terintegrasi, dan terkoordinasi untuk menghadapi setiap bentuk ancaman.

Pertahanan bersifat semesta diimplementasikan secara dinamis sesuai dengan hakikat ancaman yang tidak lagi didominasi ancaman militer, tetapi juga nonmiliter. Dimensi ancaman mudah berkembang dari satu dimensi ke dimensi lain secara simultan, kompleks, sulit diprediksi, dan mudah berubah, yang harus dihadapi oleh semua elemen kekuatan nasional.

Sifat kesemestaan merupakan konsekuensi dari upaya mempertahankan dan melindungi keselamatan negara dan bangsa. Seluruh bangsa Indonesia harus memandang serangan dari negara lain sebagai tantangan terhadap seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Google



Pertahanan bersifat semesta diimplementasikan secara dinamis sesuai dengan hakikat ancaman yang tidak lagi didominasi ancaman militer, tetapi juga nonmiliter.

Kesengsaraan dan kehancuran suatu negara akibat perang tidak hanya berakibat pada militer semata, rakyat juga akan merasakan akibat yang ditimbulkan. Peran rakyat sangat penting untuk menentukan kekuatan, kemampuan, semangat atau moral angkatan perang. Sebaliknya militer juga harus dapat melindungi rakyat dari segenap bentuk kesengsaraan dan kehancuran.

Kemanunggalan TNI dan rakyat merupakan modal penting dalam upaya pertahanan negara yang bersifat semesta. Dalam pertahanan yang bersifat semesta, upaya pertahanan negara diselenggarakan dengan mengerahkan kekuatan Pertahanan Militer dan kekuatan Pertahanan Nirmiliter secara bersinergi. Kekuatan Pertahanan Militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Komponen tersebut dipersiapkan secara dini dan dimobilisasi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ditujukan untuk memperkuat Komponen Utama. Kekuatan Pertahanan Nirmiliter menempatkan Kementerian dan Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama didukung oleh Unsur-unsur Lain dari kekuatan bangsa. Pada hakikatnya Pertahanan Nirmiliter merupakan perwujudan kekuatan rakyat yang telah dilembagakan sesuai peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, sinergitas antara kekuatan Pertahanan Militer dan kekuatan Pertahanan Nirmiliter, dijiwai oleh semangat kemanunggalan TNI dan rakyat.



Kemanunggalan TNI dan Rakyat merupakan modal penting dalam upaya pertahanan negara yang bersifat semesta.

4.3.3.2 Mempersiapkan Pertahanan Defensif Aktif

Pertahanan defensif aktif merupakan pertahanan yang bersifat tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Pertahanan defensif aktif diwujudkan dengan mengedepankan diplomasi sebagai lini pertahanan negara. Perang harus dapat dicegah dengan pendekatan politik persuasif dengan mengintensifkan usaha-usaha diplomatik. Dalam sistem pertahanan, diplomasi dikembangkan secara efektif untuk mencegah niat negara lain menyerang Indonesia atau mengancam kepentingan nasional Indonesia.

Usaha diplomasi berintikan peran Pertahanan Nirmiliter yang dilakukan melalui pendekatan politik dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter lainnya dikerahkan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami kegagalan. Keberhasilan usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi strategis yang diperankan oleh unsur-unsur Pertahanan Nirmiliter.

Pertahanan defensif aktif dalam menghadapi ancaman nonmiliter oleh K/L di luar bidang pertahanan dilakukan melalui penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan. Proses penyiapan wilayah negara sebagai medan pertahanan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, antarlembaga dan instansi, yang diwujudkan melalui penataan kawasan ruang pertahanan. Selain hal tersebut, K/L juga menyiapkan dukungan logistik pertahanan secara dini dan terpadu dengan pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan.

Dalam sistem pertahanan, diplomasi dikembangkan secara efektif untuk mencegah niat negara lain menyerang Indonesia atau mengancam kepentingan nasional Indonesia.



Pertahanan defensif aktif diwujudkan dengan membangun kemitraan global. Kompleksitas hubungan internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik, bagi Indonesia sangat penting untuk mengedepankan semangat kebersamaan antarnegara.

Pertahanan defensif aktif diwujudkan dengan membangun kemitraan global. Kompleksitas hubungan internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik, bagi Indonesia sangat penting untuk mengedepankan semangat kebersamaan antarnegara. Indonesia berada pada posisi untuk mendorong tercapainya stabilitas, keamanan, dan kemakmuran bersama. Hal tersebut dilakukan atas dasar keyakinan bahwa kemajuan sebuah negara bukannya ancaman bagi negara lain, melainkan merupakan peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan.

Pertahanan defensif aktif dilakukan oleh Indonesia yang senantiasa bekerja sama dengan negara-negara lain dalam usaha untuk mencegah dan mengatasi konflik di berbagai kawasan. Keberadaan Indonesia merupakan peran penting sebagai mitra strategis masyarakat internasional dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas global. Tugas untuk menjaga perdamaian dunia diemban oleh TNI melalui pembentukan pasukan pemelihara perdamaian maupun pengamat perdamaian.

4.3.3.3 Menyusun Pertahanan Berlapis

Pertahanan berlapis dilaksanakan secara komprehensif, integral, dan holistik untuk mampu menghadapi dinamika pola ancaman yang luas dan lengkap, serta tidak terpisahkan satu sama lain dalam satu sistem yang dinamis.

Karakteristik ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa, sangat sulit diprediksi.

Tantangan yang cenderung asimetris pada semua aspek kehidupan dapat datang dari dalam dan luar negeri atau secara simultan. Oleh karena itu, pertahanan negara dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang dinamis dan nonlinier. Strategi pertahanan berlapis diimplementasikan dan dikembangkan untuk menangkal, mengatasi, dan menanggulangi tantangan di bidang militer dan nonmiliter, serta melaksanakan perang berlarut.

Strategi pertahanan negara diimplementasikan dalam strategi pertahanan berlapis yang menyinergikan Pertahanan Militer dengan Pertahanan Nirmiliter. Hal ini merupakan implementasi dari pertahanan bersifat defensif aktif dan semesta yang bertumpu pada upaya pertahanan negara secara terpadu sebagai satu kesatuan pertahanan negara secara utuh dan saling mendukung. Keterpaduan tersebut diharapkan menghasilkan daya tangkal yang tangguh dalam mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman.

Penangkalan

Penangkalan merupakan strategi pertahanan negara yang paling fundamental. Penangkalan yang handal dapat mencegah terjadinya perang sehingga perlu terus dibangun dan dikembangkan. Tidak ada negara yang menghendaki terjadinya perang karena akan mendatangkan malapetaka bagi umat manusia, sehingga setiap negara akan berusaha sekuat tenaga mencegah terjadinya perang. Penangkalan merupakan pilihan dalam upaya pertahanan, sehingga daya tangkal harus dibangun dan dikembangkan sejak dini serta dilaksanakan secara berkesinambungan.

Google



Tidak ada negara yang menghendaki terjadinya perang karena akan mendatangkan malapetaka bagi umat manusia, sehingga setiap negara akan berusaha sekuat tenaga mencegah terjadinya perang.

Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam Komponen Utama serta Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Pertahanan nirmiliter merupakan fungsi Kementerian/Lembaga diluar bidang pertahanan yang tersusun dari unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa.

Pada masa damai, pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa dan negara yang tangguh. Strategi pertahanan berlapis dalam kerangka penangkalan, diwujudkan melalui pemberdayaan segenap sumber daya nasional secara maksimal, baik Pertahanan Militer maupun Pertahanan Nirmiliter sebagai satu kesatuan penangkalan.

Pertahanan Militer dibentuk dan dibangun sebagai kekuatan dalam bentuk kualitas SDM yang memiliki kompetensi tinggi, profesional serta didukung kekuatan Alutsista yang modern guna mencapai standar penangkalan.

Pertahanan Nirmiliter dalam kerangka penangkalan dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan teknologi. Pemberdayaan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter pada masa damai, selain untuk tujuan penangkalan, juga diarahkan untuk memberikan efek stabilitas yang memungkinkan pembangunan nasional dapat terselenggara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Strategi pertahanan berlapis dalam kerangka penangkalan diwujudkan melalui pemberdayaan segenap sumber daya nasional. Seluruh sumber daya dikembangkan secara maksimal sebagai satu kesatuan penangkalan, dengan mengerahkan seluruh elemen kekuatan negara yang saling mendukung dan saling memperkuat.

Keberhasilan penangkalan dikembangkan melalui strategi penangkalan dengan cara penolakan atau strategi penangkalan dengan cara pembalasan. Keberhasilan tersebut dapat terlihat secara nyata, apabila pihak yang berkeinginan menyerang akan mengurungkan niatnya.

Penangkalan dengan Cara Penolakan

Penangkalan dengan cara penolakan pada dasarnya merupakan daya tangkal yang dihasilkan oleh kekuatan pertahanan yang memiliki efek cegah tangkal sehingga pihak lawan membatalkan niatnya untuk menyerang. Kekuatan pertahanan negara dibangun untuk memiliki kemampuan penangkalan dengan cara penolakan. Pola pendekatan yang digunakan melalui pengembangan kemampuan pertahanan integratif dalam sistem pertahanan semesta yang dibangun secara ideal.

Pertahanan Militer untuk penangkalan dengan cara penolakan diwujudkan dengan membangun kekuatan Pertahanan Militer yang ideal berbasis Alutsista yang modern. Pertahanan Nirmiliter untuk penangkalan dengan cara penolakan diwujudkan dengan meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang berkelanjutan khususnya di sektor pendidikan, ekonomi, dan industri.

Penangkalan dengan Cara Pembalasan

Penangkalan dengan cara pembalasan ditujukan agar kekuatan pertahanan negara memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan tindakan balas terhadap lawan yang menduduki wilayah Indonesia. Selanjutnya untuk mempertahankan eksistensi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI setelah semua usaha pertahanan mengalami kegagalan, dilaksanakan dengan cara perang berlarut.

Pertahanan Militer untuk penangkalan dengan cara pembalasan diwujudkan dengan mempersiapkan kemampuan gerilya modern, militan serta didukung oleh rakyat dan teknologi pertahanan untuk melakukan perang berlarut.



Pertahanan Nirmiliter untuk penangkalan dengan cara pembalasan diwujudkan dengan menempatkan K/L di luar bidang pertahanan untuk menyiapkan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya secara dini sesuai tugas dan fungsinya.

Instrumen Penangkalan

Instrumen Ideologi.

Pancasila merupakan instrumen ideologi yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakteristik masyarakat Indonesia yang multietnis, ras, agama, bahasa, aliran, budaya, dan kepentingan memerlukan ideologi yang bersifat terbuka dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat guna keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Penetrasi ancaman terhadap ideologi baik berasal dari dalam maupun luar negeri dapat berakibat terganggunya berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berimplikasi terhadap eksistensi kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu, penjamin stabilitas, dan keberlangsungan bangsa direvitalisasi guna menata sendi-sendi dasar penyelenggaraan negara. Kekuatan ideologi negara diarahkan untuk membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui penjabaran nilai-nilai intrinsik menjadi nilai-nilai praksis.

Google



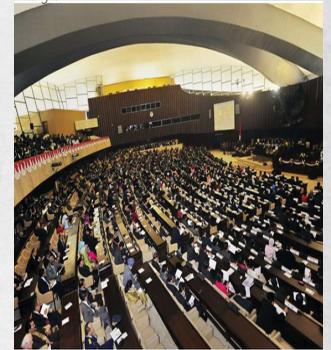
Instrumen Politik.

Instrumen Politik merupakan bagian penting dari kekuatan Pertahanan Nirmiliter dalam upaya pertahanan negara. Upaya politik sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik antarnegara. Instrumen politik menghasilkan kekuatan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara.

Padatataran internasional, penangkalan dilaksanakan melalui diplomasi yang efektif. Diplomasi yang efektif dilaksanakan dengan beberapa cara. Pertama, membentuk pemerintahan sipil yang sah, bersih, dan berwibawa, yang mampu mengelola pemerintahan secara efektif, demokratis, dan bertanggung jawab, serta kredibilitasnya diakui masyarakat internasional. Kedua, mewujudkan sistem pembangunan nasional yang berkembang secara dinamis dengan hasil-hasil pembangunan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketiga, menjaga stabilitas nasional yang kokoh di segala bidang dan ditopang oleh kinerja penegakan hukum yang memadai. Keempat, mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, kuat dan disegani, baik di kawasan regional maupun internasional. Kelima, meningkatkan kualitas para pelaku fungsi diplomasi yang kredibel dan memiliki reputasi internasional.

Penangkalan dari aspek politik dilaksanakan dengan mempromosikan stabilitas keamanan regional dan perdamaian dunia. Setiap potensi konflik di kawasan yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dicegah melalui serangkaian kebijakan politik luar negeri yang mengedepankan upaya perwujudan kesadaran setiap negara untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain.

Google



Hubungan baik antarnegara dijalin dengan prinsip dasar saling menghormati dan menghargai untuk menciptakan kawasan yang aman, stabil, dan makmur melalui arsitektur keamanan kawasan yang disepakati. Arsitektur kawasan tersebut harus terbuka, berbasis dialog, menghormati keberagaman, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Penangkalan aspek politik dilaksanakan dengan memperkuat dan mengembangkan diplomasi pertahanan yang mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Diplomasi pertahanan dilaksanakan melalui kerja sama militer dengan angkatan bersenjata negara-negara sahabat dalam bidang pendidikan, latihan bersama, pertukaran personel, dan kegiatan kunjungan dalam rangka mewujudkan CBMs.

Instrumen Ekonomi.

Instrumen ekonomi merupakan pilar negara dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa yang mencakup pengelolaan sumber daya nasional, industri, moneter, fiskal, dan perdagangan. Dalam kerangka pertahanan negara, instrumen ekonomi diberdayakan melalui optimalisasi peran lembaga/institusi dan pelaku ekonomi guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan daya tangkal perekonomian nasional yang tangguh.

Ketahanan ekonomi nasional yang kuat akan mendukung kebijakan ekonomi bidang pertahanan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara perlu didukung oleh kekuatan dan kebijakan ekonomi nasional.

Google



Stabilitas pertumbuhan ekonomi makro nasional dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan sumber kekuatan ekonomi nasional untuk menunjang pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Untuk menghadapi tantangan ekonomi di era perdagangan bebas, diwujudkan dengan mengakselerasi pembangunan perekonomian yang memiliki daya saing, infrastruktur ekonomi yang mendukung, dan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi berbasis pada pilar ekonomi kerakyatan. Lapis Pertahanan Militer dalam menghadapi tantangan di bidang ekonomi mengembangkan pilihan strategis untuk membantu Unsur Utama Pertahanan Nirmiliter.

Instrumen Sosial Budaya.

Instrumen sosial budaya merupakan salah satu pilar utama penopang negara guna menghadapi tantangan di bidang sosial budaya. Instrumen sosial budaya dibangun dan dikembangkan agar memiliki kemampuan daya tangkal terhadap tantangan di bidang nonmiliter. Kemampuan daya tangkal instrumen sosial budaya diarahkan untuk mengatasi permasalahan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Upaya yang ditempuh melalui peningkatan SDM dengan cara peningkatan kualitas pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan penegakan hukum, dan kepemimpinan yang dapat diteladani dalam rangka membentuk karakter bangsa.

Pengaruh globalisasi menimbulkan berbagai masalah terhadap eksistensi kebudayaan, antara lain terjadinya penurunan rasa cinta kebudayaan, erosi nilai-nilai budaya, akulturasi budaya, dan klaim budaya oleh negara lain.

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (pasal 32 ayat 1 UUD 1945)

Google



Penangkalan terhadap eksistensi kebudayaan dilakukan dengan mematenkan, mempertunjukkan kesenian budaya lokal di forum internasional, dan menanamkan sendi-sendi kebudayaan di dalam kehidupan bangsa.

Instrumen Teknologi.

Instrumen teknologi merupakan salah satu pilar utama penopang negara guna menghadapi tantangan di bidang teknologi. Perwujudan daya tangkal bangsa dalam bidang teknologi dilakukan untuk memiliki penguasaan teknologi dan kemandirian industri pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemandirian industri pertahanan diwujudkan secara bertahap melalui kerja sama antara pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri.

Daya tangkal di bidang teknologi dilakukan dengan membangun SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mendukung tercapainya kemajuan teknologi alat-peralatan pertahanan sesuai perkembangan zaman. Penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan daya tangkal bangsa dapat diperoleh juga melalui industri manufaktur (Penanaman Modal Asing/PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN), dengan secara bertahap mewajibkan penggunaan komponen lokal lebih banyak daripada komponen impor.

Instrumen Hukum.

Instrumen hukum diberdayakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dari aspek legislasi atau penegakan hukum, baik secara internal maupun eksternal.



Pada tataran internal, penangkalan dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, percaya pada proses peradilan, dan dijaminnya kesetaraan dalam hukum. Perwujudan setiap putusan pengadilan yang adil, dilakukan dengan cara: *Pertama*, peningkatan citra para aparat penegak hukum melalui jalur pendidikan dan profesi dalam rangka mendukung sistem peradilan yang jujur dan berkeadilan. *Kedua*, peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang mengutamakan kepentingan pertahanan negara. *Ketiga*, pengawasan secara melekat dan berjenjang untuk mewujudkan *zero effect* dalam mengawal instrumen hukum yang berpotensi menjadi tantangan.

Pada Pertahanan Militer, penangkalan di bidang hukum dilakukan melalui serangkaian kebijakan untuk memperkuat legislasi di bidang pertahanan. Penangkalan dari aspek hukum tersebut dilakukan dengan cara: *pertama*, mendorong terwujudnya landasan hukum guna mendukung pembentukan komponen pertahanan negara. *Kedua*, perumusan hukum militer yang tidak diintervensi oleh kepentingan kelompok tertentu. *Ketiga*, mengimplementasikan hukum humaniter internasional dalam penyelenggaraan pertahanan negara. *Keempat*, memberikan pemahaman tentang hukum HAM dalam setiap pelaksanaan tugas, baik OMP maupun OMSP.

Pada tataran eksternal, penangkalan dilaksanakan untuk memiliki keunggulan dalam menjaga kepentingan nasional di forum internasional. Penanganan hukum dilaksanakan dengan cara:

Google



Negara Indonesia adalah negara hukum. (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945)

pertama, meningkatkan kualitas diplomasi di bidang hukum dengan PBB, Mahkamah Internasional, dan Lembaga/ Institusi hukum regional, dan *kedua*, meningkatkan kualitas penegakan hukum nasional sehingga mengurungkan niat negara lain untuk mengintervensi proses hukum di Indonesia.

Instrumen Militer.

Instrumen militer merupakan instrumen utama kekuatan nasional dalam rangka mendukung kepentingan nasional bersama-sama dengan instrumen lainnya. Apabila cara-cara nirmiliter gagal melindungi kepentingan nasional, maka sebagai langkah terakhir digunakan kekuatan militer. Penggunaan kekuatan militer sebagai jalan terakhir merupakan filosofi bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Pelaksanaan diplomasi akan efektif bila didukung oleh kekuatan militer yang kuat.

Pada pola defensif aktif, kekuatan militer dibangun agar memiliki kemampuan daya tangkal yang tinggi sehingga disegani oleh negara lain. Kekuatan militer dibangun untuk memiliki mobilitas yang tinggi (*high mobility*), daya pukul (*striking force*), dan personel yang memiliki militansi. Pembangunan kemampuan militer tersebut dilakukan melalui kebijakan pembangunan postur kekuatan pokok minimal (*Minimum Essential Force*), selain atas dasar pertimbangan kemampuan ekonomi negara, juga atas analisis risiko kemungkinan ancaman terhadap NKRI.



4.3.3.4 Memberdayakan Industri Pertahanan

Industri pertahanan negara merupakan salah satu faktor penting dalam usaha pemerintah membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Industri pertahanan dikembangkan melalui serangkaian kebijakan pemerintah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan agar memiliki kemandirian untuk mendukung tercapainya kemampuan pertahanan negara.

Percepatan kemandirian Industri Pertahanan Nasional, memerlukan kerja sama sinergis antara pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri. Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu, diperlukan pengelolaan manajemen yang visioner melalui peningkatan kreatifitas, inovasi, mengandalkan SDM yang memiliki idealisme dan intelektualisme serta membangun daya saing yang tinggi sehingga mampu mengikuti perkembangan iptek.

Kebijakan industri pertahanan dilaksanakan melalui program pengembangan industri pertahanan serta program penelitian dan pengembangan pertahanan yang mencakup beberapa hal. *Pertama*, penelitian pengembangan pertahanan termasuk konsep pertahanan dan keamanan. *Kedua*, pengembangan kerja sama industri pertahanan antara perguruan tinggi dengan lembaga penelitian dan pengembangan. *Ketiga*, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bidang desain rekayasa.



Google



Keempat, perbaikan pemeliharaan dan pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan.

Kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk pengumpulan informasi, pengintaian, dan pengawasan untuk menangkal upaya pihak asing melakukan spionase, pelanggaran wilayah perbatasan, dan upaya mengubah batas negara. Selain digunakan untuk menangkal ketiga hal tersebut, kemajuan teknologi juga dapat digunakan sebagai deteksi dini terhadap infiltrasi asing dan upaya memata-matai. Selanjutnya, kemampuan militer dibangun dengan memanfaatkan sistem pengintaian yang berbasis teknologi satelit, pesawat terbang tanpa awak (*Unmanned Aerial Vehicle/UAV*), dan penggunaan radar untuk mengawasi wilayah udara, khususnya wilayah perbatasan. Pelibatan Pertahanan Nirmiliter dilakukan dengan menstransfer kapabilitas dari kepentingan sipil untuk kepentingan militer. Industri pertahanan didorong untuk melakukan inovasi guna kepentingan pertahanan.

4.3.3.5 Meningkatkan Kerja Sama Internasional

Pertahanan negara diselenggarakan melalui peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, serta posisi yang bertetangga dengan sejumlah negara, berpengaruh terhadap kepentingan nasional dan internasional. Kenyataan tersebut mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama dengan negara lain sebagai kepentingan pertahanan negara yang akan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Esensi kerja sama pertahanan yang diselenggarakan Indonesia adalah untuk membangun saling percaya antarbangsa sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara lain. Kerja sama pertahanan juga bertujuan untuk membangun kapabilitas pertahanan, melalui bidang pendidikan, latihan, peningkatan profesional prajurit TNI, pengadaan Alutsista strategis dan transfer teknologi bagi kemandirian sarana industri pertahanan Indonesia.

Dalam konteks kerja sama pertahanan akan dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi dalam mewujudkan rasa saling percaya melalui bidang pertahanan. Sejalan dengan itu, diplomasi pertahanan akan lebih diefektifkan melalui langkah-langkah yang lebih konkret, aktif, dan bermartabat.

Kerja sama pertahanan diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui upaya bersama antarnegara serta menjunjung tinggi hak kedaulatan negara masing-masing. Selain itu dilakukan kerja sama dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Indonesia serta *major power* yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan, termasuk yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia.



Penyelenggaraan industri pertahanan bertujuan mewujudkan kemandirian pemenuhan alat-peralatan pertahanan dan keamanan

PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN

Bab 5

5.1 Umum

Industri pertahanan merupakan salah satu komponen vital dari kemampuan pertahanan. Industri pertahanan yang kuat mempunyai dua efek utama, yaitu efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional. Dalam bidang pembangunan kemampuan pertahanan, industri pertahanan yang kuat menjamin pasokan kebutuhan Alutsista dan sarana pertahanan secara berkelanjutan. Ketersediaan pasokan Alutsista secara berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak bagi keleluasaan dan kepastian untuk menyusun rencana pembangunan kemampuan pertahanan jangka panjang, tanpa adanya kekhawatiran akan pengaruh faktor politik dan ekonomi.

Industri pertahanan dapat memberikan efek terhadap pembangunan nasional, yang turut berperan dalam menggairahkan pertumbuhan industri berskala internasional, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi sekaligus memenuhi kebutuhan sektor pendidikan nasional. Pengembangan industri pertahanan nasional diarahkan pada upaya pencapaian kemandirian sarana pertahanan yang didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012)

5.2 Menuju Kemandirian Sarana Pertahanan



Indonesia selama ini memiliki ketergantungan terhadap luar negeri di bidang teknologi pertahanan sehingga sulit untuk menyusun rencana pembangunan pertahanan jangka panjang secara mandiri. Ketergantungan terhadap produk luar negeri sangat rentan terhadap kepentingan politik, seperti adanya pembatasan dan embargo.

Permasalahan lain adalah lemahnya kesiapan dan kemampuan penangkalan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Secara politis, kondisi tersebut mengakibatkan posisi Indonesia rentan terhadap tekanan politik dari negara lain, karena kemungkinan embargo terhadap peralatan tertentu. Keberadaan industri pertahanan yang mandiri dapat mendukung penyelenggaraan pertahanan yang efektif. Pemberdayaan industri strategis untuk kepentingan pertahanan tidak berarti bahwa Indonesia turut ambil bagian dalam kegiatan perlombaan persenjataan (*arm races*), akan tetapi lebih kepada upaya pencapaian kemandirian dalam pengadaan sarana pertahanan nasional. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan integritas nasional.

Pembangunan industri pertahanan merupakan hal yang vital dalam pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan. Ketergantungan sarana pertahanan kepada produksi luar negeri akan berdampak terhadap kemampuan TNI dalam menjalankan tugas. Untuk menyikapi keadaan ini, diperlukan pemberdayaan industri pertahanan sebagai pengembang dan penyedia sarana pertahanan nasional.

Pemberdayaan industri pertahanan nasional memerlukan kerja sama di antara tiga pilar industri pertahanan, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi, Industri, dan pihak Kementerian Pertahanan/TNI, yang didukung oleh suatu kebijakan dalam memberdayakan produk nasional.

Untuk mewujudkan kemandirian dalam bidang industri pertahanan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Undang-Undang ini memuat kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang: penguasaan terhadap iptek melalui industri pertahanan dengan cara kegiatan penelitian dan pengembangan riset dan teknologi maupun transfer teknologi pada saat pengadaan Alutsista guna memperkuat sistem pertahanan; mengurangi/meniadakan ketergantungan terhadap penggunaan Alutsista produk luar negeri menuju kepada kemandirian dalam pemenuhan postur dan struktur pertahanan; menuju kepada standarisasi Alutsista, agar terjadi efisiensi dan efektifitas dalam penyiapan sumber daya manusia, pembinaan materiil serta pengoperasiannya; mampu memberikan peningkatan terhadap perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja serta mengurangi devisa negara yang keluar; dan memudahkan terhadap langkah pengembangan teknologi yang lebih tinggi dengan pijakan teknologi yang telah dikuasai; serta menjamin terhadap kerahasiaan pertahanan negara dan meningkatkan daya tangkal (*deterrence*).

Industri pertahanan dalam negeri di bangun untuk mengurangi / meniadakan ketergantungan terhadap penggunaan alutsista produk luar negeri.

Inti kebijakan Industri Pertahanan adalah penguasaan teknologi melalui industri pertahanan guna mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang tangguh, berdaya tangkal, modern, dan dinamis yang mampu menjaga dan melindungi eksistensi bangsa dan NKRI. Penguasaan teknologi industri pertahanan akan mensejajarkan diri kepada negara maju, sehingga diperhitungkan oleh negara-negara lain sebagai kekuatan baru, yang dapat merubah tatanan peta politik dunia.

5.3 Mewujudkan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian dari penyelenggaraan pertahanan secara utuh, yang juga sebagai bagian dari pembangunan secara menyeluruh. Pengembangan industri pertahanan nasional melibatkan pihak pengguna, pihak yang memproduksi, perancang, penguji, dan peneliti yang kompeten, serta perencana yang tepat dalam kerangka Konsep Tiga Pilar Pelaku Industri Pertahanan.

Kementerian Pertahanan dan TNI selaku pengguna tidak hanya menerima dan menggunakan hasil produksi dari industri strategis, tetapi juga terlibat dalam pengembangan desain sampai menghasilkan prototipe sesuai kebutuhan. Keterlibatan pengguna dalam hal ini diemban oleh badan-badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang dimiliki Kementerian Pertahanan dan TNI untuk meneliti dan mengembangkan Alutsista dan sarana prasarana yang tepat menurut kebutuhan pertahanan. Peran Litbang sebagai jembatan antara pengguna dan industri sangat penting dalam mewujudkan kemandirian industri bidang pertahanan.

Konsep tiga Pilar pelaku industri pertahanan terdiri dari pihak pengguna, pihak yang memproduksi dan perancang/peneliti.

Kementerian Pertahanan bertekad untuk mengembangkan industri pertahanan di bidang daya gerak, daya tempur, pendukung, dan bekal. Hal ini tertuang dalam kebijakan pembangunan industri pertahanan sebagai dasar hukum bagi perwujudan kemandirian pertahanan. Pengembangan industri pertahanan ini merupakan langkah pengembangan kekuatan persenjataan yang mengarah kepada pemberdayaan industri pertahanan nasional sebagai upaya pencapaian kemandirian pengadaan Alutsista.

5.4 Kerja Sama dalam Pengembangan Industri Pertahanan

Sebagai penjabaran dari upaya pengembangan industri pertahanan, telah dilaksanakan beberapa bentuk kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa negara lain juga sudah menyampaikan keinginannya untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam bidang riset dan pengembangan teknologi, pengayaan sumber-sumber energi, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk pengembangan sumber daya manusia diadakan program magang di beberapa fasilitas pemerintah asing yang membidangi pengayaan energi dan Litbang. Sedangkan kerja sama dengan pihak dalam negeri juga terus dikembangkan, sebagai bentuk kontribusi pertahanan dalam memacu peningkatan kemampuan, baik segi pengembangan sains dan teknologi, perekonomian, perdagangan, maupun ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan alutsista dilakukan dengan menjalankan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mengutamakan kepentingan nasional. (UU No 16 tahun 2012 Pasal 47)



Kerjasama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun saling percaya antarbangsa sekaligus sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara lain.

KERJA SAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PERTAHANAN

Bab 6

6.1 Umum

Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama dengan negara lain. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan posisinya yang bertetangga dengan sejumlah negara, kepentingan nasional di bidang pertahanan negara tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga internasional. Kenyataan tersebut mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain sebagai kepentingan pertahanan negara yang akan ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang.

Selaras dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta sebagai negara pemrakarsa gerakan nonblok, Indonesia dalam membangun kerja sama internasional tidak melakukan aliansi dengan negara manapun. Namun demikian, Indonesia tetap berupaya aktif dalam percaturan internasional guna terciptanya kawasan yang damai, baik pada lingkup regional maupun global.

Indonesia dalam membangun kerjasama internasional internasional tidak melakukan aliansi dengan negara lain.

6.2 Esensi Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan

Kerja sama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun saling percaya antarbangsa sekaligus sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara lain.

Kerja sama tersebut juga bertujuan membangun kapabilitas pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan, pengadaan Alutsista strategis, dan transfer teknologi bagi kemandirian sarana industri pertahanan.

Dalam konteks tersebut, kerja sama internasional bidang pertahanan akan dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan. Sejalan dengan itu, sebagai instrumen diplomasi pertahanan maka kerja sama internasional bidang pertahanan akan lebih diefektifkan melalui langkah-langkah yang lebih konkret, aktif, dan bermartabat.

6.3 Lingkup Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan

Lingkup kerja sama internasional di bidang pertahanan terdiri dari kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Kerja sama bilateral bidang pertahanan dimaksudkan sebagai sarana pengembangan diplomasi pertahanan guna membangun saling percaya. Penyelenggaraan kerja sama pertahanan lebih dikembangkan untuk membangun saling percaya, mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian kedua belah-pihak, termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara. Dalam konteks tersebut, kerja sama diwujudkan dalam bentuk dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis, yang mana ke depan akan lebih dikembangkan guna menyentuh substansi pertahanan yang lebih komprehensif.

Kerjasama Bilateral bidang Pertahanan dilakukan guna membangun saling percaya.

Kerja sama regional bidang pertahanan diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui upaya bersama antarnegara di kawasan, serta menjunjung tinggi hak kedaulatan negara masing-masing dan tidak saling mengintervensi urusan negara lain. Kerja sama regional bidang pertahanan diutamakan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk mitra dialog dalam usaha untuk memelihara dan memperkuat stabilitas keamanan kawasan. Kerja sama regional bidang pertahanan juga dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia serta negara-negara besar dan yang memiliki pengaruh penting bagi kepentingan nasional Indonesia dan kawasan.

Peran Indonesia pada kerja sama multilateral bidang pertahanan di berbagai *fora* internasional, telah terbukti memberikan kontribusi bagi terpeliharanya stabilitas, baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Di samping itu, keikutsertaan Indonesia dalam pasukan pemelihara perdamaian di beberapa kawasan dalam misi PBB serta pelibatan di berbagai kegiatan internasional termasuk operasi bantuan kemanusiaan, telah memberikan pengaruh signifikan bagi Indonesia di dalam pergaulan internasional. Pembangunan *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC) merupakan wujud dari semakin kuatnya komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerja sama dan perannya di lingkup internasional.

Pembangunan Indonesia *Peace and Security Center* (IPSC) merupakan wujud dari semakin kuatnya komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerja sama dan perannya di lingkup internasional.

6.3.1 Kerja Sama Bilateral

6.3.1.1 Negara Anggota ASEAN

Dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama, menyangkut stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama negara anggota ASEAN memberdayakan wadah kolektif, dikemas dalam Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Suatu pertemuan untuk membicarakan berbagai isu keamanan kawasan serta isu-isu keamanan global yang berdampak terhadap kawasan. Indonesia mendorong pemberdayaan forum-forum *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)* sebagai wadah pejabat tinggi yang memberikan efek penanganan isu-isu keamanan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga memperjuangkan kepentingan kawasan dalam forum-forum antarbangsa yang lebih luas.

Kerja sama bilateral di bidang pertahanan diwujudkan dalam peningkatan kerja sama antarangkatan bersenjata dan pertukaran siswa antar-perwira muda. Selain itu, negara anggota ASEAN berkewajiban meningkatkan kerja sama di bidang penanggulangan dampak bencana alam, kerja sama keamanan maritim, tugas pemeliharaan perdamaian, memerangi terorisme, dan penanganan isu-isu keamanan bersama lainnya.

Pilar *ASEAN Political and Security Community (APSC)* mendorong lebih mengedepankan perwujudan komitmen untuk membangun kerja sama pertahanan yang lebih konkret dan praktis yang menyentuh permasalahan yang benar-benar dihadapi.

Google



Untuk terwujudnya pilar *ASEAN Political Security Community (APSC)* 2015 yang solid dan bersinergi efektif, komunitas pertahanan ASEAN dituntut untuk memperkuat kerja sama pertahanan yang lebih konkrit, terutama dalam merespon tantangan global yang dapat berimplikasi terhadap kepentingan stabilitas di Asia Tenggara.

Kerja sama dengan negara-negara ASEAN tidak terlepas dari upaya-upaya aktif Indonesia dengan negara-negara kawasan. Kerja sama tersebut diantaranya adalah kerja sama dalam mengelola perbatasan. Indonesia sepakat untuk meminimalisasi konflik perbatasan darat maupun laut melalui upaya diplomasi dengan tetap mengedepankan integritas dan konsep negara kesatuan. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan dan latihan militer, pertukaran informasi, dan penanganan terorisme.

Hubungan di bidang pertahanan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN menganut prinsip-prinsip kerja sama, yang salah satu diantaranya yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara. Namun dengan komitmen bahwa stabilitas kawasan akan tetap menjadi prioritas, maka Indonesia berupaya menjadi fasilitator dalam penanganan konflik-konflik internal maupun konflik yang timbul antarnegara ASEAN. Peran Indonesia ini tentunya berdasarkan atas permintaan/persetujuan dari negara-negara yang mengalami konflik tersebut.

Hubungan di bidang pertahanan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN menganut prinsip-prinsip kerja sama, yang salah satu diantaranya yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara.

6.3.1.2 Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan mitra strategis dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, kemampuan operasional, profesionalisme sumber daya manusia, dan modernisasi Alutsista. Indonesia dan AS berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan mengintensifkan komunikasi dan konsultasi serta mengembangkan kerja sama untuk kemajuan kedua negara dalam bidang pertahanan.

Komitmen kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pertahanan dituangkan dalam bentuk *Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and Department of Defence of the United States of America*.

Komitmen kerja sama Indonesia dan AS dituangkan dalam Pengaturan Kerangka Kerja sama tentang Kegiatan-Kegiatan Kerja sama dalam Bidang Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and Department of Defence of the United States of America*).

Bidang kerja sama yang dikembangkan meliputi: dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama; meningkatkan sumber daya manusia pada institusi pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara melalui pendidikan dan pelatihan; proyek pengembangan kapasitas tentang keamanan maritim; serta kerja sama logistik dan persediaan militer. Kerja sama pertahanan antara kedua negara diimplementasikan dalam bentuk: *Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD)*; *United States-Indonesia Bilateral Defence Dialogue (USIBDD)*; *Military Assistance Program (MAP)*; *International Military Education and Training (IMET)*; *Foreign Military Sales (FMS)*; dan *Foreign Military Financing Program (FMFP)*.

6.3.1.3 Republik Rakyat Tiongkok

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan mitra strategis dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, kemampuan operasional, profesionalisme sumber daya manusia dan modernisasi Alutsista.

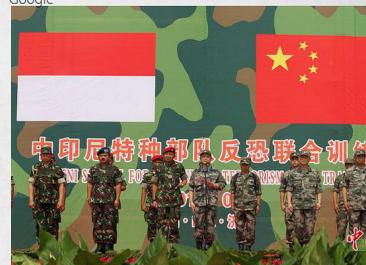
Kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan RRT diselenggarakan dalam konteks kepentingan nasional Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan dan penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara.

Indonesia dan RRT membangun kerja sama bidang industri pertahanan yang berkaitan dengan pengadaan peralatan militer di bidang-bidang tertentu yang disepakati dengan dasar pemerintah-ke-pemerintah; transfer teknologi peralatan militer tertentu; kerja sama dalam produksi peralatan militer tertentu; pengembangan bersama peralatan militer tertentu, dan pemasaran bersama peralatan militer tertentu di dalam dan atau di luar negara masing-masing. Ke depan kerja sama pertahanan kedua negara akan terus ditingkatkan dalam kerangka mewujudkan kemampuan pertahanan Indonesia yang makin optimal untuk menjaga, melindungi serta mengamankan wilayah dan kepentingan nasional Indonesia.

6.3.1.4 Australia

Australia merupakan mitra penting dalam kerja sama pertahanan di bidang pendidikan dan pelatihan, modernisasi Alutsista, kontra terorisme dan kejahatan transnasional. Hubungan baik yang terjalin ditandai dengan kuantitas dan kualitas kunjungan pemimpin negara dan pejabat-pejabat pemerintahan lainnya serta masyarakat dari kedua negara. Kerja sama yang erat antara Indonesia dan Australia dituangkan dalam persetujuan mengenai Kerangka Kerja sama Keamanan, yang lebih dikenal sebagai *Lombok Treaty (Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation)*.

Google



Komitmen kerja sama Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dituangkan dalam bentuk *Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* yang dikenal dengan sebutan *Lombok Treaty*

Ruang lingkup kerja samanya meliputi pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, maritim, keselamatan, dan keamanan penerbangan, pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal, tanggap darurat, organisasi internasional yang terkait dengan masalah-masalah keamanan, serta peningkatan pemahaman antara masyarakat dan antar individu.

Indonesia dan Australia sangat intensif menjalin komunikasi dan konsultasi pertahanan melalui forum dialog meliputi *Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue* (IADSD), *Australia-Indonesia High Level Committee* (Ausindo HLC), dan *Two Plus Two* antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI dengan Menlu Australia dan Menhan Australia.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia sering mengalami pasang surut yang berdampak pada kerja sama pertahanan kedua negara. Menyikapi hal tersebut, Indonesia berusaha meningkatkan komunikasi melalui jalur diplomatik untuk menetralisasi situasi dan selanjutnya membangun kembali hubungan ke arah yang lebih harmonis. Indonesia memandang perlu kedua negara merumuskan kepentingan apa saja yang dapat diwujudkan bersama sebagai satu kesatuan visi dan misi strategis untuk kepentingan bersama. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi terulangnya perselisihan antara kedua negara dan menumbuhkembangkan saling ketergantungan yang membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

6.3.1.5 Rusia

Rusia merupakan mitra lama dalam pengembangan bidang pengadaan Alutsista, logistik, dan bantuan teknis. Indonesia dan Rusia berkomitmen untuk meningkatkan terus kerja sama yang lebih operasional di waktu yang akan datang. Pemerintah Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman tentang asistensi dalam penerapan kerja sama Indonesia-Rusia di bidang teknologi militer dan perlindungan hak cipta. Tindak lanjut sebagai komitmen Indonesia atas kerja sama yang telah dibangun dengan Rusia diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2012 tentang pengesahan perjanjian kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

Kerja sama di bidang pertahanan kedua belah pihak terus meningkat, khususnya di bidang pengembangan industri pertahanan. Pertemuan kerja sama teknik militer diadakan setiap tahun. Pertemuan pertama Komisi antar-pemerintah Indonesia-Rusia di bidang Kerja sama Teknik Militer telah dilaksanakan di Moskow. Selanjutnya telah dilaksanakan sidang ke-8 Kerja sama Teknik Militer Indonesia-Rusia di Jakarta, membahas kelanjutan kerja sama industri pertahanan.

Komitmen kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan atas kerja sama yang telah dibangun, dikukuhkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2012 tentang pengesahan perjanjian kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

6.3.1.6 Jepang

Jepang merupakan mitra dalam kerja sama intelijen, pelatihan teknis, pendidikan dan latihan, serta kerja sama bidang ekonomi. Kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang untuk meningkatkan dialog dan konsultasi bilateral tidak hanya pada bidang kerja sama ekonomi, tetapi juga politik yang merupakan modalitas dalam membangun hubungan kegiatan kerja sama di bidang pertahanan kedua negara.

Kerja sama pertahanan kedua negara yang telah terjalin dengan baik selama ini, dan berpotensi untuk dikembangkan pada bidang-bidang lainnya, akan terus ditingkatkan dalam rangka makin mengoptimalkan kemampuan pertahanan Indonesia.

6.3.1.7 Korea Selatan

Korea Selatan (Korsel) telah menjadi mitra penting Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalisme prajurit TNI. Dalam kaitan tersebut Indonesia dan Korsel telah menyepakati kerja sama kegiatan di bidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian di bidang logistik, kerja sama industri pertahanan serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Indonesia dan Korsel juga telah lama mengembangkan kerja sama pendidikan, antara lain pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertukaran kunjungan pejabat tinggi pertahanan dan militer kedua negara berlangsung cukup baik.

Dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalisme prajurit TNI, Indonesia dan Korsel telah menyepakati kerja sama kegiatan di bidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian di bidang logistik, kerja sama industri pertahanan serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan.

Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan pertahanan kedua negara semakin penting.

Kerja sama di bidang pengembangan teknologi militer antara Indonesia dan Korsel sedang berlangsung dengan intensif termasuk *transfer of technology* pembangunan kapal selam Korsel kepada Indonesia serta upaya pengembangan bersama pesawat/jet tempur dalam proyek *Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment* (KFX/IFX) yang saat ini memasuki babak baru setelah persetujuan parlemen Korsel terhadap kegiatan ini. Dengan ditandatanganinya *Defence Cooperation Agreement* (DCA) kedua negara telah menandakan peningkatan kualitas kerja sama pertahanan yang sangat signifikan, baik dari segi kepentingan, maupun aturan kesepakatan yang memayunginya.

6.3.1.8 India

India merupakan mitra dalam patroli terkoordinasi di Laut Andaman, kerja sama di bidang pendidikan dan latihan, pertukaran kunjungan pejabat pertahanan/militer, dan pengembangan industri pertahanan. Kerja sama tersebut akan terus ditingkatkan dan dikembangkan di tahun-tahun yang akan datang. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama keamanan Indonesia-India mengalami kemajuan dibandingkan era sebelumnya, antara lain melalui dialog pertahanan.



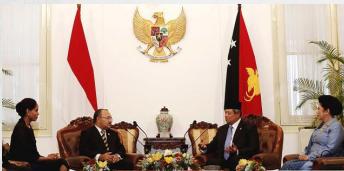
6.3.1.9 Timor Leste

Timor Leste merupakan mitra dalam membangun isu strategis keamanan perbatasan. Kerja sama pertahanan Indonesia dengan Timor Leste dilaksanakan berdasarkan pada *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang aktivitas kerja sama di bidang pertahanan. Ruang lingkup kerja sama meliputi: *Pertama*, dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama; *Kedua*, pertukaran informasi di bidang pertahanan; *Ketiga*, meningkatkan kerja sama antar-angkatan bersenjata; *Keempat*, kerja sama dukungan logistik, *Kelima*, kerja sama lain yang disepakati bersama.

6.3.1.10 Papua New Guinea

Papua New Guinea (PNG) merupakan mitra yang memiliki hubungan historis dan kekerabatan, khususnya dengan bangsa Indonesia yang berdomisili di Papua. Kerja sama pertahanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah PNG berdasarkan pada *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*.

Ruang lingkup kerja sama meliputi: *Pertama*, dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama;



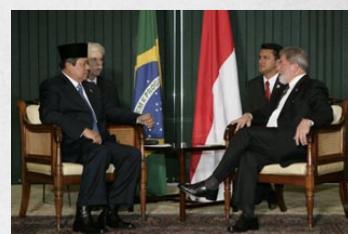
Papua New Guinea (PNG) merupakan mitra yang memiliki hubungan historis dan kekerabatan, khususnya dengan bangsa Indonesia yang berdomisili di Papua.

Kedua, pertukaran personel dalam rangka pendidikan, pelatihan, dan saling kunjung; *Ketiga*, berbagi informasi pertahanan; *Keempat*, pertukaran intelijen, *Kelima*, kerja sama di bidang logistik, *Keenam*, mendorong kerja sama interoperabilitas antar-angkatan bersenjata, *Ketujuh*, kerja sama di bidang lain sesuai kepentingan bersama.

6.3.1.11 Brasilia

Brasilia merupakan mitra strategis dalam kerja sama industri pertahanan. Kerja sama tidak hanya menyangkut bidang pertahanan tetapi juga menyangkut bidang politik, ekonomi, dan pembangunan (perdagangan, investasi, pertanian, energi, kehutanan, lingkungan hidup, pendidikan, Iptek), sosial budaya, dan kerja sama lainnya.

Pokok-pokok perjanjian seperti yang tertuang dalam Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia-Brasilia (*Declaration on the Strategic Patnership between the Republic of Indonesia and the Federative Republic of Brazil*). Kerja sama di bidang pertahanan antara lain meliputi pengadaan Alutsista TNI.



Brasilia merupakan mitra strategis dalam kerja sama industri pertahanan.

6.3.1.12 Negara-negara Uni Eropa

Negara-negara Uni Eropa memiliki peran penting dalam perkembangan militer Indonesia. Industri-industri pertahanan di negara-negara tersebut, berperan dalam pembangunan kekuatan TNI mulai dari perlengkapan militer hingga pengadaan Alutsista. Dalam dekade mendatang, industri di kawasan ini tetap menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas dan program alih teknologi militernya.

Di samping kerja sama di bidang Alutsista, Indonesia dan negara-negara Uni Eropa juga menjalin kerja sama militer di bidang logistik, pertukaran informasi, pendidikan dan latihan serta partisipasi Indonesia dalam forum-forum akademis.

Perancis

Perancis merupakan mitra penting dalam kerja sama pengembangan teknologi alutsista. Beberapa butir perjanjian diantaranya tidak hanya menyangkut pengembangan industri tetapi juga dialog strategis pertahanan, pertukaran informasi intelijen, dan operasi penjaga perdamaian.

Kerja sama yang dilakukan melalui pengadaan dan pemeliharaan/perbaikan Alutsista TNI seperti pengadaan radar untuk kebutuhan TNI AU (*Thales Raytheon System*), Rudal Exocet dan Mistral untuk kebutuhan TNI AL (MBDA), suku cadang helikopter, suku cadang *Véhicule de l'Avant Blindé* (VAB) untuk kebutuhan TNI AD/Pindad (*Renault Trucks Defence*). Kerja sama tersebut disertai dengan kesediaan Perancis melakukan alih teknologi dan pengadaan produksi bersama seperti pengadaan suku cadang VAB antara *Renault Trucks Defence* dengan PT. Pindad.



Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jerman disepakati dalam bentuk *Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*.

Jerman

Jerman merupakan mitra dalam kerja sama industri pertahanan. Kerja sama yang telah disepakati, yaitu *Jakarta Declaration: Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*. Ruang lingkup kerja sama meliputi:

kebijakan pertahanan, kebijakan keamanan dan militer, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta bidang lain yang disetujui bersama.

Spanyol

Spanyol merupakan mitra penting dalam kerja sama pengembangan kedirgantaraan. Kerja sama pertahanan Indonesia dengan Spanyol dilakukan dalam pengembangan/produksi pesawat angkut militer (antara lain pesawat CN-295). Di masa mendatang kerja sama lain bidang pengembangan perkapalan akan segera ditindaklanjuti untuk memperkuat dan mempermudah kolaborasi industri pertahanan Indonesia-Spanyol.

Inggris

Inggris merupakan mitra dalam kerja sama pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Program kerja sama pertahanan RI-Inggris *Joint Statement* tersebut adalah *“the launch of new modern defence and security relationship to address contemporary challenges, from co-operation on counter terrorism and maritime security to UK support for Indonesia security sector reform process”*.

Bentuk kerja sama yang telah disepakati antara lain peningkatan kapasitas bagi TNI di Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan. Bentuk bantuan dari pemerintah Inggris berwujud peralatan audio visual untuk pelatihan bahasa, juga menyediakan kursus-kursus dan seminar bagi anggota pasukan perdamaian.



Bentuk kerja sama yang telah disepakati antara Indonesia dan Inggris yakni peningkatan kapasitas bagi TNI di Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan.

Kerja sama pertahanan dalam hal *capacity building* SDM pertahanan telah dilakukan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan, termasuk di bidang kodifikasi dan *peacekeeping*. Bentuk kerja sama di bidang pertahanan lainnya berupa kontrak pembelian Alutsista TNI. Kerja sama pertahanan ini ke depan akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

6.3.1.13 Negara-negara Afrika

Hubungan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan negara-negara Afrika diprioritaskan pada kerja sama dalam rangka peningkatan *capacity building*. Bentuk-bentuk kerja sama yang dikembangkan meliputi: *Pertama*, pertukaran informasi mengenai pembentukan institusi pertahanan, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan. *Kedua*, pertukaran kunjungan para pejabat, dalam rangka pendidikan, riset untuk mewujudkan kepentingan bersama, termasuk pertukaran teknologi, bantuan teknik, pelatihan, dan penyediaan peralatan pertahanan.

6.3.2 Kerja Sama Regional

Di forum regional, Indonesia melakukan pertukaran pengalaman dan pandangan dengan negara-negara di kawasan. Pertukaran tersebut meliputi berbagai isu terkait penyelesaian masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama di kawasan, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan nasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara serta memberikan kontribusi bagi terciptanya stabilitas di kawasan.



6.3.2.1 ASEAN Defence Ministers' Meeting

Dalam kerja sama pertahanan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia ikut serta dalam pertemuan Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN (*ASEAN Defence Ministers' Meeting/ADMM*) yang merupakan forum kerja sama pertahanan tertinggi di ASEAN sejak tahun 2006. Forum yang melakukan pertemuannya dua kali dalam setahun ini, memberikan kesempatan kepada para menteri pertahanan negara-negara anggota ASEAN untuk dapat saling bertukar pandangan dan berdiskusi dalam rangka menyelesaikan isu-isu serta tantangan-tantangan di bidang pertahanan dan keamanan yang dihadapi di kawasan.

Forum ini sangat penting agar Indonesia dapat terus meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan melalui penyamaan persepsi dalam menghadapi tantangan di bidang pertahanan dan keamanan, serta dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan di antara negara-negara anggota ASEAN. Sebagai bagian dari ADMM, terdapat forum-forum lainnya yang melibatkan pejabat yang berhubungan dengan pertahanan negara, yaitu *ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM)*, *ADSOM Working Group (ADSOM WG)*, *Network of ASEAN Defence And Security Institutions (NADI)* dan *Asean Defence Intelligence Committee (ADIC)* serta forum-forum yang melibatkan pejabat di lingkungan TNI (*ASEAN Chief Of Defence Forces Informal Meeting/ACDFIM*, *ASEAN Chief Of Army Multilateral Meeting/ ACAMM*, *ASEAN Navy Chiefs Conference/ANCC*, *ASEAN Air Chiefs Conference/AACC*, *ASEAN Military Intelligence Informal Meeting/AMIIM*, *ASEAN Military Operation Informal Meeting/ AMOIM*,

Google



Dalam kerja sama pertahanan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia ikut serta dalam pertemuan Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN (*ASEAN Defence Ministers' Meeting/ADMM*) yang merupakan forum kerja sama pertahanan tertinggi di ASEAN sejak tahun 2006.



Indonesia akan terus memposisikan diri dalam setiap forum kerja sama pertahanan di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN Chief Military Medicine Conference/ACMMC, ASEAN Peacekeeping Center Network/APCN, dan ASEAN Sergeant Major Annual Meeting/ASMAM).

Indonesia akan terus memposisikan diri dalam setiap forum kerja sama pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan kerja sama pertahanan di kawasan Asia Tenggara diharapkan akan memberikan kontribusi pada pembangunan kapabilitas pertahanan.

6.3.2.2 ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus

ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus/ADMM-Plus merupakan pertemuan Menhan ASEAN dengan melibatkan Menhan dari negara: Australia, RRT, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. *ADMM-Plus* bertujuan untuk memfasilitasi dialog tingkat tinggi di antara negara-negara anggotanya, menghadapi berbagai tantangan keamanan dan kerja sama praktis dalam beberapa area keahlian (*Experts Working Groups/EWG*). Pada saat ini terdapat enam area keahlian, yakni: Keamanan Maritim/*Maritime Security (EWG on MS)*; Penanggulangan Terorisme/*Counter-Terrorism (EWG on CT)*; Penanggulangan Bencana/*Humanitarian Assistance and Disaster Relief (EWG on HADR)*; Operasi Perdamaian/*Peacekeeping Operations (EWG on PKO)*; Kesehatan Militer/*Military Medicine (EWG on MM)*; dan Penanganan Ranjau Darat/*Humanitarian Mine Action (EWG on HMA)*.

Indonesia akan terus menempatkan dirinya sebagai peserta aktif dalam setiap kegiatan tersebut. Hal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan profesionalisme personel di bidang pertahanan, selaras dengan tantangan di bidang pertahanan dan keamanan di berbagai kawasan.

6.3.2.3 *ASEAN Regional Forum*

Pada forum kerja sama pertahanan di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia telah menjadi bagian dari *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Sejak dimulai tahun 2004, ARF telah melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan beberapa negara rekan dialognya di kawasan Asia Pasifik (Australia, Bangladesh, Kanada, RRT, Korea Utara, Korea Selatan, India, Jepang, Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, PNG, Rusia, Sri Lanka, Timor-Leste, dan Amerika Serikat), serta Uni Eropa. Forum ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan dialog yang membangun dan berkonsultasi dalam berbagai isu di bidang politik dan keamanan yang menjadi perhatian bersama.

Indonesia akan terus berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan dalam lingkup ARF. Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan sumbangsih dalam membangun rasa saling percaya dan melakukan berbagai upaya diplomasi pencegahan konflik di kawasan. Forum ini digunakan untuk menunjukkan peran aktif ASEAN dalam ikut mengatasi berbagai konflik yang melibatkan beberapa anggotanya.



Pada forum kerja sama pertahanan di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia telah menjadi bagian dari *ASEAN Regional Forum (ARF)*.

6.3.2.4 Forum Dialog Regional

Indonesia terlibat dalam berbagai forum dialog regional di bidang pertahanan. Beberapa kegiatan antara lain, *The International Institute for Strategy Studies-Asia Security Summit* atau yang sering disebut dengan *Shangrila Dialogue*, *Western Pacific Naval Symposium*, *Indian Ocean Naval Symposium*. Forum ini merupakan *forum one and a half track* di mana pihak pemerintah melakukan dialog dengan kaum akademisi untuk membahas/mencari upaya pemecahan terhadap berbagai isu keamanan regional agar dapat diselesaikan secara komprehensif. Forum ini juga dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyampaikan kedudukan serta pandangannya terhadap berbagai permasalahan yang menyangkut bidang pertahanan dan keamanan ke semua negara yang berada di kawasan tersebut.

6.3.2.5 Forum-Forum Keamanan Lainnya

Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga melakukan dialog kerja sama regional di bidang pertahanan dengan salah satu negara mitra dialog. Forum dimaksud antara lain: *ASEAN-US Ministers' Defence Informal Meeting*, *ASEAN-China Defence Ministers' Informal Meeting*, *ASEAN-Japan Defence Vice-Ministerial Meeting*. ADSOM 2014 telah menyetujui dilaksanakannya *ASEAN-Japan Defence Ministers' Meeting* pada saat *ADMM Retreat 2014*.

Google



Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga melakukan dialog kerja sama regional di bidang pertahanan dengan salah satu negara mitra dialog.

Forum ini sangat bermanfaat untuk menunjukkan posisi dan kedudukan Indonesia sebagai bagian dari ASEAN yang terbuka untuk melakukan dialog maupun kerja sama dengan negara-negara manapun di dunia. Forum-forum ini tetap berpedoman kepada perimbangan pengaruh yang berkembang, sehingga Indonesia maupun ASEAN tidak dapat dipengaruhi ataupun dianggap terpengaruh oleh salah satu kekuatan politik dan angkatan bersenjata yang ada.

6.3.3 Kerja Sama Multilateral

Kerja sama multilateral dilaksanakan dalam rangka membangun dan mewujudkan pencapaian sasaran bidang pertahanan. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan kerja sama internasional antara lain, meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional serta kerja sama bantuan kemanusiaan dan bencana, melalui penguatan kerja sama multilateral.

Indonesia memiliki komitmen kuat untuk ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Komitmen ini telah dibuktikan dengan pengiriman pasukan pemelihara perdamaian sejak 1957 hingga sekarang. Komitmen ini semakin diperkuat dengan telah dibangunnya IPSC yang dilengkapi berbagai fasilitas latihan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyiapan kontingen Indonesia ke misi-misi internasional di bawah bendera PBB.



Indonesia memiliki komitmen kuat untuk ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia dengan dibangunnya *Indonesia Peace and Security Center* yang dilengkapi berbagai fasilitas latihan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyiapan kontingen Indonesia ke misi-misi internasional di bawah bendera PBB.



Misi pemeliharaan perdamaian yang dilaksanakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah organisasi internasional lainnya, merupakan perangkat untuk merespon krisis yang terjadi di berbagai kawasan.

Fasilitas dimaksud antara lain meliputi fasilitas latihan: *Peacekeeping Operations (PKO)*, *Standby Force*, *Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)*, *Counter-Terrorism*. Seluruh fasilitas IPSC bertaraf internasional terbuka untuk pelatihan bagi komunitas internasional.

6.3.3.1 Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa

Misi pemeliharaan perdamaian yang dilaksanakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah organisasi internasional lainnya, merupakan perangkat untuk merespon krisis yang terjadi di berbagai kawasan. Misi ini sangat efektif dan dibutuhkan guna membantu negara-negara yang dilanda krisis ataupun konflik sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Kegiatan misi pemeliharaan perdamaian yang diselenggarakan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya berkembang pesat dihadapkan pada situasi dan kondisi multidimensi yang dapat mengancam keselamatan suatu bangsa di wilayah konflik. Dengan demikian, kegiatan misi pemeliharaan perdamaian memerlukan berbagai penyesuaian dan inovasi agar tetap relevan dan efektif. Pada akhirnya keberadaan misi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kepentingan semua bangsa dan negara di dunia, yakni terwujudnya stabilitas perdamaian dan keamanan internasional.

Penyelenggaraan misi pemeliharaan perdamaian dengan menempatkan personel dan/atau pasukan militer dari negara yang dianggap netral mengalami banyak perubahan dari generasi ke generasi.

Perkembangan misi tersebut yaitu dari mandat untuk mengawasi gencatan senjata dan sebagai pemisah antar pihak-pihak yang berkonflik di daerah penyangga (*buffer zones*) menjadi lebih luas dan bersifat multidimensional serta tidak hanya melibatkan unsur militer, tetapi juga terdiri dari unsur polisi dan sipil. Saat ini pelaksanaan misi tersebut meliputi: membantu pengawasan pemilu, mendukung perluasan otoritas dan kontrol negara terkait, membangun sarana dan prasarana, fasilitas umum, perlindungan HAM, bantuan kemanusiaan, pengungsian, perlucutan senjata (*disarmament*), pembubaran milisi (*demobilization*), dan penyatuan kembali (*reintegration*)/DDR, dan mereformasi sektor keamanan.

Konflik yang terjadi di suatu negara tidak menutup kemungkinan akan memerlukan keterlibatan PBB dalam penyelesaian konflik tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut PBB akan mengeluarkan resolusi untuk melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian yang memerlukan partisipasi dari negara penyumbang pasukan/ Troops Contributing Country (TCC). Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang pasukan telah berulang kali diminta berpartisipasi untuk mengirimkan personel dan pasukan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Pengiriman personel dan pasukan tersebut diharapkan dapat disiapkan dan dikirim dalam waktu yang singkat. Sejak tahun 1957 Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai misi perdamaian PBB dengan mengirimkan personel dan pasukan TNI, polisi serta sipil sebagai anggota misi pemeliharaan perdamaian.



Sejak tahun 1957 Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai misi perdamaian PBB dengan mengirimkan personel dan pasukan TNI, polisi serta sipil sebagai anggota misi pemeliharaan perdamaian.



Pengiriman pasukan dalam misi pemeliharaan perdamaian yang dilaksanakan oleh TNI menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Khusus pengiriman personel dan pasukan TNI hingga akhir tahun 2013 masih bertugas pada tujuh misi pemeliharaan perdamaian yang tersebar di Timur Tengah, Asia, dan Afrika; antara lain United Nation Military Observers Mission in Congo (MONUSCO) di Kongo, United Nation Mission in Liberia (UNMIL) di Liberia, United Nation Mission in Sudan dan United Nation Mission in Darfur (UNMIS dan UNAMID) di Sudan, United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon, dan United Nation Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) di Haiti, serta personel TNI yang bertugas di markas PBB New York.

Pengiriman pasukan dalam misi pemeliharaan perdamaian yang dilaksanakan oleh TNI menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Indonesia telah melaksanakan perandam misi mengawasigencatan senjata, penanganan situasi darurat kemanusiaan dan perlindungan masyarakat sipil di wilayah negara yang bertikai/konflik, serta satuan tugas pengamanan laut (*Maritime Task Force*). Keterlibatan TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB akan terus ditingkatkan yang diharapkan akan mencapai 4.000 personel pada tahun 2014. Dengan jumlah ini maka Indonesia akan masuk kelompok sepuluh besar negara penyumbang pasukan.

Keberhasilan misi pasukan Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia tersebut terlihat dari situasi penerimaan masyarakat dan negara yang menjadi sasaran. Dalam rangka menunjang keberhasilan misi tersebut, maka pasukan Indonesia perlu disiapkan secara dini melalui manajemen yang transparan dan akuntabel.

Hal ini dapat ditempuh melalui kegiatan penyiapan pasukan, pengadaan sarana dan prasarana, proses pelatihan serta penggunaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan.

6.3.3.2 Bantuan Kemanusiaan dan Bencana

Bantuan kemanusiaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat dari dampak bencana. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah langsor. Dalam operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, TNI disiapkan pada tahap tanggap darurat (salah satu tugas pokok TNI dalam OMSP).

TNI dapat disusun dengan menggunakan struktur organisasi yang ada dan/atau membentuk komando tugas dengan melibatkan satu matra atau lebih dalam bentuk Komando Operasi Bantuan Penanggulangan Bencana. Komando Gabungan ini ditetapkan sebagai Komando Penyelenggaraan Operasi Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana yang dapat dikerahkan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam setiap kegiatan operasi termasuk OMSP maka dalam pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.



Keberadaan *Jakarta International Defence Dialogue* (JIDD) adalah salah satu contoh upaya dan inisiasi Indonesia untuk bersama negara lain saling bertukar pandangan di bidang pertahanan.

6.3.3.3 Forum Internasional Lainnya

Keberadaan Indonesia pada posisi geografis yang strategis, serta wilayah negara yang luas dengan keanekaragaman budaya, menempatkan Indonesia selalu menjadi pusat perhatian dari pergaulan dunia. Oleh karena itu, sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia juga tetap menjaga pergaulan dengan negara lain dalam forum internasional lainnya untuk saling membangun kepercayaan, kesetaraan, dan saling bertukar pandangan.

Keberadaan *Jakarta International Defence Dialogue* (JIDD) adalah salah satu contoh upaya dan inisiasi Indonesia untuk bersama negara lain saling bertukar pandangan di bidang pertahanan. Demikian pula kehadiran Indonesia dalam *Tokyo Defence Forum*, Forum Pameran Pertahanan di Singapura, di Malaysia dan forum internasional lainnya diharapkan tetap terus dijaga agar Indonesia tetap menjadi salah satu rujukan dalam konstelasi keamanan regional.

Indonesia ikut serta dalam forum internasional di bidang pertahanan, kesehatan, dan kebudayaan. Khusus bidang pertahanan, Indonesia berperan dalam penyelesaian konflik politik di Filipina seperti perjanjian damai *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Posisi tersebut merupakan komitmen Indonesia sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif.





Program MEF tidak bermaksud memperbesar kekuatan pertahanan, tetapi bertujuan untuk mengembangkan dan memodernisasi kekuatan pertahanan menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer, termasuk tugas dalam misi perdamaian.

POSTUR PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019

7.1 Umum

Indonesia merupakan negara yang mempunyai nilai strategis bagi negara-negara di sekitar kawasan. Konsekuensi terhadap nilai strategis tersebut perlu didukung kesiapan Postur Pertahanan yang handal, sehingga dapat berorientasi terhadap berbagai dinamika perkembangan lingkungan dan konteks strategis. Postur Pertahanan Negara diarahkan sesuai dengan kemampuan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Postur Pertahanan Negara dibangun bukan berarti untuk menimbulkan kecurigaan dan ancaman terhadap negara lain. Postur Pertahanan Negara Indonesia dibangun bertujuan untuk mempertahankan diri dan diwujudkan sesuai dengan standar kemampuan pertahanan (*Capability Based Defence*). Postur Pertahanan Negara mencerminkan kapabilitas pertahanan yang melampaui tingkat MEF.

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal untuk menanggulangi setiap bentuk ancaman. Pemerintah berkewajiban menyiapkan pertahanan negara secara dini dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta. Kesemestaan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsi dilaksanakan dalam bentuk Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter.

Bab 7



Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata. (Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004)





Postur pertahanan negara secara berkesinambungan disesuaikan dan diarahkan untuk menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas pertahanan strategis jangka panjang.

Pertahanan Militer bertumpu pada TNI sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer. Sedangkan Pertahanan Nirmiliter merupakan peran dari K/L di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi.

Postur pertahanan negara secara berkesinambungan disesuaikan dan diarahkan untuk menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas pertahanan strategis jangka panjang. Pembangunan pertahanan dan keamanan jangka panjang seperti tercantum dalam RPJPN Tahun 2005-2025 yang di dalamnya dibagi sesuai rencana strategis lima tahunan. Pembangunan pada Renstra Tahap II Tahun 2015-2019 diarahkan untuk terbangunnya profesionalisme, meningkatnya kesejahteraan prajurit serta ketersediaan Alutsista TNI melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri. Tahapan pembangunan ini melanjutkan pembangunan yang belum dapat dicapai pada tahapan 2010-2014. Alokasi anggaran pertahanan untuk mewujudkan pembangunan Renstra Tahap II berkisar 2,2%-2,61% dari PDB. Menyikapi hal tersebut maka wujud strategi kebijakan pembangunan Postur Pertahanan Negara dituangkan pada pembangunan kekuatan *Minimum Essential Force* (MEF).

7.2 Postur Pertahanan Militer

Postur Pertahanan Militer diarahkan untuk pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar Komponen Utama (TNI AD, TNI AU, dan TNI AL), Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

7.2.1 Komponen Utama

7.2.1.1 Kekuatan

Postur Pertahanan Militer yang dibangun pada masa datang tidak diarahkan untuk menambah kekuatan personel. Penataan organisasi menjadi salah satu aspek yang dibenahi dalam membangun Postur Pertahanan Militer. Penataan organisasi harus dapat mewujudkan strategi militer yang bersifat Trimatra Terpadu.

Perwujudan tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dilakukan untuk mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks melalui operasionalisasi kekuatan TNI secara terintegrasi dan bersinergi dalam konteks operasi gabungan. Penataan wilayah Kogabwilhan dilakukan secara seimbang sesuai dengan konstelasi geografi Indonesia.

Pengembangan organisasi dan gelar kekuatan TNI AD diwujudkan dengan rencana penambahan satu Komando Daerah Militer dan satu Divisi Komando Strategi Cadangan. TNI AL merencanakan pembentukan Komando Pertahanan Laut Republik Indonesia (Kohanla) untuk mendukung operasionalisasi Kogabwilhan.



Postur Pertahanan Militer yang dibangun pada masa datang tidak diarahkan untuk menambah kekuatan personel. Penataan organisasi menjadi salah satu aspek yang dibenahi dalam membangun Postur Pertahanan Militer.

Google



Kohanla RI akan menambah satu Armada sehingga menjadi tiga Komando Armada (Koarmada) yang terdiri dari Komando Armada Barat, Komando Armada Tengah, dan Komando Armada Timur.

Kohanla RI akan menambah satu Armada sehingga menjadi tiga Komando Armada (Koarmada) yang terdiri dari Komando Armada Barat, Komando Armada Tengah, dan Komando Armada Timur. Kekuatan TNI AU mengoptimalkan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dengan menambah satu Komando Operasional Udara Nasional (Koopsudnas) sehingga menjadi tiga Koopsudnas.

7.2.1.2 Kemampuan

Pengembangan kemampuan Pertahanan Militer diarahkan pada kemampuan di bidang intelijen, kemampuan di bidang diplomasi, kemampuan di bidang pertahanan, kemampuan pemberdayaan wilayah, dan kemampuan dukungan.

Google



Kekuatan TNI AU mengoptimalkan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dengan menambah satu Komando Operasional Udara Nasional (Koopsudnas) sehingga menjadi tiga Koopsudnas.

Kemampuan Intelijen

Kemampuan Intelijen, yang meliputi kemampuan menggunakan agen, klandestin atau mata-mata (*Human Intelligence*) maupun dengan penggunaan teknologi seperti intelijen citra (*Imagery Intelligence*), intelijen sinyal (*Signals Intelligence*), intelijen pengukuran (*Measurement and Signature Intelligence*), intelijen elektronik (*Electronic Intelligence*), intelijen teknik (*Technical Intelligence*) dan intelijen sumber terbuka (*Open Source Intelligence*) digunakan secara optimal dengan memanfaatkan teknologi mutakhir serta terintegrasi dan bersinergi dengan Pertahanan Nirmiliter.

Kemampuan Diplomasi

Kemampuan diplomasi dilakukan dengan menerapkan manajemen yang lebih baik untuk mengimplementasikan strategi Pertahanan Militer. Usaha dan kegiatan diplomasi diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dan saling menghormati antar-angkatan bersenjata masing-masing negara serta untuk membangun persepsi daya tangkal melalui berbagai bentuk kerja sama pertahanan dan penyelenggaraan dialog dalam forum lingkup nasional, regional, dan internasional.

Kemampuan Pertahanan

Kemampuan pertahanan mencakup pertahanan udara nasional, pemukul strategis, peperangan elektronika (pernika), dan pertahanan siber. Kemampuan pertahanan udara nasional dikembangkan dengan melaksanakan pendeteksian, pengamatan, pengintaian, dan perlindungan terhadap seluruh wilayah udara nasional. Kemampuan ini diselenggarakan oleh Kohanudnas dan unsur-unsur pertahanan udara dengan memaksimalkan sistem senjata pertahanan udara yang digelar di tiap matra. Kemampuan pemukul strategis disiapkan dan diselenggarakan oleh satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI serta kekuatan pemukul laut dan pemukul udara strategis. Kemampuan pernika disiapkan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI, yang meliputi alat peralatan pernika, sumber daya manusia yang mengawaki, serta pendukung lainnya.

Google



Kemampuan pemukul strategis disiapkan dan diselenggarakan oleh satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI serta kekuatan pemukul laut dan pemukul udara strategis.

Kemampuan pertahanan siber dikembangkan untuk memastikan dunia siber yang aman bagi keamanan nasional terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan siber terintegrasi dan bersinergi dengan semua instrumen kekuatan nasional lainnya untuk mengurangi risiko yang timbul dari serangan di ruang siber, sehingga dijalin kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan keamanan nasional.

Kemampuan menjamin keamanan nasional dan keselamatan bangsa dijabarkan ke dalam; *Pertama*, kemampuan mengamati dan mengamankan wilayah udara, laut, serta wilayah daratan, dan menempatkan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan sebagai daerah yang mendapat prioritas; *Kedua*, kemampuan penegakan hukum di laut dan udara nasional untuk mencegah dan mengatasi setiap pelanggaran dan ancaman yang membahayakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional secara keseluruhan; dan *Ketiga*, kemampuan untuk mengatasi gerakan separatis, terorisme, spionase, pemberontakan bersenjata, insurgensi, perompakan, pembajakan, konflik komunal, dan gangguan keamanan lainnya yang penanganannya dilakukan melalui OMSP.

Kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Kemampuan pemberdayaan wilayah dilaksanakan melalui pembinaan teritorial (binter) sesuai aspek darat, laut, dan udara, mencakup penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan, penyelenggaraan pendidikan dasar kemiliteran, serta pemberdayaan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan meliputi wilayah negara beserta kekuatan pendukungnya untuk diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan. Pemberdayaan wilayah diwujudkan melalui penyiapan potensi wilayah untuk kepentingan pertahanan. Pemberdayaan wilayah pertahanan juga mencakup pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan pulau-pulau kecil terluar. Pendidikan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara dan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini menyangkut kemampuan personel TNI untuk memberikan pelatihan kepada warga negara, serta sumber daya yang diperlukan seperti fasilitas pelatihan dan instrumen lain yang dibutuhkan.

Kemampuan Dukungan

Kemampuan dukungan mencakup: *Pertama*, bantuan kemanusiaan dalam mengatasi dampak bencana alam. *Kedua*, kemampuan bantuan terhadap otoritas sipil dalam mengatasi permasalahan sosial dan bantuan lain dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat. *Ketiga*, kemampuan dukungan untuk membantu fungsi Pertahanan Nirmiliter dalam rangka penyediaan logistik pertahanan, penguatan diplomasi, survei dan pemetaan wilayah negara, penataan ruang nasional, kegiatan bela negara, serta penelitian maupun pengembangan teknologi dan industri nasional untuk pertahanan.

Google



Kemampuan dukungan mencakup bantuan kemanusiaan dalam mengatasi dampak bencana alam, kemampuan bantuan terhadap otoritas sipil dalam mengatasi permasalahan sosial dan bantuan lain dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

Keempat, kemampuan diplomasi militer, operasional (termasuk operasi perlindungan dan penyelamatan WNI di luar negeri), kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia atau tugas kemanusiaan pada lingkup internasional dan lingkup regional. *Kelima*, kemampuan memaksimalkan K4IPP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Informasi, Pengamatan, dan Pengintaian) dalam rangka mewujudkan *striking forces* dan *high mobility* kekuatan militer. *Keenam*, kemampuan administrasi dibina dan dikelola secara proporsional dan profesional melalui peningkatan dukungan anggaran pemeliharaan.

7.2.1.3 Gelar

Gelar Pertahanan Militer diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif, dan menyusun pertahanan berlapis. Dalam rangka menyusun pertahanan berlapis, gelar Pertahanan Militer disinergikan dengan gelar Pertahanan Nirmiliter untuk melaksanakan penangkalan, menghadapi tantangan di bidang militer, menghadapi tantangan di bidang nonmiliter, melaksanakan kerja sama pertahanan, dan melaksanakan perdamaian dunia, serta melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan dan bencana alam (*Humanitarian Assistance and Disaster Relief*).

Gelar Komponen Utama

Gelar kekuatan TNI diselenggarakan dalam rangka strategi penangkalan guna terwujudnya efektivitas penyelenggaraan operasi militer dalam menghadapi ancaman, dengan memaksimalkan pemberdayaan Trimatra Terpadu.

Dalam rangka gelar penangkalan, pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan diselenggarakan dalam keterpaduan TNI AD, TNI AL dan TNI AU sesuai dengan kondisi geografi wilayah Indonesia.

TNI AD

TNI AD memiliki gelar kekuatan yang mencakup gelar kekuatan terpusat, gelar kekuatan kewilayahan dan gelar kekuatan pendukung. Gelar kekuatan terpusat terdiri dari gelar Kostrad dan gelar Kopassus. Gelar kekuatan kewilayahan bertumpu pada gelar Kodam yang diintegritaskan dalam gelar komando gabungan wilayah pertahanan, sedangkan gelar kekuatan satuan pendukung bertumpu pada gelar Satuan Balakpus. Adapun gelar kekuatan TNI AD dijabarkan sebagai berikut:

Kekuatan Terpusat

Pertama, Gelar Kostrad merupakan gelar terpusat TNI AD yang diselenggarakan berdasarkan perkiraan ancaman dan konstelasi geografi Indonesia untuk mencapai efek mobilitas yang tinggi (*rapid deployment*) dan mendapatkan efek penggetar. Gelar Kostrad disiapkan untuk mampu menghadapi empat *trouble spot* sekaligus. Sampai saat ini, kekuatan Kostrad yang tergelar baru dua Divisi sehingga akan dikembangkan menjadi empat Divisi. Dengan adanya penambahan dua Divisi maka gelar kekuatan Kostrad akan ditambah dengan enam Brigif yang berkemampuan Linud, Raider dan Mekanis beserta unsur Satbanpur dan Satbanminnya serta dibentuk pula Brigade Tim Pertempuran Berat.



TNI AD memiliki gelar kekuatan yang mencakup gelar kekuatan terpusat, gelar kekuatan kewilayahan dan gelar kekuatan pendukung.

Kedua, Gelar Kopassus merupakan gelar terpusat yang diselenggarakan berdasarkan kekhasan tugas pokoknya, sehingga penggelarannya disusun sedemikian rupa untuk mencapai keleluasaan dan kecepatan bertindak. Gelar Kopassus tidak diukur dengan standar MEF, melainkan pemenuhan secara ideal agar memiliki kemampuan maksimal. Penggelaran pasukan Kopassus tidak mengenal pembatasan oleh aspek wilayah, karena gelar Kopassus saat ini berada di pulau Jawa maka pengembangan sarana untuk mendukung mobilitas yang tinggi menjadi prioritas. Untuk mendukung terwujudnya kemampuan yang handal, diperlukan pendidikan, latihan, dan didukung modernisasi alat perlengkapan. Gelar Kopassus yang sudah ada tetap dipertahankan dan dapat berubah sesuai perkembangan kepentingan nasional.

Kekuatan Kewilayahan

Gelar kekuatan kewilayahan TNI AD disiapkan untuk mampu beroperasi di wilayah secara mandiri dan berkelanjutan dengan mengikuti struktur organisasi TNI yang berbasis kewilayahan. Gelar kekuatan Kodam dan jajarannya diproyeksikan untuk menyesuaikan dengan struktur Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Untuk mengintegrasikan dengan struktur gelar Kogabwilhan, maka gelar Komando Kewilayahan TNI AD ke depan disusun secara kenyal dan disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah, sehingga memungkinkan terselenggaranya interoperabilitas pelaksanaan fungsi pertahanan secara Trimatra Terpadu dalam struktur Kogabwilhan. Pada pembangunan Renstra II terdapat pengembangan satuan dan rematerialisasi untuk Alutsista.



Gelar kekuatan kewilayahan TNI AD disiapkan untuk mampu beroperasi di wilayah secara mandiri dan berkelanjutan dengan mengikuti struktur organisasi TNI yang berbasis kewilayahan.

Rencana pengembangan Postur Kodam ke depan diarahkan kepada pengembangan satuan dengan memodernisasi alat perlengkapan yang dirinci sebagai berikut: Makodam, Makorem, Makodim, dan Koramil diarahkan kepada efisiensi personel yang berkualitas dan profesional serta padat teknologi.

Pengorganisasian Satpur minimal berkekuatan 1 Brigif, di mana unsur-unsur satuan Yonif di bawahnya memiliki kemampuan secara spesifik, yaitu pertempuran kota, pertempuran rawa laut, dan perang hutan gunung. Untuk mendukung kemampuan pertempuran kota, diperlukan Yonif Mekanis; untuk mendukung kemampuan perang rawa laut sungai dan pantai, diperlukan Yonif yang dilengkapi dengan alat angkut air modern, dan untuk mendukung kemampuan perang hutan gunung diperlukan sarana mobilitas udara (Yonif Mobud). Kodam memiliki satuan setingkat Yonif yang menjadi satuan pemukul pada tingkat Kodam, yaitu Yonif Linud/BS dan Yonif Raider.

Pengorganisasian Satbanpur minimal berkekuatan 1 Batalyon Kavaleri Komposit, 1 Batalyon Armed, 1 Batalyon Arhanudse Komposit, dan 1 Batalyon Zipur. Pengorganisasian Satbanmin minimal berkekuatan 1 Detasemen Intelijen, dan Balakdam diarahkan kepada efisiensi personel yang berkualitas dan profesional serta padat teknologi. Pengorganisasian Satuan Penerbad tiap Kodam berkekuatan 1 Skadron Komposit dengan kemampuan serang dan serba guna. Pengorganisasian Lembaga Pendidikan Daerah (Lemdikrah) minimal berkekuatan 1 Rindam dan diarahkan untuk mampu mendidik prajurit-prajurit reguler dan Komponen Cadangan. Untuk itu, peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan menjadi prioritas.

Google



Untuk mengintegrasikan dengan struktur gelar Kogabwilhan, maka gelar Komando Kewilayahan TNI AD ke depan disusun secara kenyal dan disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah

Google



Gelar Kekuatan Satuan Pendukung disesuaikan dengan rantai sistem distribusi logistik dan sistem dukungan lainnya bagi kepentingan penyelenggaraan operasi militer, baik OMP maupun OMSP, serta dukungan bagi kepentingan penyelenggaraan seluruh fungsi pertahanan.

Gelar Kodam dengan perkuatannya merupakan bagian dari kekuatan kewilayahan dan menjadi bagian dari Kogabwilhan yang memadukan kekuatan Trimatra Terpadu di wilayah Kogabwilhan.

Satuan Pendukung

Gelar Kekuatan Satuan Pendukung disesuaikan dengan rantai sistem distribusi logistik dan sistem dukungan lainnya bagi kepentingan penyelenggaraan operasi militer, baik OMP maupun OMSP, serta dukungan bagi kepentingan penyelenggaraan seluruh fungsi pertahanan. Gelar Penerbad diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan operasi TNI AD, baik oleh Kopassus, Kostrad dan Kodam, serta untuk mendukung struktur Kogabwilhan.

TNI AL

TNI AL memiliki gelar organisasi, gelar kekuatan, dan kemampuan. Dalam Postur tahun 2010-2024 disesuaikan dengan struktur organisasi pembentukan Kohanla RI, mulai dari kekuatan terpusat, kewilayahan serta pendukung. Gelar Organisasi: terdiri dari organisasi kekuatan terpusat, organisasi kekuatan kewilayahan dan organisasi kekuatan pendukung.

Organisasi Kekuatan Terpusat

Penggelaran organisasi TNI Angkatan Laut sebagai Kotama Binops terdiri dari Kohanla RI yang membawahi 3 Kolak Ops (Koarmada Barat, Koarmada Tengah Koarmada Timur di mana masing-masing Koarmada membawahi Guspurla), Lantamal dan Kolinlamil serta 1 Kotama Bin yaitu Kormar.

Sebagai implikasi terbentuknya Kohanla RI maka Satkopaska Koarmabar dan Satkopaska Koarmatim di *regrouping* menjadi Kopaskahanla, sedangkan Kolatarmabar dan Kolatarmatim di *regrouping* menjadi Kolathanla di bawah Kohanla RI. Selain itu dibentuk Divisi 1, 2 dan 3 Marinir, sebagai Kolakbin Kormar yang saat ini disebut pasukan Marinir 1 dan pasukan Marinir 2, sedangkan organisasi bentukan baru Divisi 3 Marinir di Sorong akan diproyeksikan sebagai salah satu komponen SSAT di Komando Armada RI Kawasan Timur. Dengan adanya 3 Koarmada maka sebagai komponen SSAT di wilayah Timur dibentuk Pangkalan Marinir Sorong.

Organisasi Kekuatan Kewilayahan

Gelar organisasi TNI Angkatan Laut yang tergolong dalam kekuatan kewilayahan dikembangkan menjadi 14 Pangkalan kelas A (Lantamal) di bawah Kohanla RI, sedangkan Lantamal membawahi 26 Pangkalan kelas B, 27 Pangkalan kelas C.

Organisasi Kekuatan Pendukung

Penggelaran organisasi kekuatan pendukung yaitu Markas Besar yang terdiri atas: Eselon Pimpinan, Eselon Pembantu Pimpinan, 25 Balakpus dan membawahi 3 Kotama Binops, 1 Kotama Pembinaan serta 3 Kotama Kolakops.

Gelar Kekuatan dan Kemampuan TNI Angkatan Laut disesuaikan dengan kekuatan TNI Angkatan Laut yang diarahkan untuk mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Laut.



TNI AL memiliki gelar organisasi, gelar kekuatan, dan kemampuan. Dalam Postur tahun 2010-2024 disesuaikan dengan struktur organisasi pembentukan Kohanla RI, mulai dari kekuatan terpusat, kewilayahan serta pendukung.

Google



Gelar Kekuatan dan Kemampuan TNI Angkatan Laut disesuaikan dengan kekuatan TNI Angkatan Laut yang diarahkan untuk mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Laut.

Google



Susunan gelar yang bersifat penindakan disesuaikan dengan hakikat ancaman yang dihadapi. Gelar penindakan disusun dalam kekuatan SSAT yang terdiri dari KRI, Pesawat Udara, Pangkalan, dan Marinir, serta dilengkapi oleh satuan pendukung.

Diselenggarakan dalam kerangka Strategi Pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI yang mampu menjangkau seluruh wilayah perairan NKRI sekaligus mengintegrasikan SSAT dengan Kogabwilhan sehingga menjadi kekuatan yang disegani kawan dan lawan. Pelaksanaan gelar kekuatan TNI AL diarahkan untuk mampu memberikan efek penangkalan yang tinggi dalam mengawal dan menjaga wilayah NKRI, serta disesuaikan dengan Strategi Pertahanan Laut Nusantara.

Penggelaran kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut meliputi: Gelar Penindakan (*employment*) dan Gelar Permanen (*Deployment*).

Gelar penindakan diarahkan untuk melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang tetap mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional. Gelar penindakan merupakan gelar operasional dalam rangka penegakan kedaulatan negara, yang penggunaannya berada di bawah Komando dan Pengendalian Panglima TNI. Susunan gelar yang bersifat penindakan disesuaikan dengan hakikat ancaman yang dihadapi. Gelar penindakan disusun dalam kekuatan SSAT yang terdiri dari KRI, Pesawat Udara, Pangkalan dan Marinir serta dilengkapi oleh satuan pendukung.

Kekuatan KRI terdiri atas unsur-unsur kekuatan pemukul yang digelar di ZEE Indonesia dan corong-corong strategis, kekuatan patroli digelar di tiga ALKI dan wilayah laut yang memiliki potensi gangguan keamanan tinggi, sedangkan kekuatan pendukung digelar berdasarkan kebutuhan operasi.

Kekuatan Pesud digelar dan dioperasikan dalam rangka mendukung gelar penindakan unsur-unsur TNI AL di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing Koarmada. Kekuatan Marinir digelar dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat untuk operasi amfibi, operasi anti amfibi dan tugas-tugas operasi militer lain.

Dalam rangka mendukung Strategi Pertahanan Laut Nusantara yang untuk digelar sesuai konstelasi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, kebutuhan pokok TNI Angkatan Laut adalah unsur KRI sebanyak 274 kapal berbagai jenis, Pesud 137 unit berbagai jenis, Marinir sebanyak 3 Divisi marinir dan 2 Brigade BS dengan kebutuhan Ranpur 890 unit, Meriam 793 pucuk, Roket 128 pucuk serta 14 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, serta Fasharkan yang digelar secara menyebar untuk memberikan dukungan maksimal.

Sedangkan Gelar Permanen (*deployment*) merupakan gelar kekuatan relatif tetap yang menjadi basis kekuatan untuk mengantisipasi poros ancaman secara proporsional. Implementasi dari gelar permanen ini mencakup gelar satuan kapal, satuan pesud, pangkalan dan satuan marinir pada tempat-tempat yang strategis dan mampu melaksanakan pengendalian laut serta proyeksi kekuatan secara optimal, efektif dan efisien. Gelar permanen lebih dititikberatkan pada tugas penyiapan kemampuan dan memberi dukungan bagi satuan operasional apabila terjadi krisis sekaligus dapat memberikan efek penangkalan (*deterrence effect*).

Google



Gelar permanen lebih dititikberatkan pada tugas penyiapan kemampuan dan memberi dukungan bagi satuan operasional apabila terjadi krisis sekaligus dapat memberikan efek penangkalan (*deterrence effect*).

Dalam rangka mendukung kebutuhan operasional, disusun gelar yang bersifat permanen disesuaikan dengan struktur organisasi Kohanla RI, dengan wilayah kerja sebagai berikut: Koarmada Barat dengan mako di Jakarta memiliki wilayah tanggung jawab Perairan Barat Sumatera sampai dengan ALKI-I, Koarmada Tengah dengan Mako di Surabaya memiliki wilayah tanggung jawab Perairan Laut Jawa, Perairan Selatan Jawa (Samudra Hindia) sampai ALKI-II, Koarmada Timur dengan Mako di Sorong memiliki wilayah tanggung jawab ALKI-III sampai dengan Perairan terluar Papua. Kohanla RI diintegrasikan dengan Struktur Kogabwilhan guna mengamankan tiga corong strategis yakni ALKI-I (Wilayah Barat), ALKI-II (Wilayah Tengah) dan ALKI III (wilayah Timur).

TNI AU

TNI AU melaksanakan gelar kekuatan yang diselenggarakan dalam kerangka Strategi Pertahanan Udara Indonesia dengan konsep strategi untuk memberikan efek *deterrence* dan mengamankan wilayah dirgantara Indonesia sampai di luar wilayah ZEE Indonesia. Fungsi yang diemban dalam penggelaran Kekuatan TNI AU diarahkan untuk menghancurkan kekuatan musuh serta memberikan payung udara yang melindungi Kekuatan TNI dalam penyelenggaraan operasi, baik di laut maupun di darat. Gelar kekuatan TNI AU tersebut dikembangkan dalam kerangka Trimatra Terpadu. Dalam rangka itu, penggelaran tiga Koopsau akan disesuaikan dengan penggelaran Divisi Kostrad dan Armada TNI AL, sehingga menghasilkan suatu keterpaduan.

Google



Fungsi yang diemban dalam penggelaran kekuatan TNI AU diarahkan untuk menghancurkan kekuatan musuh serta memberikan payung udara yang melindungi Kekuatan TNI dalam penyelenggaraan operasi, baik di laut maupun di darat.

Penggelaran Kekuatan TNI AU meliputi gelar kekuatan Pertahanan Udara (Hanud), gelar kekuatan Pemukul Udara, gelar kekuatan dalam rangka pengamanan ALKI, gelar kekuatan dalam rangka Pembinaan Kemampuan dan gelar kekuatan untuk memberikan dukungan logistik. Gelar kekuatan Pertahanan Udara (Hanud) diselenggarakan dalam empat Kosek yang bermarkas di Medan, Jakarta, Makassar, dan Biak. Gelar satuan Radar, unsur Tempur Sergap, Satrudal dan Satmer di masing-masing Kosek disesuaikan dengan datangnya ancaman serta kemampuan Alutsista yang digelar. Gelar tersebut telah memenuhi struktur Kogabwil yang direncanakan, sehingga langkah ke depan adalah memantapkan gelar satuan-satuan yang berada di lingkungan masing-masing Kosek.

Gelar Satrad Kohanudnas, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terpasang sistem radar, akan dikembangkan sehingga seluruh wilayah NKRI dapat diawasi oleh sistem Radar. Prioritas pengembangan Satrad diarahkan ke wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Gelar Satrad tersebut dikembangkan untuk menutup wilayah-wilayah yang masih terdapat celah (*gap*) sehingga diharapkan gelar Satrad ini dapat melingkupi seluruh wilayah Nusantara. Pengamanan dan pengendalian wilayah yurisdiksi udara nasional (dirgantara) penting artinya dan mempunyai nilai strategis meliputi deteksi, identifikasi.

Memperhatikan faktor ancaman dan kondisi geografis Indonesia wilayah dirgantara dibagi dalam Zona lapis III, II dan I. Hak Lintas Damai di ruang udara nasional suatu negara seperti hubungan pada hukum laut ditiadakan. Jadi, tidak satu pun pesawat udara asing diperbolehkan melalui ruang udara nasional suatu negara, tanpa izin negara yang bersangkutan.

Google



Penggelaran Kekuatan TNI AU meliputi gelar kekuatan Pertahanan Udara (Hanud), gelar kekuatan Pemukul Udara, gelar kekuatan dalam rangka pengamanan ALKI, gelar kekuatan dalam rangka Pembinaan Kemampuan dan gelar kekuatan untuk memberikan dukungan logistik.

Google



Pemukul udara yang meliputi unsur-unsur pesawat penyerang darat dan maritim, unsur pengintai strategis dan taktis, unsur lintas udara, unsur SAR dan Paskhas digelar di pangkalan-pangkalan operasi.

Satrudal yang selama ini belum dapat direalisasikan akan dibangun dan dilengkapi secara bertahap dengan mengombinasikan sistem Rudal produksi dalam negeri yang dikendalikan melalui teknologi satelit. Gelar Satrudal diprioritaskan di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Timor, Maluku Selatan (Tanimbar) dan Papua (Merauke). Pemukul udara yang meliputi unsur-unsur pesawat penyerang darat dan maritim, unsur pengintai strategis dan taktis, unsur lintas udara, unsur SAR dan Paskhas digelar di pangkalan-pangkalan operasi. Sistem gelar tersebut mempunyai pertimbangan strategis untuk mencapai kemampuan pendadakan yang tinggi serta daya penghancuran maksimal terhadap setiap ancaman udara terutama tindakan pelanggaran wilayah udara atau serangan udara dari negara lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, khusus Skadron Tempur digelar secara seimbang di setiap Koops. Skadron tempur di Pekanbaru ditujukan untuk mewujudkan kekuatan Trimatra Terpadu pada struktur organisasi Kogabwil Sumatera-Kalbar-Kalteng. Skadron tempur yang digelar di Lanud Iswahyudi sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kekuatan Trimatra Terpadu pada struktur organisasi Kogabwil Jawa. Gelar Skadron Tempur di Makassar sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kekuatan Trimatra Terpadu pada struktur organisasi Kogabwil Sulawesi-Bali-Nusa Tenggara, sekaligus menjangkau Kogabwil Maluku-Papua sampai dengan pengembangan Skadron tempur untuk Kogabwil terbentuk. Untuk menjamin pengamanan pangkalan, serta kebutuhan gelar dalam rangka penindakan pada sasaran terpilih, Kesatuan Kopaskhas digelar, baik di setiap Pangkalan Induk maupun di pangkalan lain dan dapat dikembangkan sesuai dengan nilai strategis pangkalan tersebut.

Skadron Angkut digelar secara seimbang di masing-masing Koops untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi Lintas Udara, Pengungsian, Medis Udara, SAR Udara, Penyusupan Udara, serta transportasi udara dalam rangka operasi bantuan TNI.

Dalam rangka itu, gelar Skadron Angkut akan dikembangkan secara bertahap. Bersamaan dengan itu, dikembangkan juga pesawat angkut strategis dan pesawat angkut taktis serta Heli sampai pada tingkatan kemampuan di atas *Minimum Essential Force*, termasuk diantaranya meningkatkan kemampuan pesawat angkut khusus untuk VVIP dan VIP.

Dalam struktur Kogabwil, gelar kekuatan TNI AU berada dalam suatu keterpaduan antara Komando Kewilayahan TNI AD dan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL.

7.2.2 Komponen Cadangan

Pembentukan Komponen Cadangan dari sumber daya nasional diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Pelaksanaannya disusun secara terencana, bertahap, dan proporsional yang dikembangkan dan disiagakan di tiap daerah sesuai kebutuhan setiap matra. Secara ekonomi, Komponen Cadangan ini akan lebih realistis dan menggunakan abggaran pertahanan yang lebih efisien. Komponen Cadangan ini akan mempunyai kekuatan ganda yang dapat memperbesar dan memperkuat Komponen Utama dalam penyelenggaraan Pertahanan Militer dan sekaligus dapat memperkuat Pertahanan Nirmiliter sebagai Unsur Lain.



Pembentukan Komponen Cadangan dari sumber daya nasional diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.

Dengan demikian, pembangunan Komponen Cadangan akan menekankan pada aspek kemampuan yang dimiliki sesuai dengan profesi. Selanjutnya, di masa datang secara tertata dengan meningkatkan kualitas Komponen Cadangan sejalan dengan perkembangan kualitas dari Komponen Utama, namun dari aspek kuantitas akan lebih besar dari Komponen Utama dan lebih sedikit jumlah personennya dari Komponen Pendukung dalam satu kerangka piramida kekuatan pada Sistem Pertahanan Semesta.

7.2.3 Komponen Pendukung

Pembentukan Komponen Pendukung yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan. Partisipasi masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara, komponen bela negara masyarakat, dukungan mutualisme industri strategis pertahanan negara baik secara langsung maupun kemampuan konversi industri, serta keberlanjutan pembiayaan pertahanan melalui pengelolaan keuangan negara. Peran pemangku kepentingan dan lembaga legislatif (DPR) sangat perlu dalam mendukung penetapan regulasi terkait dengan komponen pertahanan negara. Tanpa adanya dukungan regulasi, maka sistem pertahanan negara tidak mungkin diimplementasikan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Komponen Pendukung ini akan mempunyai kekuatan ganda yang dapat memperbesar dan memperkuat Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalam penyelenggaraan Pertahanan Militer serta sekaligus dapat memperkuat Pertahanan Nirmiliter sebagai Unsur Lain.

Google



Pembentukan Komponen Pendukung yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan.

7.3 Postur Pertahanan Nirmiliter

Postur Pertahanan Nirmiliter terdiri dari Unsur Utama dan unsur-unsur lain kekuatan bangsa disusun dan ditata oleh K/L di luar bidang pertahanan. Penataan Unsur Utama dan unsur-unsur lain diharapkan akan dapat terpadu dan berperan sesuai dengan fungsinya pada Pertahanan Nirmiliter.

7.3.1 Unsur Utama

Unsur utama merupakan K/L sebagai leading sector dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Unsur utama disusun dalam kekuatan, kemampuan dan gelar.

Kekuatan

Kekuatan Unsur Utama yang disiapkan oleh Kementerian/ Lembaga telah operasional sesuai dengan ancaman nonmiliter yang dihadapi dan bersinergi dengan seluruh kekuatan bangsa lainnya. Unsur utama menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Keterpaduan/sinergitas antara pertahanan militer dan nirmiliter dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara.

Kemampuan

Pengembangan kemampuan Unsur Utama K/L pada Pertahanan Nirmiliter diarahkan pada kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan iptek, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral, dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

Kemampuan Kewaspadaan Dini

Kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergitas penyelenggaraan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kondisi kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya berbagai hakikat ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk memprediksi dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bisa menjadi ancaman/gangguan bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa yang berdasarkan UUD 1945.

Kemampuan Bela Negara

Kemampuan bela negara yang baik akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Bela Negara merupakan sikap dan perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kemampuan bela negara itu hakikatnya kesadaran dan kesediaan berbakti pada negara serta kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Termasuk dalam hal ini adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena

Google



Bela Negara merupakan sikap dan perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

itu setiap warga negara diarahkan untuk memiliki unsur dasar bela negara, berupa: cinta tanah air; kesadaran berbangsa dan bernegara; yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Kemampuan Diplomasi

Kemampuan diplomasi dilakukan dengan menerapkan manajemen yang lebih baik untuk mengimplementasikan kebijakan politik negara. Usaha dan kegiatan diplomasi sebagai salah satu kemampuan Pertahanan Nirmiliter dioptimalkan untuk mendukung upaya pertahanan negara. Usaha dan kegiatan diplomasi diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara, serta tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing. Usaha diplomasi juga diarahkan sebagai lapis pertahanan terdepan dalam menyelesaikan bentuk-bentuk perselisihan atau konflik dengan negara lain.

Diplomasi diarahkan sebagai lapis pertahanan terdepan dalam penyelesaian bentuk perselisihan atau konflik daya negara lain

Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemampuan iptek dioptimalkan untuk mendukung Pertahanan Nirmiliter. Iptek mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan yang berpotensi memberikan dukungan besar bagi kesejahteraan bangsa, keamanan, kelestarian lingkungan hidup, pelestarian budaya bangsa dan taraf hidup manusia. Kemajuan iptek yang pesat dan bersifat universal merupakan peluang bagi pembangunan kemampuan pertahanan negara, terlebih dalam mempersiapkan Pertahanan Nirmiliter yang melibatkan disiplin ilmu secara integral.

Kemampuan penguasaan teknologi bangsa Indonesia secara umum dapat meningkatkan Pertahanan Nirmiliter. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan teknologi kedirgantaraan, kelautan dan bahkan keantariksaan secara terbatas dengan pemanfaatan teknologi satelit. Penguasaan teknologi juga dapat dilihat dari kemampuan membuat berbagai perangkat yang berteknologi tinggi guna mendukung pertahanan siber. Termasuk dalam penguasaan teknologi moderen secara bertahap, di bidang biologi untuk membangun *biodefence*.

Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi dikembangkan sampai pada tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, berdaya saing, dan mampu mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Dalam kondisi damai, usaha-usaha ekonomi harus dapat mewujudkan kemandirian serta menjamin kepastian dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat secara berkesinambungan, yang pada gilirannya menjadi penopang kepentingan pertahanan. Dalam kondisi darurat, termasuk keadaan perang, kemampuan perekonomian nasional harus dapat menjamin keberlangsungan upaya pertahanan, termasuk menjamin kebutuhan logistik untuk menghadapi perang berlarut dan mampu survive apabila diembargo atau diblokade secara ekonomi.

Kemampuan Sosial

Kemampuan sosial diaktualisasikan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi ini diarahkan untuk menjunjung tinggi kerukunan dan hidup berdampingan secara damai, tanpa mempersoalkan perbedaan ras, agama, suku, dan golongan serta kemampuan penyelamatan warga negara dari bencana dan melakukan bantuan kemanusiaan.

Dalam kondisi damai ekonomi ditujukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam kondisi perang. Ekonomi harus dapat menjamin kebutuhan logistik untuk menghadapi perang berlarut.

Perwujudan kemampuan sosial bangsa Indonesia dikembangkan melalui pendidikan, kesehatan, penanganan bencana dan ketaatan terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut menjadi modalitas yang memberikan kontribusi bagi pertahanan negara, yakni menentukan pembentukan masyarakat yang cerdas, sehat, dan berkualitas. Selain itu, peran media massa, sistem komunikasi dan informasi publik dioptimalkan untuk mendukung implementasi kemampuan sosial dalam mendukung keberhasilan usaha-usaha pertahanan negara.

Kemampuan Moral

Kemampuan moral diaktualisasikan dalam semangat, motivasi, sikap, dan tata laku untuk menumbuhkembangkan nasionalisme, patriotisme, dan heroisme dalam rangka membela dan mempertahankan Indonesia dengan segala kepentingannya. Kemampuan moral juga mencakup komitmen bangsa Indonesia untuk bangga sebagai bangsa Indonesia, percaya akan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik, setia (loyal) kepada negara dan pemerintah, memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, serta menegakan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hukum dan hak asasi manusia, serta keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Kemampuan moral di tanamkan kepada setiap warga negara agar terbentuk sikap bangga sebagai bangsa Indonesia

Kemampuan Dukungan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara mencakup kemampuan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta wilayah pertahanan untuk kepentingan kesejahteraan sekaligus untuk kepentingan pertahanan.

Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan disinkronkan di seluruh wilayah secara proporsional dan seimbang. Pemberdayaan wilayah untuk kepentingan pertahanan meliputi penataan ruang, alat, dan kondisi juang yang memadukan kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan. Dalam pemberdayaan wilayah pertahanan untuk mendukung kepentingan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemberdayaan wilayah pertahanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dikelola dengan memperhatikan hak masyarakat dan kepentingan umum.

Gelar

Unsur utama digelar pada lini depan (lapis pertama) di daerah yang mengalami ancaman nonmiliter. Keberadaan Kementerian/Lembaga sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai unsur utama untuk mengatasi ancaman.

Gelar unsur utama disesuaikan dengan kantor atau badan di wilayah pada setiap Propinsi/Kotamadya/Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.

7.3.2 Unsur-Unsur Lain

Unsur-Unsur Lain merupakan unsur kekuatan sumber daya pertahanan yang dikelola dalam rangka mendukung Unsur Utama pada pertahanan nirmiliter. Unsur-Unsur Lain disusun dalam kekuatan, kemampuan dan gelar.

Kekuatan

Semua unsur kekuatan bangsa di luar kekuatan unsur utama yang dipersiapkan oleh Kementerian/Lembaga telah bersinergi untuk membantu unsur utama sesuai ancaman nonmiliter yang dihadapi. Unsur-unsur lain disiapkan sesuai dengan peran dan fungsi dari masing-masing Kementerian/Lembaga dalam rangka memberikan daya tangkal dan menambah daya kekuatan untuk pertahanan nirmiliter.

Kemampuan

Kemampuan yang harus dimiliki untuk Unsur-Unsur Lain sama dengan kemampuan Unsur Utama pada pertahanan nirmiliter dan disesuaikan dengan peran dan fungsinya yang dimiliki oleh Unsur-Unsur Lain. Kemampuan Unsur-Unsur Lain diarahkan pada kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan iptek, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral, dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

Gelar

Unsur-unsur lain digelar sesuai dengan peran dan fungsinya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari unsur utama. Unsur-unsur lain dapat memperkuat unsur utama disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi baik ancaman bersifat militer maupun nonmiliter dalam rangka mendukung pertahanan militer dan nirmiliter.



Dalam pelaksanaan perang berlarut diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan cara aksentuasi keadaan geografi, demografi, dan kondisi sosial agar menjadi kekuatan pertahanan yang efektif . Di samping itu perlu adanya pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sarana prasarana lainnya sehingga menjadi kemampuan cadangan dan pendukung guna terwujudnya suatu kekuatan pertahanan negara yang handal.

PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019

Bab 8

8.1 Umum

Pembangunan pertahanan negara dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan strategis pembangunan nasional yang tertuang pada RPJPN Tahun 2005-2025. Pembangunan pertahanan negara tahun 2015-2019 merupakan Renstra II dari pembangunan jangka panjang. Selain hal tersebut, Renstra II merupakan kelanjutan dari Renstra I tahun 2010-2014 yang belum selesai dilaksanakan. Pembangunan pertahanan negara diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara berdasarkan arah dan strategi perancangan kapabilitas pertahanan guna mencapai Postur Pertahanan Negara yang diharapkan.

Pembangunan Pertahanan negara diarahkan untuk memiliki kekuatan di atas *Minimum Essential Force* pada akhir Renstra III tahun 2024

8.2 Arah Pembangunan Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang kuat. Potensi tantangan yang dihadapi Indonesia semakin kompleks dan beragam. Pembangunan pertahanan negara terus disesuaikan dan diarahkan agar dapat menjawab berbagai kemungkinan ancaman, permasalahan aktual, serta pembangunan kapabilitas pertahanan jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika lingkungan strategis.

Pembangunan postur Komponen Utama diarahkan agar memiliki kekuatan, kemampuan, dan gelar yang mampu untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa dan negara.

Postur pertahanan matra darat diarahkan untuk mampu mengatasi kondisi medan yang beragam dan melakukan pergerakan cepat antarwilayah dan antarpulau dalam mengatasi setiap ancaman. Postur matra laut diarahkan untuk membangun kemampuan dalam mengamankan luasnya wilayah laut Nusantara di permukaan dan kedalaman, serta memberikan dukungan dan kompatibilitas terhadap pergerakan matra darat dan udara. Postur matra udara diarahkan untuk dapat mengawasi terutama ruang udara nasional dan sebagian ruang udara regional, mampu melakukan penjagaan ruang udara nasional, mampu memanfaatkan ruang angkasa, dan memberikan dukungan operasi bersama antarmatra.

Pembentukan Komponen Cadangan dari sumber daya nasional diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Pelaksanaannya disusun secara terencana, bertahap, dan proporsional yang dikembangkan dan disiagakan di tiap daerah sesuai kebutuhan setiap matra. Komponen Cadangan ini merupakan pengganda yang dapat memperbesar dan memperkuat Komponen Utama dalam penyelenggaraan Pertahanan Militer dan sekaligus dapat memperkuat Pertahanan Nirmiliter sebagai Unsur Utama atau Unsur Lain. Dengan demikian, pembangunan Komponen Cadangan akan menekankan pada aspek keahlian yang dimiliki.

Komponen Cadangan disusun secara bertahap dan proporsional dikembangkan dan disiagakan di tiap daerah sesuai kebutuhan setiap matra

Selanjutnya, di masa datang kualitas Komponen Cadangan akan sejalan dengan perkembangan kualitas dari Komponen Utama. Dari aspek kuantitas, Komponen Cadangan akan lebih besar dari Komponen Utama dan lebih sedikit jumlah personelnnya dari Komponen Pendukung dalam satu kerangka piramida kekuatan pada Sistem Pertahanan Semesta.

Pembentukan dan pemantapan kemampuan Komponen Pendukung diarahkan untuk penguasaan kemampuan memanfaatkan kondisi sumber daya alam dan buatan, sinkronisasi pembangunan sarana, prasarana nasional terhadap kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara, komponen bela negara masyarakat, dan dukungan mutualisme industri strategis pertahanan negara.

8.3 Rancang Bangun Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara dilaksanakan berdasarkan strategi pertahanan yang merefleksikan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan pertahanan. Pembangunan pertahanan dikembangkan untuk mencapai kemampuan penangkalan menghadapi kondisi terburuk (perang). Pembangunan pertahanan melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah sebagai satu kesatuan pertahanan yang mengintegrasikan dan menyinergikan kekuatan Pertahanan Militer dalam wujud kekuatan darat (*land power*), kekuatan laut (*sea power*), kekuatan udara (*air power*) dan Pertahanan Nirmiliter.

Pembangunan pertahanan melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, sebagai satu kesatuan pertahanan yang mengintegrasikan dan menyinergikan kekuatan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

Sasaran pembangunan pertahanan adalah terwujudnya kondisi aman dan damai di berbagai daerah yang terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan, yang ditandai dengan peningkatan kekuatan, kemampuan dan gelar sehingga makin tertatanya Postur Pertahanan Negara.

8.4 Pembangunan Pertahanan Militer

Pembangunan Pertahanan Militer dilakukan dengan mewujudkan tiga Kogabwilhan dimaksudkan untuk mewujudkan strategi militer yang bersifat Trimatra Terpadu. Pertahanan Militer diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta, mempersiapkan pertahanan defensif aktif, dan menyusun pertahanan berlapis.

8.4.1 Komponen Utama

Mabes TNI.

Pembangunan kekuatan personel diselenggarakan dengan tetap mempedomani prinsip *zero growth*, sehingga jumlah kekuatan personel saat ini tetap dipertahankan.

TNI AD

Organisasi.

Pengembangan organisasi dilakukan dengan mempedomani kebijakan *right sizing* yang diarahkan untuk mencapai komposisi yang proporsional antara satuan operasional dengan satuan pendukung yaitu 70:30, yang terbagi atas pembentukan satuan baru dan pengembangan satuan yang telah ada.

Pembentukan satuan baru meliputi: Satuan Tempur/Satpur, Satuan Bantuan Tempur/Satbanpur dan Satuan Bantuan Administrasi/Satbanmin, Satuan Komando Wilayah/Satkowil, Satuan Intelijen/Satintel, dan Badan Pelaksana Pusat/Balakpus. Pengembangan Satuan/Validasi Satuan dalam rangka peningkatan kemampuan, meliputi: Satpur dan Alih Kodal Satuan.

Personel.

Pembangunan postur personel TNI AD pada Pertahanan Militer tetap mengacu pada rencana strategis pembinaan dan penggunaan personel. Meskipun dilaksanakan pembangunan dan pengembangan organisasi, namun kekuatan personel masih mengacu pada kebijakan *zero growth*.

Materiil.

Pengembangan materiil diarahkan untuk modernisasi Alutsista dan non-Alutsista. Pengadaan baru untuk memenuhi kebutuhan satuan maupun penggantian Alutsista/non-Alutsista yang dimiliki satuan, meliputi: Senjata, kendaraan tempur (Ranpur), Panser Yonif Mekanis, Ranpur Kavaleri, kendaraan taktis (Rantis), kendaraan administrasi (Ranmin), kendaraan khusus (Ransus), alat angkut air (Alangair) dan perbekalan udara (Perbekud), Pesawat Terbang, Materiil Zeni, alat perhubungan (Alhub), material khusus (Matus) Intel, munisi, optik, alat optik (Altop), Materiil Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan alat kesehatan (Alkes). Rematerialisasi satuan meliputi: empat kompi kavaleri (Kikav), dua detasemen kavaleri (Denkav), dan dua batalyon kavaleri (Yonkav).

Google



Pangkalan.

Pengembangan fasilitas pangkalan diarahkan untuk melanjutkan pembangunan pangkalan satuan baru sesuai pentahapan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya.

TNI AL

Organisasi.

Pengembangan organisasi TNI AL diarahkan dalam rangka mendukung pembentukan Kogabwilhan, serta melanjutkan validasi organisasi. Validasi organisasi TNI AL dilaksanakan dalam rangka pembentukan Kohanla RI terutama pembentukan organisasi pendukung di bawah satuan kerja (Satker) Kohanla.

Personel.

Pembangunan personel TNI AL mengacu pada kebijakan *zero growth* sehingga kekuatan personel tetap berada pada jumlah 68.142 orang. Pembinaan dan penggunaan personel TNI AL dalam rangka pola karier dan peningkatan kemampuan SDM yang profesional untuk mengawaki modernisasi dan pemeliharaan Alutsista TNI AL.

Materiil.

Pembangunan materiil dilakukan melalui pengadaan materiil meliputi: 69 unit Kapal Republik Indonesia (KRI), 38 unit Pesawat udara (Pesud), 283 unit Ranpur Marinir, Peralatan Laut Khusus (Palasus), Material Perbekalan (Matbek) dan Material Khusus (Matsus). Selain itu, dilaksanakan penghapusan 35 unit KRI, 18 unit Pesud, dan 150 unit Ranpur.

Google



Pangkalan.

Pembangunan pangkalan TNI AL dilaksanakan dalam rangka mendukung pembentukan Kogabwilhan. Pembangunan tersebut dilakukan dengan melanjutkan peningkatan Fasilitas Pelabuhan (Faslabuh), Fasilitas Perbekalan (Fasbek), Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan), Fasilitas Perawatan dan Personel (Faswatpers), serta Fasilitas Pembinaan Pangkalan (Fasbinlan).

TNI AU**Organisasi.**

Sasaran bidang organisasi diarahkan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, serta terlaksananya validasi Kotama: Komando Pendidikan Angkatan Udara (Kodikau) dan Korps Pasukan Khas (Korpaskhas). Kodikau menjadi Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklat). Korpaskhas melanjutkan validasi organisasi yang meliputi: tiga Wing, satu Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat), satu Detasemen Bravo (Denbravo) menjadi Satuan Bravo (Satbravo).

Personel.

Pembangunan postur personel TNI AU pada Pertahanan Militer tetap mengacu pada rencana strategis pembinaan dan penggunaan personel. Pembinaan dan penggunaan personel TNI AU dalam rangka pola karier dan peningkatan kemampuan SDM yang profesional untuk mengawaki modernisasi dan pemeliharaan Alutsista TNI AU. Dengan mempedomani kebijakan *zero growth*, sehingga kekuatan personel tetap berada pada jumlah 32.637 orang.

Google



Google



Materiil.

Pembangunan materiil dilakukan dengan melanjutkan pengadaan materiil Skadron Udara untuk delapan skadron tempur, enam skadron angkut, dua skadron VIP/VVIP, tiga skadronintai, empat skadron helikopter, dua skadron latihan, dua skadron Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA), 28 Satuan Radar (Satrad), tiga Satuan Tembak (Satbak) Peluru Kendali (rudal) jarak sedang, dan dua belas *Battery* Penangkis Serangan Udara (PSU) jarak pendek.

Pangkalan.

Pembangunan pangkalan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan pada tahap 2010-2014, yang meliputi sepuluh Pangkalan Udara (Lanud) Tipe A, dua belas Lanud Tipe B, empat belas Lanud Tipe C, delapan Lanud Tipe D, enam belas Detasemen, dan tujuh Depo Pemeliharaan (Depohar).

Kesejahteraan Prajurit TNI

Pada tahun 2015-2019 penghasilan prajurit dalam bentuk gaji dan tunjangan, telah didukung pula dengan pemberian remunerasi 100% sehingga tuntutan kinerja sudah bisa diwujudkan sesuai dengan analisa beban kerja.

Di bidang layanan kesehatan, telah dapat diwujudkan melalui layanan dokter dan rumah sakit serta layanan obat-obatan yang diberikan secara penuh dengan kualitas yang memadai untuk melayani kesehatan prajurit dan keluarga secara profesional medik dan pelayanan kesehatan yang lebih baik sesuai dengan peran dan fungsinya dalam rangka melayani kesehatan prajurit dan keluarga prajurit.

Memperbaiki sistem manajemen rumah sakit yang lebih

profesional dan mengotimalkan dukungan kesehatan pada masa damai dan dukungan pada setiap operasi penugasan.

Penyediaan fasilitas perumahan bagi prajurit, berupa fasilitas rumah dinas atau asrama oleh pemerintah telah dapat dipenuhi. Sedangkan bagi prajurit yang menjelang purnabakti, secara keseluruhan sudah diarahkan untuk pembelian perumahan pribadi melalui pemanfaatan bantuan pemanfaatan tunjangan perumahan prajurit secara transparan dan akuntabel. Penataan rumah dinas, tanah TNI dan perkantoran disetiap satuan secara profesional, berlandaskan hukum, sinergi dan terintergratif dengan instansi terkait. Penataan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka tertib administrasi dan pertanggungjawaban aset-aset kekayaan milik negara. Pemanfaatan dan penataan secara profesional terhadap yayasan sosial satuan-satuan TNI secara transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan prajurit dan keluarga, terutama dalam memberikan dukungan prioritas pendidikan sekolah bagi putra dan putri anggota TNI dalam mengikuti pendidikan sekolah dan kuliah.

Selanjutnya sistem pensiun sudah dibenahi untuk menjamin kepastian ketenangan hidup prajurit di masa purnabakti, sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdianya selama berdinasi aktif.

8.4.2 Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung

Pembangunan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dititikberatkan pada proses pengesahan legislasi.

Google



Selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang, secara bertahap menyiapkan pembentukan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dalam rangka memenuhi kebutuhan Pertahanan Militer.

8.5 Pembangunan Pertahanan Nirmiliter

Kekuatan Pertahanan Nirmiliter dikembangkan oleh masing-masing K/L di luar bidang pertahanan sesuai dengan fungsinya masing-masing serta ancaman nonmiliter yang dihadapi dalam wadah Unsur Utama dan unsur-unsur lainnya. K/L di luar bidang pertahanan menyiapkan perangkat lunak pengintegrasian kemampuan tiap-tiap sektor dalam kemampuan Pertahanan Nirmiliter.



8.5.1 Unsur Utama

Program pembangunan Unsur Utama dipadukan dengan program K/L terkait sesuai dengan kecenderungan tantangan di bidang nonmiliter yang timbul dan membangun pemahaman perannya dalam pertahanan negara.

8.5.2 Unsur Lainnya

Program pembangunan Unsur-Unsur Lain disesuaikan dengan program masing-masing K/L yang setiap saat bisa diarahkan untuk membantu kegiatan Unsur Utama dan membangun pemahaman perannya dalam pertahanan negara.

8.6 Pembinaan Pertahanan Negara

Pembinaan kemampuan pertahanan negara dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga non-Kementerian yang diwujudkan dalam pembangunan postur TNI dan penyelenggaraan pembangunan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.

Pembinaan kemampuan Pertahanan Militer dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan TNI yang diwujudkan dalam pembangunan postur TNI yang handal, agar mampu menghadapi ancaman militer dan membantu dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Agar pembinaan kemampuan lebih efektif, maka diperlukan sinergitas Trimatra Terpadu yang meliputi doktrin, perencanaan, operasi, pendidikan latihan, dukungan logistik, dan Alutsista. Kemampuan Komponen Utama yang sudah terwujud perlu diimbangi dengan penyiapan kemampuan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Pembinaan kemampuan Pertahanan Nirmiliter dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dapat bertindak sebagai Unsur Lain dalam penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter.

Dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan negara di wilayah, dan sebagai instansi vertikal di daerah maka pembentukan Kantor Wilayah Pertahanan (Kanwilhan) merupakan suatu keniscayaan dari implementasi pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia.

Pembinaan kemampuan pertahanan militer dibangun untuk mewujudkan Tri Matra Terpadu yang meliputi perencanaan, operasi pendidikan dan latihan, dukungan logistik dan alutsista.

8.6.1 Kapabilitas Pertahanan Negara

Kapabilitas pertahanan negara yang dikembangkan untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta mengintegrasikan kapabilitas Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Kapabilitas pertahanan negara disusun berdasarkan strategi pertahanan negara yang merefleksikan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan dan sumber daya nasional. Dalam rangka melaksanakan strategi pertahanan negara, kapabilitas pertahanan dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan, yakni kapabilitas pertahanan yang mampu menangkal dan mengatasi agresi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Dalam lingkup tersebut, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk menghadapi kondisi terburuk berupa perang. Jika kapabilitas pertahanan dibangun dengan standar konvensional untuk mampu mempertahankan diri dari agresi, niscaya tugas-tugas pertahanan lainnya akan mampu diemban.

Dalam rangka melaksanakan strategi pertahanan negara, kapabilitas pertahanan dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan, yakni kapabilitas pertahanan yang mampu menangkal dan mengatasi agresi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa.

8.6.2 Pengorganisasian Kekuatan Pertahanan Negara

Kekuatan pertahanan negara Indonesia memadukan kekuatan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Pertahanan Militer diorganisasikan ke dalam Komponen Utama, yakni TNI, yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pengorganisasian Pertahanan Nirmiliter dibedakan atas dasar hakikat dan jenis tantangan yang dihadapi.

Dalam menghadapi tantangan di bidang militer, Pertahanan Nirmiliter diorganisasikan ke dalam Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan untuk menjadi pengganda Komponen Utama.

8.6.3 Strategi Perancangan Kapabilitas Pertahanan Negara

Perancangan kapabilitas pertahanan negara didasarkan atas enam faktor utama, yaitu: *Pertama*, perkiraan tantangan terhadap Indonesia dan segala kepentingannya, yakni ancaman yang menjadi domain fungsi pertahanan, termasuk tugas-tugas pelibatan pertahanan yang sah. *Kedua*, strategi pertahanan negara yang menyinergikan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan menyeluruh. *Ketiga*, tingkat penangkalan yang memenuhi standar penangkalan agar dapat menangkal tantangan yang diperkirakan. *Keempat*, tingkat probabilitas kerawanan tertinggi bagi Indonesia yang menjadi sumber-sumber tantangan atau sumber-sumber konflik di masa datang. *Kelima*, luas wilayah dan karakteristik geografi Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dengan wilayah perairan yang luas dan terbuka. *Keenam*, kemampuan rasional negara dalam membiayai pertahanan negara, termasuk dalam pembangunan kapabilitas pertahanan negara dengan tidak mengorbankan sektor-sektor lain.



ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA

Bab 9

9.1 Umum

Pembangunan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah. Selama ini penentuan jumlah anggaran pertahanan berdasarkan kepada faktor kemampuan keuangan negara dan alokasi prioritas pembangunan pada setiap Renstra Pembangunan Nasional.

9.2 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pertahanan negara diharapkan dapat mendukung pembangunan pertahanan negara sesuai dengan Renstra Pembangunan. Apabila diukur dari nilai PDB, rata-rata anggaran pertahanan dalam beberapa dekade terakhir relatif konstan, yakni berada di bawah 1%.

Anggaran pertahanan yang riil untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan Alutsista, dan pembangunan kekuatan pertahanan berada di bawah kebutuhan minimal. Tugas-tugas pertahanan dalam negeri, yakni dalam kerangka mengatasi konflik yang berdimensi keutuhan wilayah NKRI, menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, serta membantu pemerintah dalam penanganan dampak bencana alam di sejumlah daerah semakin menyadari betapa pentingnya kesiap-siagaan pertahanan, baik personel maupun Alutsista, serta dukungan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan operasi.

TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004)

Tantangan pertahanan pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan akan lebih kompleks. Tugas mengawal NKRI yang berdimensi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tetap menjadi prioritas penyelenggaraan pertahanan negara. Wilayah Indonesia yang sangat luas, membutuhkan alokasi anggaran pertahanan yang proporsional. Dengan alokasi anggaran pertahanan di bawah 1% dari PDB menjadi tantangan yang tidak mudah dalam penyelenggaraan pertahanan untuk mengawal NKRI.

Pada sisi lain, fungsi pertahanan negara juga dihadapkan dengan kecenderungan global dalam penanganan ancaman terorisme, ancaman keamanan lintas negara, terutama kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia yang menguras kekayaan alam, seperti perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, dan gangguan keamanan maritim lainnya. Di samping itu, dampak pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang ekstrem sehingga kemungkinan terjadinya bencana alam di kawasan dan di dalam negeri diperkirakan akan meningkat. Dalam kondisi tersebut intensitas pelibatan kekuatan TNI dalam penanggulangan dampak bencana alam akan semakin tinggi pula. Keterlibatan Indonesia dalam tugas-tugas perdamaian dunia serta di kawasan diperkirakan akan meningkat. Keterlibatan tugas-tugas perdamaian dunia merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia, misi perdamaian dunia dan pelibatan di kawasan menuntut kesiapan pertahanan negara.

9.3 Proyeksi ke Depan

Menghadapi tantangan tugas pertahanan tersebut, pembangunan pertahanan diprioritaskan pada pembangunan kekuatan dan peningkatan profesionalisme prajurit dengan ketersediaan Alutsista yang mampu mendukung kesiapsiagaan dan mobilitas. Dalam konteks tersebut, kekuatan pokok pertahanan mendesak untuk direalisasikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, proyeksi anggaran pertahanan diharapkan dapat berada di atas 1% dari PDB dan meningkat secara bertahap dalam sepuluh tahun yang akan datang. Data dukungan alokasi anggaran pertahanan negara pada tahun 2010 didukung sebesar Rp.5.253.192,00 M (0.84% PDB), tahun 2011 sebesar Rp.5.853.789,00 M (0.81% PDB), tahun 2012 sebesar Rp.7.389.018,00 M (0.91% PDB), tahun 2013 sebesar Rp.8.456.821,00 M (0.91% PDB), dan tahun 2014 sebesar Rp.8.616.563,38 M (0.88 % PDB).

Kebutuhan anggaran pertahanan yang rasional dalam 15 sampai dengan 20 tahun yang akan datang diproyeksikan minimal 2 % dari PDB. Proyeksi tersebut merupakan kalkulasi yang proporsional, cermat, dan rasional dihadapkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi, tanpa mengganggu keseimbangan pembangunan pada sektor-sektor pembangunan lainnya di luar bidang pertahanan.

Disadari bahwa tantangan pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan upaya untuk menggali sumber-sumber pemasukan negara merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pertahanan. Namun, penentuan alokasi

anggaran pertahanan tidak cukup hanya berdasarkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga perlu didasarkan pada rasio kebutuhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi. Pemenuhan anggaran pertahanan pada rasio yang proporsional akan membangun kemampuan pertahanan yang berdaya tangkal sekaligus memberikan efek stabilitas yang mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan.





"Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Bab 10

PENUTUP

Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2014 ini merupakan dokumen pemerintah di bidang pertahanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Isi dalam buku ini merupakan rangkuman Produk-Produk Strategis untuk memberikan gambaran secara umum tentang kebijakan pertahanan negara, Strategi Pertahanan Negara, dan pembangunan Postur Pertahanan Negara. Buku Putih Pertahanan Indonesia ini berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Lembaga Pemerintah di luar bidang pertahanan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara, serta disebarluaskan ke masyarakat umum, baik domestik maupun internasional untuk menciptakan saling percaya (*Confidence Building Measures*), dan meniadakan potensi konflik.

Jakarta, 13 Oktober 2014
Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro

TIM PENYUSUN

PELINDUNG :

PURNOMO YUSGIANTORO
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA TIM PENGARAH :

SJAFRIE SJAMSOEDDIN
WAKIL MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

PENGARAH:

JENDERAL TNI BUDIMAN
LETJEN TNI R. EDIWAN PRABOWO, S.I.P
LETJEN TNI IR. DRS.SUBEKTI M. SC, M.PA
LAKSDYA TNI SUMARTONO
LAKSDYA TNI DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.SC
MAYJEN TNI PUGUH SANTOSO, S.T., M.SC
MAYJEN TNI SONNY E.S. PRASETYO, M.A
MAYJEN TNI SUWARNO, S.IP., M.SC
MARSDYA TNI ISMONO WIJAYANTO
LAKSDA TNI AGUS PURWOTO
LAKSDA TNI IR. RACHMAD LUBIS
LAKSDA TNI F. HENRY B. SOELISTYO, S. SOS
DR. IR. POS HUTABARAT, M.A., M.SC
PROF .DR., IR EDDY SUMARNO SIRADJ M.SC



NARA SUMBER:

PROF . DR HASJIM DJALAL

PROF. HIKMAHANTO JUWANA, SH., LL.M., PH.D

DR.J. KRISTIADI

DR. IR. M. SAID DIDU

DR ANDY WIJAYANTO

EDY PRASETYONO, PH.D

DR. RIANT NUGROHO

DR. ANAK AGUNG BANYU PERWITA

MAYJEN TNI (PURN) DADI SUSANTO, S.H, M.H

MARSDA TNI (PURN) DR KOESNADI KARDI, M.SC, RCDS

LAKSDA TNI (PURN) IMAM ZACKY

BRIGJEN TNI HARYOKO SUKARTO

BRIGJEN TNI IMAM EDY MULYONO, M.SC

MARSMA TNI WISNU SUKARJO. M.SC

LAKSMA TNI DR. AMARULLA OKTAVIAN ST., M.SC.,D.E.S.D

KETUA:

MAYJEN TNI YOEDHI SWASTANTO, M.B.A
BRIGJEN TNI MUHAMMAD NAKIR, S.IP

SEKERTARIS:

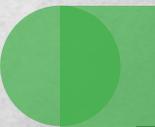
BRIGJEN TNI TRI LEGIONOSUKO, S.IP., M.AP
KOLONEL INF DJUNDAN EKO BINTORO, M.SI (HAN)

ANGGOTA:

BRIGJEN TNI A. PERKASA, S.E.,M.A., M.SC
KOLONEL LAUT (E) IR. HPL TOBING
KOLONEL INF EDISON SIMANJUNTAK
KOLONEL INF ANDI PERDANA KAHAR
KOLONEL LEK PENNY RADJENDRA, S.T., M. SC
KOLONEL CPM CHANDRA W. SUKOTJO
KOLONEL CAJ ANDARU NUGROHO, S.SOS, M SI
KOLONEL PNB OKA PRAWIRA, M.SI
KOLONEL LAUT (P) ANWAR SAADI, S.H
KOLONEL SUS SUHARTO
KOLONEL ARH CHANDRA WIJAYA
KOLONEL PNB BAMBANG NUR WICAHYO
KOLONEL PNB DEDY GHAZI, S.IP, M.SI
KOLONEL LAUT (P) DIDIK SETIYONO
KOLONEL KAV BASUKI



KOLONEL PNB ARIF MUSTOPO
KOLONEL CZI HARANGAN SITORUS,S.IP,M.SC,M.SI (HAN)
DRA. M. ERNI SRI MURTININGSIH, M.M
LETKOL LAUT (KH/W) DRA. LILY LIMANOVLAVA,M.SI (HAN)
LETKOL LAUT (P) AGUS SURYA DHARMAWAN, SE
LETKOL INF BINSAR SIANIPAR
LETKOL INF SUWARNO
LETKOL INF SUPRAPTO
LETKOL LAUT (KH) ACHADI SANTOSO, S.H
MAYOR INF KRISTOMEI SIANTURI
MAYOR KAV MAKHDUM HABIBURRAHMAN,S,SOS.
MAYOR LAUT (P) NOFRIYADI
MAYOR INF ARI PRASETYA
MAYOR KAV Y. PRASETYO PURNOMO, S.SOS
MAYOR CPM MOENDI NOEGROHO,S.H
MAYOR LAUT (P) BAMBANG SUPRIYONO
KAPTEN INF MOHAMMAD BENRIYADIN
KAPTEN ARM AJIE NUGROHO
KAPTEN INF KUNTO ADI SETIAWAN
RUSMIN FS. S.E





KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN
Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14. JAKARTA